



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN



BUKU STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN BANGGAI

20
24





SAMBUTAN

BUPATI KABUPATEN BANGGAI

H. AMIRUDIN,MM.,AIFO

Seiring cepatnya laju perkembangan teknologi, Informasi saat sekarang ini, dapat mewujudkan visi “Terwujudnya Banggai Maju, Mandiri dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal”.

Kerja keras para ASN dalam implementasi Banggai Satu Data dan Partisipasi Organisasi Daerah (OPD) yang terus menerus mengejar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),

Maka melalui Data Statistik Sektoral Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai dapat mewujudkan layanan informasi data di kalangan Pemerintah Khususnya layanan informasi data dikalangan masyarakat pada umumnya demi kelancaran penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai.

Di Era Demokrasi seperti ini di tengah pesatnya perkembangan teknologi di segala Bidang menurut kita selaku Penyelenggara Pemerintah Daerah, untuk lebih terbuka dan transparansi dalam menyajikan data dan Informasi kepada masyarakat dan terus mensukseskan Banggai Satu Data



SAMBUTAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI **H. FURQANUDDIN .M**

Di era demokrasi seperti sekarang ini ditengah pesatnya perkembangan teknologi yang merambah disegala ini dalam masyarakat, menuntut kita selaku penyelanggara pemerintah daerah untuk lebih terbuka dan transparan dalam penyajian data dan informasi kepada masyarakat.

Dapat mewujudkan kecepatan informasi data melalui Banggai Satu Data untuk mengejar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), demi kelancaran penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai dan tercapainya urusan Banggai Satu Data, maka melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menukseskan Statistik Sektoral Banggai Satu Data Kabupaten Banggai.



SAMBUTAN

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANGGAI
LESMANA P. KULAB, S.Kom**

Untuk mendukung akselerasi transformasi digital di Kabupaten Banggai, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai telah menetapkan kegiatan strategis di bidang Teknologi Informasi. Yang menjadi fokus utamanya adalah mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik berkinerja tinggi, transparan dan akuntabel serta mewujudkan Data Statistik Sektoral Kabupaten Banggai, dengan menciptakan dan mengembangkan inovasi layanan administrasi pemerintahan dan Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Mewujudkan Banggai Satu Data yang lebih maju.

Selain itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai dituntut untuk aktif mengadaptasi dan memberikan informasi kepada publik, di segala sektor mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Banggai siap melangkah bersama dengan semangat baru yang diwarnai dengan inovasi, integritas, optimisme dan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Banggai.

Tim Penyusun :

- **Penanggung Jawab :**
Lesmana P. Kulab, S.Kom
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- **Ketua :**
Nurma Yanti, SE.MM
Kepala Bidang Statistik
- **Wakil Ketua :**
Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- **Sekretaris :**
Arif Nasri, S.Sos
- **Anggota :**
Kepala Bidang E-Government
Kepala Bidang Teknologi dan Informasi
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik
Kepala Bidang Persandian
- **Koordinator Penyunting/Editor :**
Yudie Bermuli, SH
Asmah, S.I.P
Sitti Norma Dg. Manessa
Fitri Nafidah, S.Stat
Herza Nadhea Putri S., S.Stat
Hari Wiharto Pujiomo, S.Kom
- **Desain Grafis dan Lay-out :**
Muhamad Iqbal Halid, SE
Sandy Kusdianto Tulardi

Alamat :

Jl. Urip Sumoharjo, No. 15

Telp. : -

Email : statistikdkisp@gmail.com

Website : <https://data.banggaikab.go.id>



ARTI LAMBANG

Perisai Lima, mengartikan bahwa Daerah Kabupaten Banggai adalah bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Bintang Bersudut Lima, berwarna Kuning Emas mengartikan sinar cahaya keagungan Tuhan Yang Maha Esa.

Burung Maleo yang berwarna Coklat dan Hitam dalam keadaan terbang adalah jenis margasatwa yang spesifik terdapat di Daerah Kabupaten Banggai dan mempunyai hubungan dengan adat istiadat di Daerah Kabupaten Banggai dan melambangkan tenaga membangun dari rakyat di Daerah Kabupaten Banggai.

Gunung ialah Gunung Tompotika di Daerah Kabupaten Banggai yang melambangkan kesabaran jiwa dan ketinggian cita-cita rakyat di Daerah Kabupaten Banggai.

Garis Batas yang berwarna kuning emas, adalah daratan yang melambangkan kesuburan tanah daerah Kabupaten Banggai.

Laut berwarna biru, mengartikan sebagian Daerah Kabupaten Banggai terdiri dari Pulau-pulau yang kaya dengan hasil laut.

Sebatang Pohon Kelapa Berdaun 9 (Sembilan) dan berbuah 60 (enam puluh) mengartikan hasil utama Kabupaten Banggai dan melahirkan angka 1, 9 dan 60 yang berarti 1960.

Kulit Mutiara, adalah satu hasil laut yang spesifik terdapat di Daerah Kabupaten Banggai yang menghasilkan biji mutiara dan kulitnya dibuat perhiasan.

Padi 8 (delapan) butir warna kuning emas, mengartikan kemakmuran yang hendak dicapai dan melahirkan angka 8.

Kapas 7 (tujuh) buah juga mengartikan kemakmuran yang hendak dicapai dan melahirkan angka 7. Bingkai Perisai dan Pita Berwarna Putih bertuliskan "KABUPATEN BANGGAI" dengan huruf berwarna hitam mengartikan kesucian dan ketabahan hati rakyat Daerah Kabupaten Banggai.

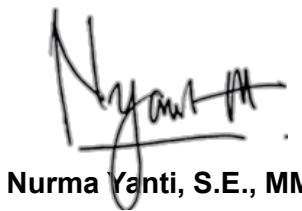
Warna Merah pada Perisai mengingat sejarah Kerajaan Banggai dahulu yang menggunakan bendera berwarna merah juga melambangkan keberanian dan kepahlawanan rakyat daerah Kabupaten Banggai.

KATA PENGANTAR

Buku Data Statistik Sektoral Kabupaten Banggai Tahun 2024 merupakan salah satu media diseminasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Banggai yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai. Data dan Informasi yang dimuat dalam buku ini merupakan hasil Kompilasi Data Statistik Sektoral yang disertai dengan metadatanya atau informasi dari data yang ditampilkan. Buku ini berisi data sekunder dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Banggai yang bersifat series/tahunan berdasarkan target kinerja RPJMD Tahun 2023. Dengan adanya buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi Kabupaten Banggai berdasarkan Data Statistik Sektoral yang disajikan. Publikasi Buku Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Banggai akan terus mengalami penyempurnaan baik struktur, ulasan maupun mutunya. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga penyusunan Buku Data Statistik Sektoral Kabupaten Banggai Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan Data Statistik, baik oleh Institusi Pemerintah

Banggai, 20 Desember 2024

Kepala Bidang Statistik



Nurma Yanti, S.E., MM

DAFTAR ISI

6

SAMBUTAN BUPATI BANGGAI

SAMBUTAN WAKIL BUPATI BANGGAI

SAMBUTAN KEPALA DINAS DKISP BANGGAI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I GAMBARAN UMUM

1.1 Keadaan Geografis

1.2 Keadaan Iklim

BAB II PEMERINTAHAN

2.1 Sekretariat

2.2 Sekretariat DPRD

2.3 Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.4 Kesatuan Bangsa dan Politik

2.5 Kependudukan dan Catatan Sipil

2.6 Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

2.7 Inspektorat Daerah

2.8 Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah

2.9 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2.10 Riset dan Inovasi Daerah

BAB III PEMBANGUNAN MANUSIA

- 3.1 Pendidikan dan Kebudayaan
- 3.2 Pemuda dan Olahraga
- 3.3 Kesehatan
- 3.4 Sosial
- 3.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3.6 Perpustakaan dan Kearsipan
- 3.7 Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 3.8 Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB IV INFRASTRUKTUR

- 4.1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4.2 Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- 4.3 Lingkungan Hidup
- 4.4 Perhubungan

BAB V EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 5.1 Pangan
- 5.2 Pertanian
- 5.3 Pariwisata
- 5.4 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 5.5 Perikanan
- 5.6 Peternakan
- 5.7 Pendapatan Daerah
- 5.8 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 5.9 Perdagangan dan Perindustrian

BAB VII PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPOL PP

6.1 Penanggulangan Bencana Daerah

6.2 Pemadam Kebakaran

6.3 Satuan Polisi Pamong Praja

KESIMPULAN

BAB I

GAMBARAN UMUM

Kabupaten Banggai merupakan salah satu daerah otonom dan masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ber-ibukota di Luwuk, terletak pada titik koordinat antara $122^{\circ}23'$ dan $124^{\circ}20'$ Bujur Timur, serta $0^{\circ}30'$ dan $2^{\circ}20'$ Lintang Selatan, memiliki Luas wilayah daratan $\pm 9.672,70 \text{ Km}^2$ atau sekitar 14,22 % dari luas Provinsi Sulawesi Tengah dan luas laut $\pm 20.309,68 \text{ Km}^2$ dengan garis pantai sepanjang 613,25 km.

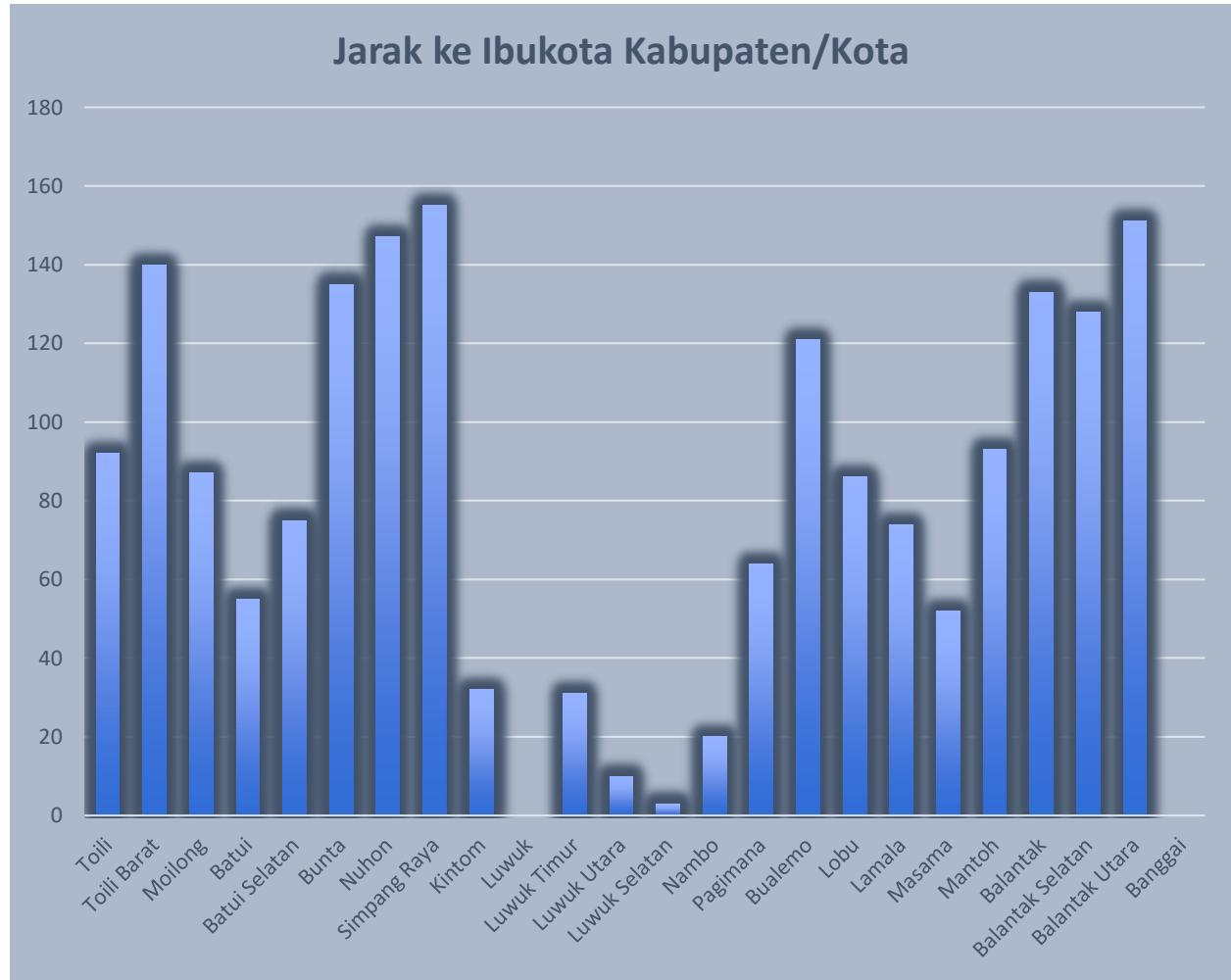
Berdasarkan posisi geografinya, Kabupaten Banggai memiliki batas-batas:

- Bagian Utara : Berbatasan dengan wilayah Tomini
- Bagian timur : Berbatasan dengan Wilayah Provinsi Maluku Utara
- Bagian selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Bagian barat : Bibatasi oleh Kabupaten Tojo Una-Una dan Morowali.

Secara geografis, Kabupaten Banggai memiliki 23 kecamatan, 291 desa serta 46 kelurahan.



Jarak dari Kecamatan Kabupaten/Kota ke Ibukota Kabupaten Banggai (km), 2023



1.1 KEADAAN GEOGRAFI

Keadaan geografis adalah kondisi suatu wilayah yang dilihat dari aspek geografis, seperti letak, relief, iklim, cuaca, flora dan fauna. Letak geografis adalah posisi suatu daerah di bumi berdasarkan letak dan bentuknya, serta dibandingkan dengan posisi daerah lain.

Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai Tahun 2023

| Kecamatan | Ibu Kota Wilayah | Luas Wilayah (km2) |
|------------------|------------------|--------------------|
| Toili | Cendana Pura | 762.63 |
| Toili Barat | Sindang Sari | 993.67 |
| Moilong | Toili | 220.32 |
| Batui | Batui | 1062.36 |
| Batui Selatan | Sinorong | 327.97 |
| Bunta | Bunta | 579 |
| Nuhon | Tomeang | 1107 |
| Simpang Raya | Rantau Jaya | 243.69 |
| Kintom | Kintom | 428.78 |
| Luwuk | Luwuk | 72.82 |
| Luwuk Timur | Hunduhon | 216.3 |
| Luwuk Utara | Biak | 246.08 |
| Luwuk Selatan | Simpong | 119.8 |
| Nambo | Lontio | 169.7 |
| Pagimana | Pagimana | 957.34 |
| Bualemo | Bualemo | 862 |
| Lobu | Lobu | 138.44 |
| Lamala | Bonebobakal | 220.66 |
| Masama | Tangeban | 231.64 |
| Mantoh | Sobel | 226 |
| Balantak | Balantak | 196.46 |
| Balantak Selatan | Tongke | 146.5 |
| Balantak Utara | Teku | 143.6 |
| Banggai | Luwuk | 9672.7 |

Percentase Terhadap Luas Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2023

| Kecamatan | Ibu Kota Wilayah | Percentase Terhadap Luas Wilayah |
|------------------|------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Toili | Cendana Pura | 7.88 |
| Toili Barat | Sindang Sari | 10.27 |
| Moilong | Toili | 2.28 |
| Batui | Batui | 10.98 |
| Batui Selatan | Sinorong | 3.39 |
| Bunta | Bunta | 5.99 |
| Nuhon | Tomeang | 11.45 |
| Simpang Raya | Rantau Jaya | 2.52 |
| Kintom | Kintom | 4.43 |
| Luwuk | Luwuk | 0.75 |
| Luwuk Timur | Hunduhon | 2.24 |
| Luwuk Utara | Biak | 2.54 |
| Luwuk Selatan | Simpong | 1.24 |
| Nambo | Lontio | 1.75 |
| Pagimana | Pagimana | 9.9 |
| Bualemo | Bualemo | 8.91 |
| Lobu | Lobu | 1.43 |
| Lamala | Bonebobakal | 2.28 |
| Masama | Tangeban | 2.39 |
| Mantoh | Sobol | 2.34 |
| Balantak | Balantak | 2.03 |
| Balantak Selatan | Tongke | 1.51 |
| Balantak Utara | Teku | 1.48 |
| Banggai | Luwuk | 100 |

Tinggi Wilayah Kabupaten Banggai menurut Kecamatan dan Jarak ke Ibukota kabupaten banggai menurut Kecamatan Tahun 2023

| Kecamatan | Tinggi Wilayah (mdpl) | Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota |
|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Toili | 10 | 92 |
| Toili Barat | 19 | 140 |
| Moilong | 4 | 87 |
| Batui | 10 | 55 |
| Batui Selatan | 21 | 75 |
| Bunta | 11 | 135 |
| Nuhon | 15 | 147 |
| Simpang Raya | 61 | 155 |
| Kintom | 22 | 32 |
| Luwuk | 14 | 0 |
| Luwuk Timur | 14 | 31 |
| Luwuk Utara | 20 | 10 |
| Luwuk Selatan | 17 | 3 |
| Nambo | 25 | 20 |
| Pagimana | 22 | 64 |
| Bualemo | 5 | 121 |
| Lobu | 11 | 86 |
| Lamala | 2 | 74 |
| Masama | 5 | 52 |
| Mantoh | 3 | 93 |
| Balantak | 3 | 133 |
| Balantak Selatan | 14 | 128 |
| Balantak Utara | 1 | 151 |
| Banggai | Luwuk | 0 |

1.2 KEADAAN IKLIM

Iklim merupakan suatu kondisi cuaca pada daerah atau wilayah dalam kurun waktu yang lama dan iklim juga dapat diartikan sebagai cuaca yang dirata-ratakan pada periode tertentu atau dalam jangka waktu yang lama.

Kabupaten Banggai memiliki rata-rata hari hujan 14-18 hari perbulan. Suhu udara maksimum rata-rata 29,6°C – 33,1°C, Sedangkan suhu udara minimum 21,7°C – 24,8°C.

Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara menurut bulan di kabupaten banggai Tahun 2023

| Bulan | Suhu Temperatur | | | Kelembabaan | | |
|-----------|-----------------|-------------------|-------|-------------|-------------------|-------|
| | Min | Rata-rata average | Max | Min | Rata-rata average | Max |
| Januari | 23,80 | 28,20 | 33,30 | 58,00 | 79,40 | 97,00 |
| Februari | 24,30 | 28,40 | 33,40 | 53,00 | 77,90 | 95,00 |
| Maret | 24,00 | 28,20 | 32,90 | 61,00 | 79,40 | 95,00 |
| April | 23,60 | 28,10 | 33,40 | 62,00 | 80,20 | 97,00 |
| Mei | 20,30 | 27,70 | 32,60 | 60,00 | 80,10 | 98,00 |
| Juni | 23,80 | 27,40 | 31,70 | 61,00 | 79,70 | 98,00 |
| Juli | 22,70 | 27,00 | 31,50 | 56,00 | 78,80 | 98,00 |
| Agustus | 22,60 | 26,60 | 31,90 | 56,00 | 75,40 | 98,00 |
| September | 22,10 | 27,00 | 31,80 | 53,00 | 72,70 | 95,00 |
| Oktober | 22,70 | 28,40 | 32,10 | 50,00 | 72,10 | 96,00 |
| November | 25,00 | 29,10 | 33,60 | 60,00 | 76,50 | 96,00 |
| Desember | 23,50 | 29,10 | 34,60 | 55,00 | 78,50 | 95,00 |

Jumlah Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Menurut Bulan di Kabupaten Banggai Tahun 2023

| Bulan | Kecepatan Angin (Knot) | | | Tekanan Udara (mbar) | | |
|-----------|------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------------------|---------|
| | Min | Rata-rata average | Max | Min | Rata-rata average | Max |
| Januari | 0,00 | 4,10 | 14,00 | 1001,10 | 1005,90 | 1012,10 |
| Februari | 0,00 | 4,10 | 17,00 | 1001,90 | 1005,90 | 1010,00 |
| Maret | 0,00 | 4,20 | 15,00 | 1003,10 | 1007,50 | 1011,80 |
| April | 0,00 | 4,60 | 16,00 | 1002,50 | 1006,70 | 1011,60 |
| Mei | 0,00 | 5,70 | 15,00 | 1001,60 | 1008,50 | 1012,80 |
| Juni | 0,00 | 6,00 | 17,00 | 1004,60 | 1008,40 | 1011,90 |
| Juli | 0,00 | 7,20 | 18,00 | 1005,20 | 1009,20 | 1012,30 |
| Agustus | 0,00 | 8,40 | 19,00 | 1006,60 | 1010,40 | 1014,50 |
| September | 0,00 | 8,80 | 17,00 | 1006,20 | 1009,60 | 1013,30 |
| Oktober | 0,00 | 7,60 | 19,00 | 1005,20 | 1009,50 | 1012,60 |
| November | 0,00 | 4,40 | 13,00 | 1002,90 | 1007,40 | 1011,00 |
| Desember | 0,00 | 4,30 | 12,00 | 1002,60 | 1007,20 | 1011,70 |

Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Banggai Tahun 2023

| Bulan | Jumlah Curah Hujan Pertahun (mm/tahun) | Jumlah Hari Hujan (hari) | Penyinaran Matahari (Jam) |
|-----------|--|--------------------------|---------------------------|
| Januari | 0,00 | 4,10 | 14,00 |
| Februari | 0,00 | 4,10 | 17,00 |
| Maret | 0,00 | 4,20 | 15,00 |
| April | 0,00 | 4,60 | 16,00 |
| Mei | 0,00 | 5,70 | 15,00 |
| Juni | 0,00 | 6,00 | 17,00 |
| Juli | 00,0 | 7,20 | 18,00 |
| Agustus | 0,00 | 8,40 | 19,00 |
| September | 0,00 | 8,80 | 17,00 |
| Okttober | 0,00 | 7,60 | 19,00 |
| November | 0,00 | 4,40 | 13,00 |
| Desember | 0,00 | 4,30 | 12,00 |

BAB II

PEMERINTAHAN

Pemerintahan Kabupaten Banggai berada di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Kabupaten Banggai memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari eksekutif dan legislatif, yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang pemerintahan Kabupaten Banggai:

1. Struktur Pemerintahan Kabupaten Banggai
 - Bupati: Kepala daerah yang memimpin Kabupaten Banggai dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bupati dipilih melalui pemilihan umum (Pilkada) dan memegang jabatan selama lima tahun.
 - Wakil Bupati: Mendampingi bupati dan membantu tugas-tugas pemerintahan. Wakil Bupati juga dipilih melalui Pilkada.
 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai: Legislatif di tingkat kabupaten yang memiliki tugas untuk membuat peraturan daerah, mengawasi kinerja eksekutif, serta mewakili suara rakyat.

2. Kabupaten Banggai: Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Banggai terletak di bagian utara Sulawesi Tengah dan memiliki wilayah yang mencakup daratan dan lautan. Ibu kota Kabupaten Banggai adalah Luwuk. Kabupaten Banggai memiliki sejumlah kecamatan yang terbagi atas beberapa desa dan kelurahan.

3. Kecamatan di Kabupaten Banggai

Kabupaten Banggai terdiri dari beberapa kecamatan, di antaranya:

- Kecamatan Luwuk
- Kecamatan Luwuk Timur
- Kecamatan Batui

- Kecamatan Toili
- Kecamatan Kintom
- Dan lainnya

4. Pemerintahan Desa

Di tingkat yang lebih bawah, pemerintahan di desa atau kelurahan dipimpin oleh Kepala Desa (Kades) yang juga dipilih oleh warga setempat. Kepala desa memiliki kewajiban untuk mengelola administrasi desa serta memberikan pelayanan publik.

5. Fokus Pembangunan

Pemerintahan Kabupaten Banggai memiliki fokus dalam beberapa sektor pembangunan, antara lain:

- Pembangunan Infrastruktur: Peningkatan akses jalan, jembatan, serta infrastruktur dasar lainnya.
- Pendidikan dan Kesehatan: Meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat.
- Pemberdayaan Ekonomi: Fokus pada sektor pertanian, perikanan, serta pariwisata sebagai sektor unggulan di daerah tersebut.

6. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banggai

Visi dan misi pemerintah Kabupaten Banggai biasanya mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan pelayanan publik. Setiap periode kepemimpinan bupati biasanya memiliki prioritas dan program yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat.

Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut tentang kebijakan atau program spesifik dari pemerintahan Kabupaten Banggai, Anda bisa merujuk ke situs web

resmi pemerintah kabupaten atau menghubungi instansi terkait di daerah tersebut.

Tabel Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai

| No | Nama Perangkat Daerah |
|----|--|
| 1. | Sekretariat Daerah |
| | -Bagian Pemerintahan |
| | -Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | -Bagian Hukum |
| | -Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | -Bagian Administrasi Pembangunan |
| | -Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| | -Bagian Umum |
| | -Bagian Organisasi |
| | -Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 2 | Sekretariat DPRD |
| 3 | Inspektorat |
| 4 | Dinas Pendidikan |
| 5 | Dinas Kesehatan |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 7 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 8 | Dinas Sosial |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 12 | Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. |
| 13 | Dinas Perhubungan |
| 14 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 15 | Dinas Perikanan |
| 16 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 17 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

| | |
|----|---|
| 18 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| 19 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 20 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 21 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan |
| 22 | Dinas Koperasi dan UKM |
| 23 | Dinsa Pemuda dan Olahraga |
| 24 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 25 | Dinas Peternakan dan Hewan |
| 26 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 27 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 28 | Badan Kepegawaian dan Pembangunan SDM |
| 29 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 31 | Badan Pendapatan Daerah |
| 32 | Badan Kesbang dan Politik |
| 33 | Badan Rumah Sakit Daerah |
| 34 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 35 | Satuan Pemadam Kebakaran |

2.2 Sekretariat DPRD

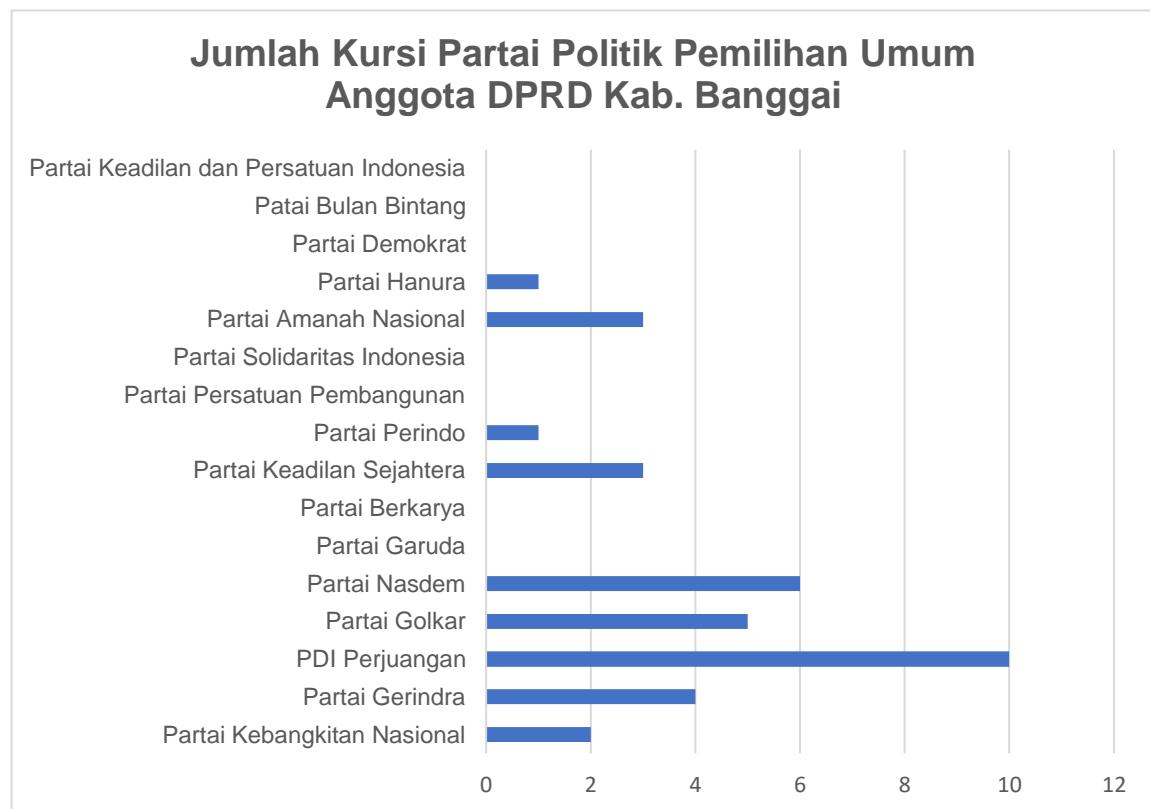
Pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 2.2.1 Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPRD Berdasarkan Fraksi di DPRD Kabupaten Banggai

| No | Partai Politik | Jumlah Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPRD |
|----|---|---|
| 1 | Partai Kebangkitan Nasional | 2 |
| 2 | Partai Gerindra | 4 |
| 3 | PDI Perjuangan | 10 |
| 4 | Partai Golkar | 5 |
| 5 | Partai Nasdem | 6 |
| 6 | Partai Garuda | 0 |
| 7 | Partai Berkarya | 0 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 3 |
| 9 | Partai Perindo | 1 |
| 10 | Partai Persatuan Pembangunan | 0 |
| 11 | Partai Solidaritas Indonesia | 0 |
| 12 | Partai Amanah Nasional | 3 |
| 13 | Partai Hanura | 1 |
| 14 | Partai Demokrat | 0 |
| 15 | Partai Bulan Bintang | 0 |
| 16 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 |
| | Total | 35 |

Sumber : Sekretariat DPRD, 2023

Grafik 2.2.1 Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Banggai Banggai



Sumber : Sekretariat DPRD, 2023

2.3 Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banggai adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola berbagai aspek terkait manajemen sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai. Fungsi utama instansi ini adalah memastikan pengelolaan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang profesional, transparan, dan akuntabel untuk mendukung visi misi pembangunan daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Banggai

1. Manajemen Kepegawaian:

- Pengangkatan, mutasi, promosi, dan pemberhentian ASN.
- Pengelolaan data dan dokumen kepegawaian.
- Pelaksanaan penilaian kinerja ASN.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia:

- Penyelenggaraan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi ASN.
- Pembinaan karier ASN untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai.
- Fasilitasi pengembangan kepemimpinan ASN.

3. Kesejahteraan dan Disiplin ASN:

- Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terkait hak-hak ASN, seperti gaji, tunjangan, dan pensiun.
- Penerapan aturan disiplin untuk menjaga etika dan integritas ASN.

4. Perencanaan dan Pengawasan:

- Penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai daerah.
- Evaluasi dan pelaporan kinerja organisasi di bidang kepegawaian.

5. Digitalisasi Administrasi Kepegawaian:
 - Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).
 - Implementasi e-Government untuk mempermudah layanan kepegawaian berbasis digital.

Program dan Inisiatif Unggulan BKPSDM Kabupaten Banggai

- Pendidikan dan Pelatihan (Diklat): Program pengembangan SDM melalui pelatihan teknis, fungsional, dan manajerial bagi ASN di semua level.
- Layanan Kepegawaian Digital: Inovasi layanan berbasis teknologi, seperti e-kinerja, e-absensi, dan platform layanan lainnya untuk efisiensi manajemen ASN.
- Peningkatan Kualitas Layanan Publik: Memberikan pelatihan khusus untuk ASN yang berinteraksi langsung dengan masyarakat guna meningkatkan mutu pelayanan publik.
- Penerapan Sistem Merit: Mendukung penempatan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi.

Tabel 2.3.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Banggai

| NO | Jumlah Aparat Sipil Negara | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Aparatur Sipil Negara | 7151 | 7257 | 7315 |

Sumber : BKPSDM, 2023

Grafik 2.3.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Banggai



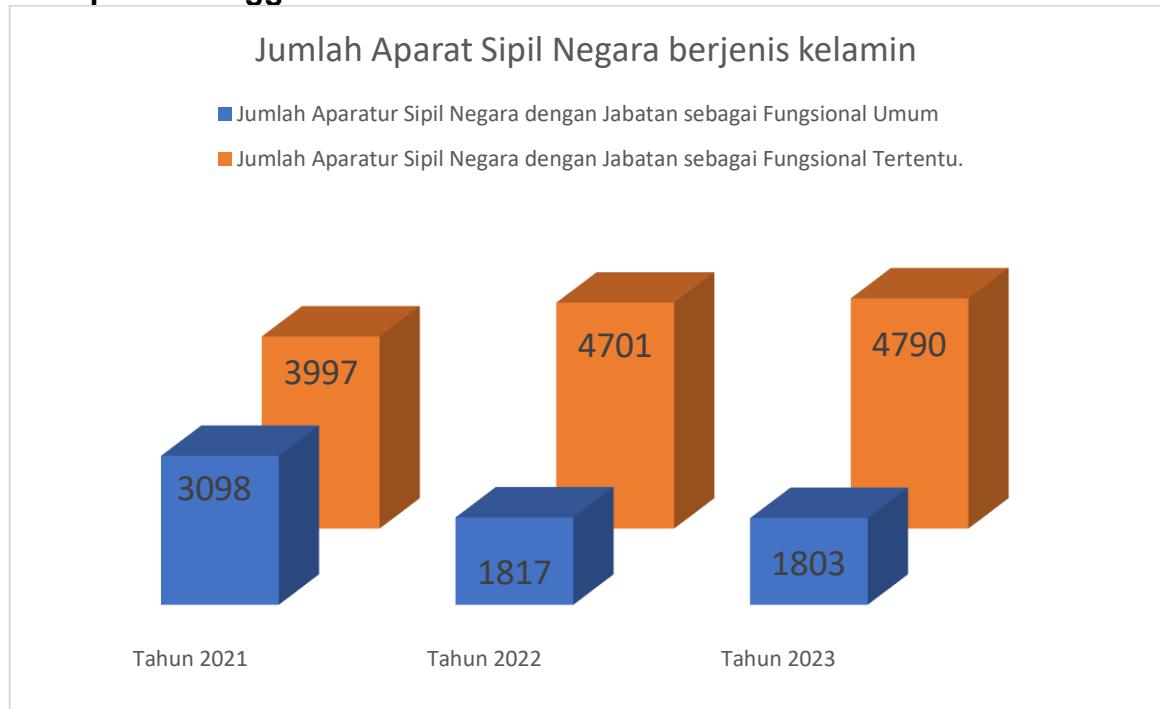
Sumber : BKPSDM, 2023

Tabel 2.3.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Banggai

| No | Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|----|--|------------|------------|------------|
| 1 | Jumlah ASN berjenis Kelamin Laki-laki | 3227 | 3110 | 3096 |
| 2 | Jumlah ASN berjenis Kelamin Laki-laki | 3924 | 4147 | 4219 |

Sumber : BKPSDM, 2023

Grafik 2.3.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Banggai

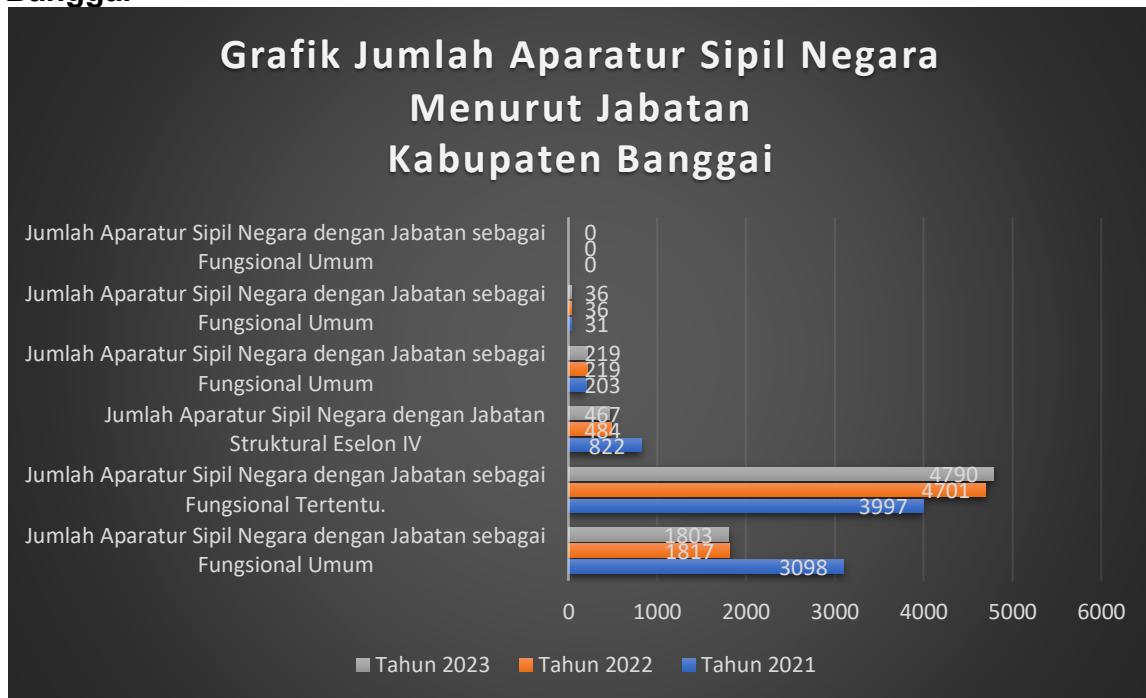


Tabel 2.3.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan Kabupaten Banggai

| No | Jumlah Aparatus Sipil Negara Menurut Jabatan | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|--------|--|------------|------------|------------|
| 1 | Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan sebagai Fungsional Umum | 3098 | 1817 | 1803 |
| 2 | Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan sebagai Fungsional Tertentu. | 3997 | 4701 | 4790 |
| 3 | Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan Struktural Eselon IV | 822 | 484 | 467 |
| 4 | Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan sebagai Fungsional Umum | 203 | 219 | 219 |
| 5 | Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan sebagai Fungsional Umum | 31 | 36 | 36 |
| Jumlah | | 8151 | 7257 | 7315 |

Sumber : BKPSDM, 2023

Grafik 2.3.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan Kabupaten Banggai



Sumber : BKPSDM, 2023

Tabel 2.3.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Banggai

| No | Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Ket |
|----|---|------------|------------|------------|-------|
| 1 | Jumlah Aparatur Sipil Negara berpendidikan terakhir SD/MI/Sederajat | 15 | 9 | 9 | Orang |
| 2 | Jumlah Aparatur Sipil Negara berpendidikan terakhir SMP/MTs/Sederajat | 38 | 26 | 29 | Orang |

| | | | | | |
|---|--|------|------|------|-------|
| 3 | Jumlah Aparatur Sipil Negara berpendidikan terakhir SMA/SMK/MA/Sederajat | 1437 | 1247 | 1223 | Orang |
| 4 | Jumlah Aparatur Sipil Negara berpendidikan terakhir D.III | 1058 | 984 | 1020 | Orang |
| 5 | Jumlah Aparatur Sipil Negara berpendidikan terakhir Strata - 1/D.IV | 4332 | 4719 | 4732 | Orang |
| 6 | Jumlah Aparatur Sipil Negara berpendidikan terakhir Strata -2 | 277 | 267 | 296 | Orang |
| 7 | Jumlah Aparatur Sipil Negara berpendidikan terakhir Strata -3 | 5 | 5 | 6 | Orang |

Sumber : BKPSDM, 2023

Tabel 2.3.5 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Kepangkatan Kabupaten Banggai

| No | Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Kepangkatan | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Ket |
|----|---|------------|------------|------------|-------|
| 1 | Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Juru Muda | 5 | 5 | 5 | Orang |
| 2 | Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Juru Muda Tingkat I | 3 | 3 | 2 | Orang |
| 3 | Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Juru | 16 | 12 | 13 | Orang |
| 4 | Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Juru Tingkat I | 16 | 12 | 6 | Orang |
| 5 | Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Pengatur Muda | 4332 | 4719 | 4732 | Orang |
| 6 | Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Pengatur Muda Tingkat I | 292 | 218 | 162 | Orang |
| 7 | Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Pengatur | 344 | 243 | 273 | Orang |
| 8 | Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Pengatur Tingkat I | 578 | 578 | 505 | Orang |

| | | | | | |
|----|---|------|------|------|-------|
| 9 | Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Penata Muda | 833 | 709 | 735 | Orang |
| 10 | Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Penata Muda Tingkat I | 1022 | 1041 | 956 | Orang |
| 11 | Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Penata | 1064 | 1054 | 1095 | Orang |
| 12 | Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Penata Tingkat I | 1090 | 1232 | 1280 | Orang |
| 13 | Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Pembina | 974 | 882 | 867 | Orang |
| 14 | Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Pembina Tingkat I | 702 | 717 | 725 | Orang |
| 15 | Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Pembina Utama Muda | 52 | 54 | 61 | Orang |
| 16 | Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Tingkat Kepangkatan Pembina Utama Muda | 2 | 4 | 4 | Orang |
| 17 | Jumlah Aparat Sipil Negara Golongan VII (PPPK) | - | 34 | 34 | Orang |
| 18 | Jumlah Aparat Sipil Negara Golongan IX (PPPK) | - | 425 | 106 | Orang |
| 19 | Jumlah Aparat Sipil Negara Golongan X (PPPK) | - | - | 17 | Orang |

Sumber : BKPSDM, 2023

2.4 Kesatuan Bangsa dan Politik

Syarifudin Muid, SH selaku Kepala Kesbangpol Kabupaten Banggai dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peran Kesbangpol dalam melakukan pendataan dan pengawasan terhadap keberadaan Ormas dan Media di wilayah tersebut.

Menurut beberapa Oknum telah menyalagunakan Lembaga mereka dengan dalih melakukan intimidasi, sehingga Langkah penertiban harus segera dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Langkah-langkah kami ambil adalah menertibkan baik LSM meupun Media yang ada. Hal ini harus segera dilakukan untuk mengantisipasi penyalagunaan wewenang oleh oknum-oknum tersebut.

Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari. Menurutnya kegiatan seperti ini merupakan rutinitas yang harus terus dilakukan oleh Kesbangpol kabupaten Banggai.

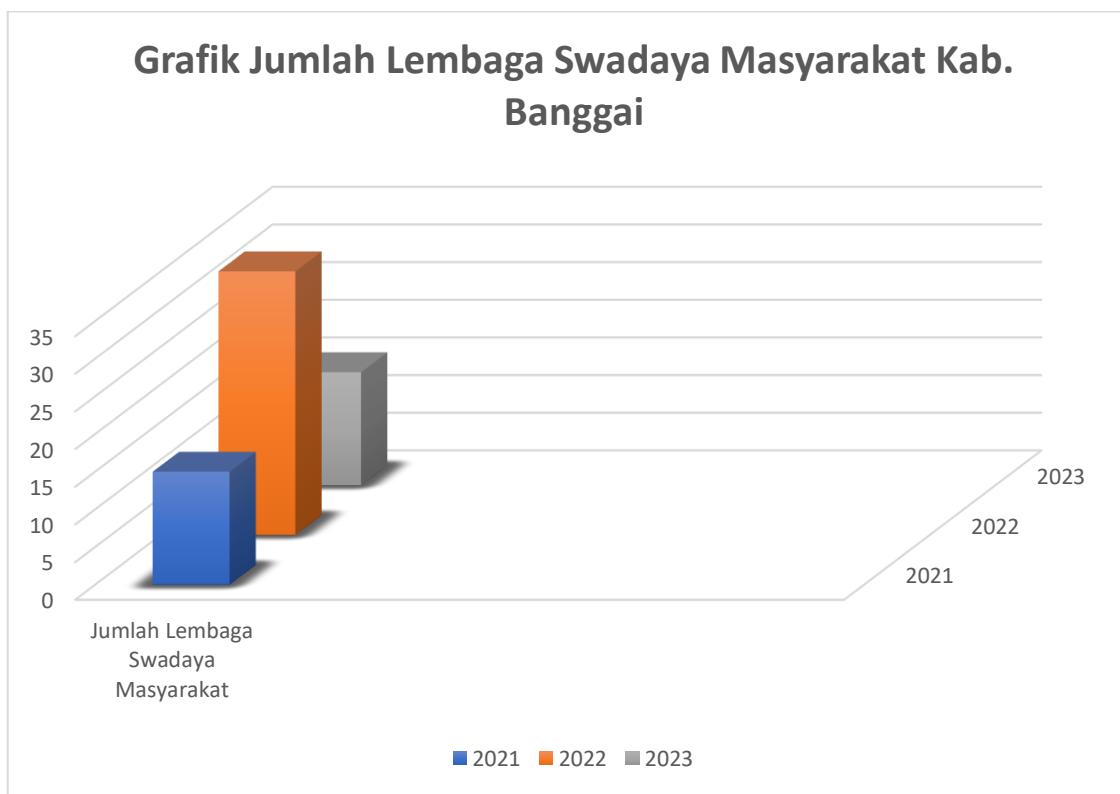
Kesbangpol diharapkan dapat terus menjadi fasilitatot dalam menjebatani komunikasi dan koordinasi antara pemerintahan daerah dengan LSM dan Media. Kami akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan LSM dan media dikabupaten banggai kami ingin memastikan bahwa semua pihak menjalankan perannya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada

Tabel 2.4.1 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Banggai

| NO | Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Ket |
|----|--|------------|------------|------------|-----|
| 1 | Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Kab. Banggai | 15 | 35 | 15 | LSM |

Sumber : BKPSDM, 2023

Grafik 2.4.2 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Banggai



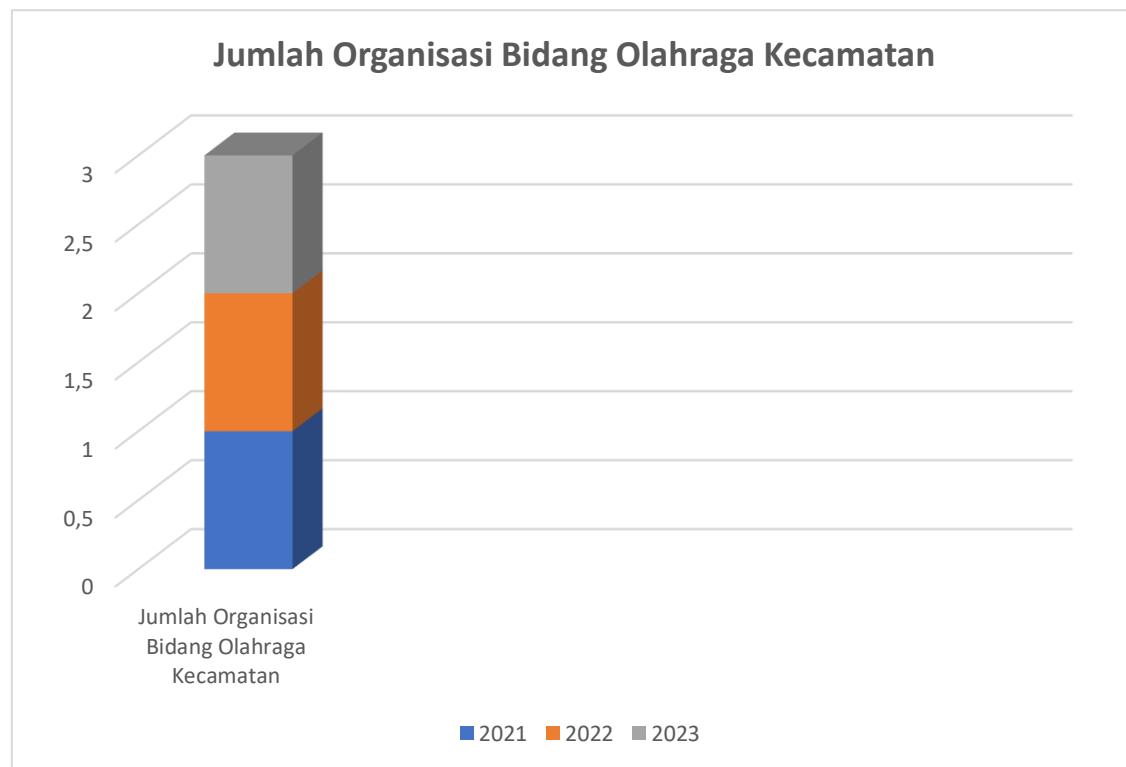
Sumber : BKPSDM, 2023

Tabel 2.4.3 Jumlah Organisasi Bidang Olahraga Kecamatan di Kabupaten Banggai.

| NO | Jumlah Organisasi Bidang Olahraga Kecamatan | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Ket |
|----|--|------------|------------|------------|----------|
| 1 | Jumlah Organisasi Bidang Olahraga Kecamatan Kab. Banggai | 1 | 1 | 1 | Kelompok |

Sumber : BKPSDM, 2023

Grafik 2.4.4 Jumlah Organisasi Bidang Olahraga Kecamatan di Kabupaten Banggai



Sumber : BKPSDM, 2023

2.5 Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai dalam awal sejarahnya dimulaidengan berdirinya Kantor Catatan Sipil pada tahun 1983 sesuai dengan Keputusan MenteriDalam Negeri nomor 54 tahun 1983 yang kemudian setelah bergulirnya waktu serta tuntutan beban kerja, maka pada tahun 1998 dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 150 tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II, Kantor Catatan Sipil berubah bentuk menjadi sebuah dinas yang dinamakan Dinas Pendaftaran Penduduk.

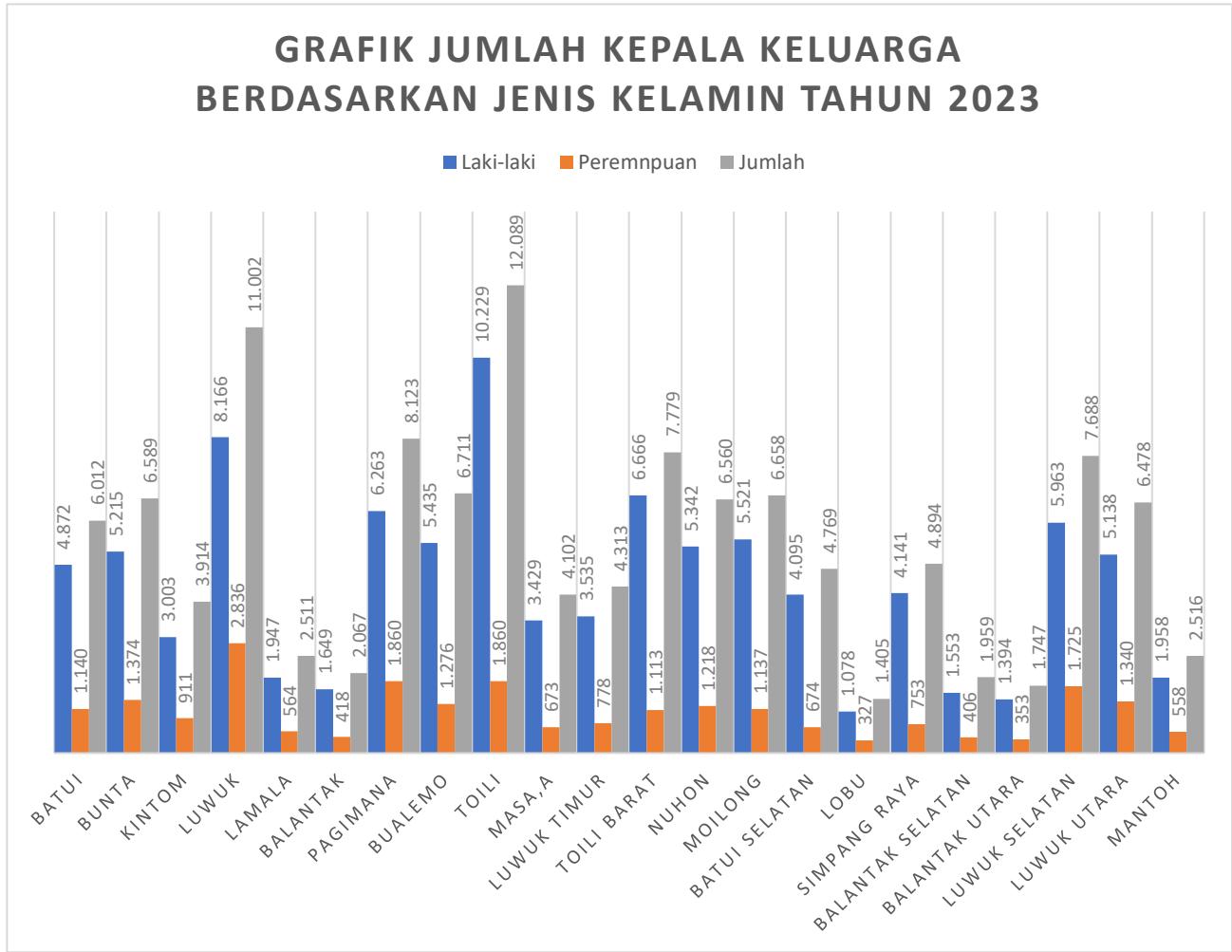
Ditahun 2001 sampai dengan 2005 karena berlakunya otonomi daerah maka Dinas Pendaftaran Penduduk berubah namanya kembali menjadi Dinas Kependudukan dan ditahun 2005 sampai dengan 2007 atas berubahnya atas berubahnya peraturan tentang organisasi dan perangkat daerah maka Dinas Kependudukan berubah menjadi sebuah badan yang dinamakan Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana namun karena terdapat pemisahan antara administrasi kependudukan dan administrasi keluarga berencana dan urusan wanita yang menjadi sebuah organisasi pemerintah mandiri sehingga pada tahun 2007 sampai dengan saat ini Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dirubah bentuknya menjadi sebuah Dinas yang dinamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai.

Tabel 2.5.1 Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

| NO | Kode Wilayah | Kecamatan | Kepala Keluarga | | |
|----|--------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | 720101 | Batui | 4.872 | 1.140 | 6.012 |
| 2 | 720102 | Bunta | 5.215 | 1.374 | 6.589 |
| 3 | 720103 | Kintom | 3.003 | 911 | 3.914 |
| 4 | 720104 | Luwuk | 8.166 | 2.836 | 11.002 |
| 5 | 720105 | Lamala | 1.947 | 564 | 2.511 |
| 6 | 720106 | Balantak | 1.649 | 418 | 2.067 |
| 7 | 720107 | Pagimana | 6.263 | 1.860 | 8.123 |
| 8 | 720108 | Bualemo | 5.435 | 1.276 | 6.711 |
| 9 | 720109 | Toili | 10.229 | 1.860 | 12.089 |
| 10 | 720110 | Masa,a | 3.429 | 673 | 4.102 |
| 11 | 720111 | Luwuk Timur | 3.535 | 778 | 4.313 |
| 12 | 720112 | Toili Barat | 6.666 | 1.113 | 7.779 |
| 13 | 720113 | Nuhon | 5.342 | 1.218 | 6.560 |
| 14 | 720114 | Moilong | 5.521 | 1.137 | 6.658 |
| 15 | 720115 | Batui Selatan | 4.095 | 674 | 4.769 |
| 16 | 720116 | Lobu | 1.078 | 327 | 1.405 |
| 17 | 720117 | Simpang Raya | 4.141 | 753 | 4.894 |
| 18 | 720118 | Balantak Selatan | 1.553 | 406 | 1.959 |
| 19 | 720119 | Balantak Utara | 1.394 | 353 | 1.747 |
| 20 | 720120 | Luwuk Selatan | 5.963 | 1.725 | 7.688 |
| 21 | 720121 | Luwuk Utara | 5.138 | 1.340 | 6.478 |
| 22 | 720122 | Mantoh | 1.958 | 558 | 2.516 |
| 23 | 720123 | Nambo | 2.294 | 774 | 3.068 |
| | | Total | 98.886 | 24.068 | 122.954 |

Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Grafik 2.5.2 Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023



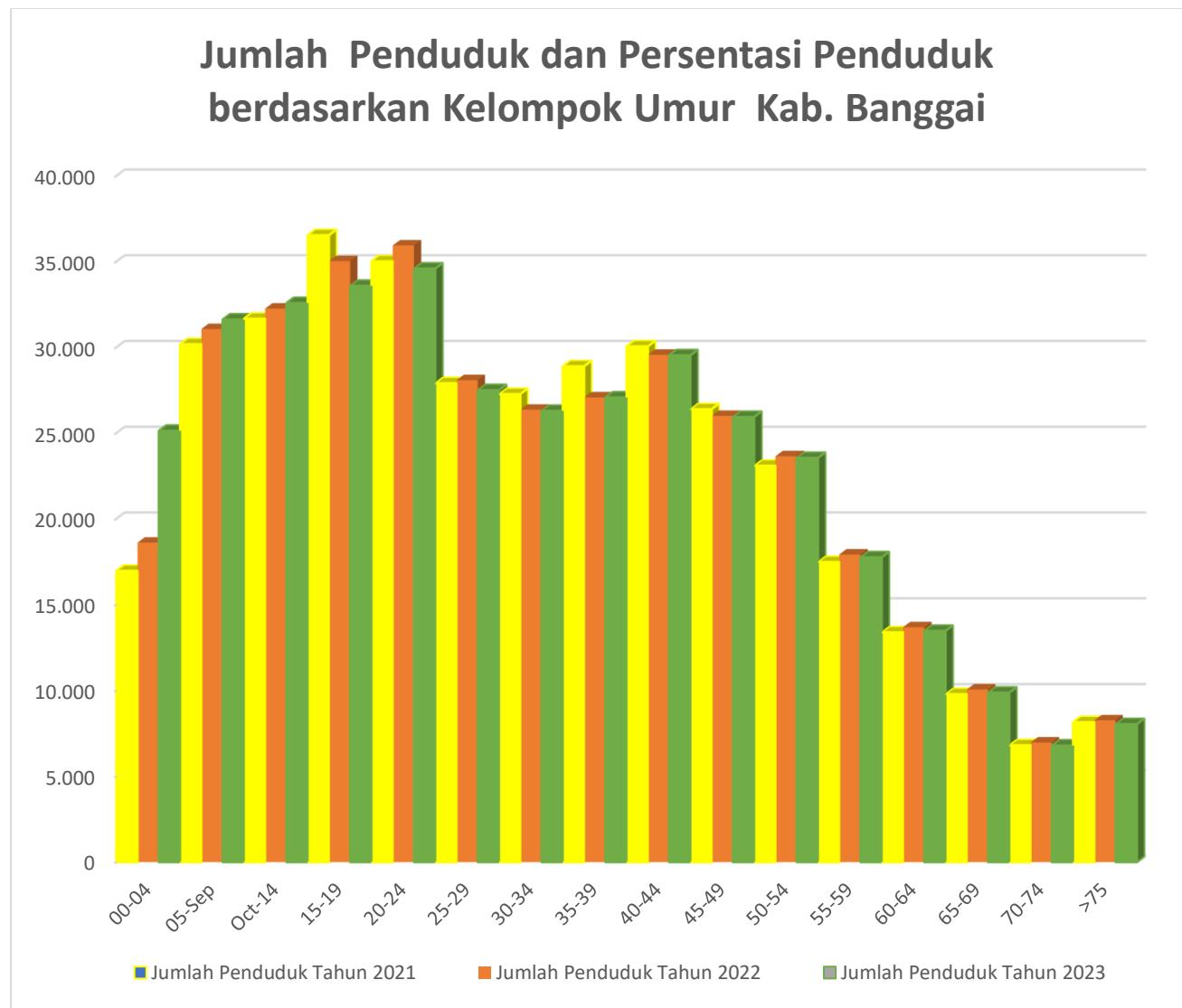
Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Tabel 2.5.3 Jumlah Penduduk dan Persentasi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Kab. Banggai

| No | Kelompok Umur | Jumlah Penduduk Tahun 2021 | Jumlah Penduduk Tahun 2022 | Jumlah Penduduk Tahun 2023 |
|----|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 00-04 | 16.963 | 18.610 | 25.131 |
| 2 | 05-09 | 30.184 | 31.067 | 31.622 |
| 3 | 10-14 | 31.668 | 32.259 | 32.583 |
| 4 | 15-19 | 36.540 | 35.027 | 33.589 |
| 5 | 20-24 | 35.019 | 35.943 | 34.592 |
| 6 | 25-29 | 27.908 | 28.083 | 27.505 |
| 7 | 30-34 | 27.272 | 26.362 | 26.294 |
| 8 | 35-39 | 28.892 | 27.079 | 27.072 |
| 9 | 40-44 | 30.057 | 29.565 | 29.533 |
| 10 | 45-49 | 26.391 | 26.001 | 25.938 |
| 11 | 50-54 | 23.093 | 23.643 | 23.549 |
| 12 | 55-59 | 17.480 | 17.918 | 17.756 |
| 13 | 60-64 | 13.384 | 13.681 | 13.471 |
| 14 | 65-69 | 9.787 | 10.054 | 9.871 |
| 15 | 70-74 | 6.810 | 6.967 | 6.793 |
| 16 | >75 | 8.155 | 8.259 | 8.037 |
| | Jumlah | 369.603 | 370.518 | 373.336 |

Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Grafik 2.5.4 Jumlah Penduduk dan Persentasi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Kab. Banggai



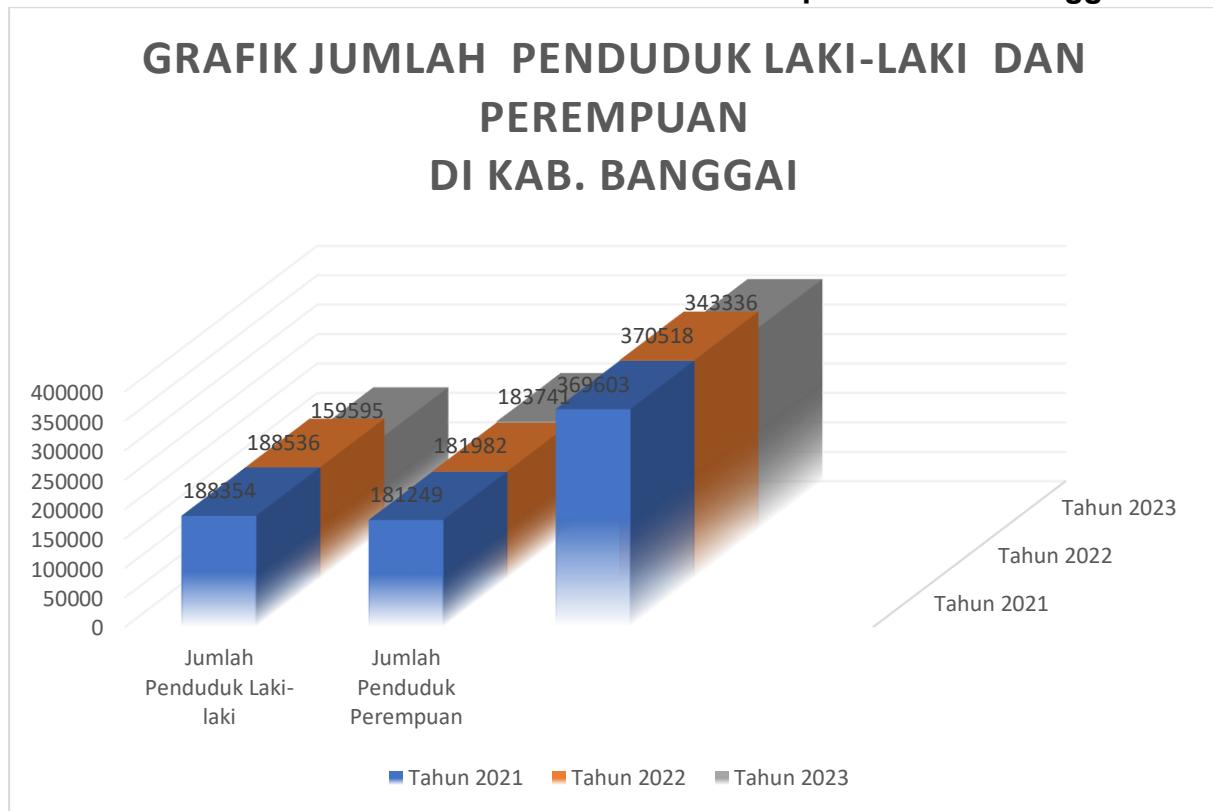
Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Tabel 2.5.5 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kab. Banggai

| No | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk Laki-laki & Perempuan Tahun 2021 | Jumlah Penduduk Laki-laki & Perempuan Tahun 2022 | Jumlah Penduduk Laki-laki & Perempuan Tahun 2022 |
|----|---------------------------|--|--|--|
| 1 | Jumlah Penduduk Laki-laki | 188354 | 188536 | 189595 |
| 2 | Jumlah Penduduk Perempuan | 181249 | 181982 | 183741 |
| | Jumlah | 369602 | 370518 | 373336 |

Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Grafik 2.5.6 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kab. Banggai



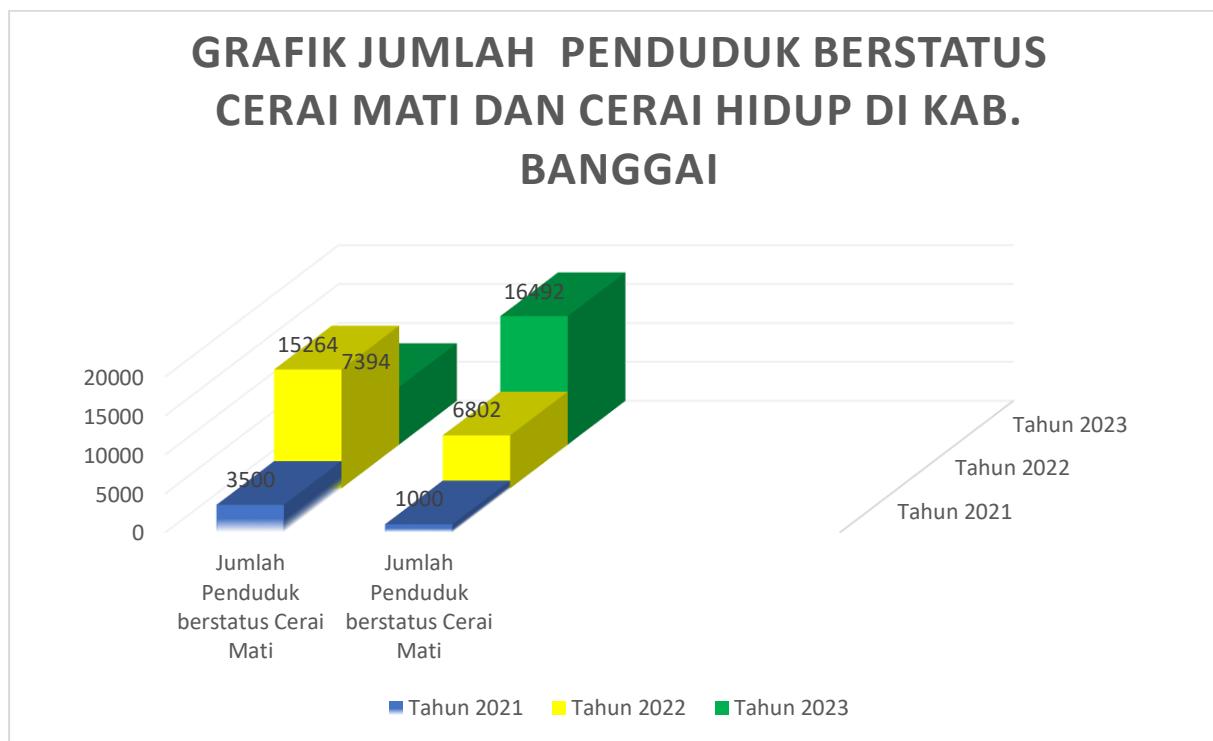
Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Tabel 2.5.7 Jumlah Penduduk berstatus Cerai Mati dan Cerai Hidup di Kab. Banggai

| No | Jumlah Penduduk Berstatus | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|----|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | Jumlah Penduduk berstatus Cerai Mati | 3500 | 15264 | 7394 |
| 2 | Jumlah Penduduk berstatus Cerai Mati | 1000 | 6802 | 16492 |
| | Jumlah | | | |

Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Grafik 2.5.8 Jumlah Penduduk berstatus Cerai Mati dan Cerai Hidup di Kab. Banggai



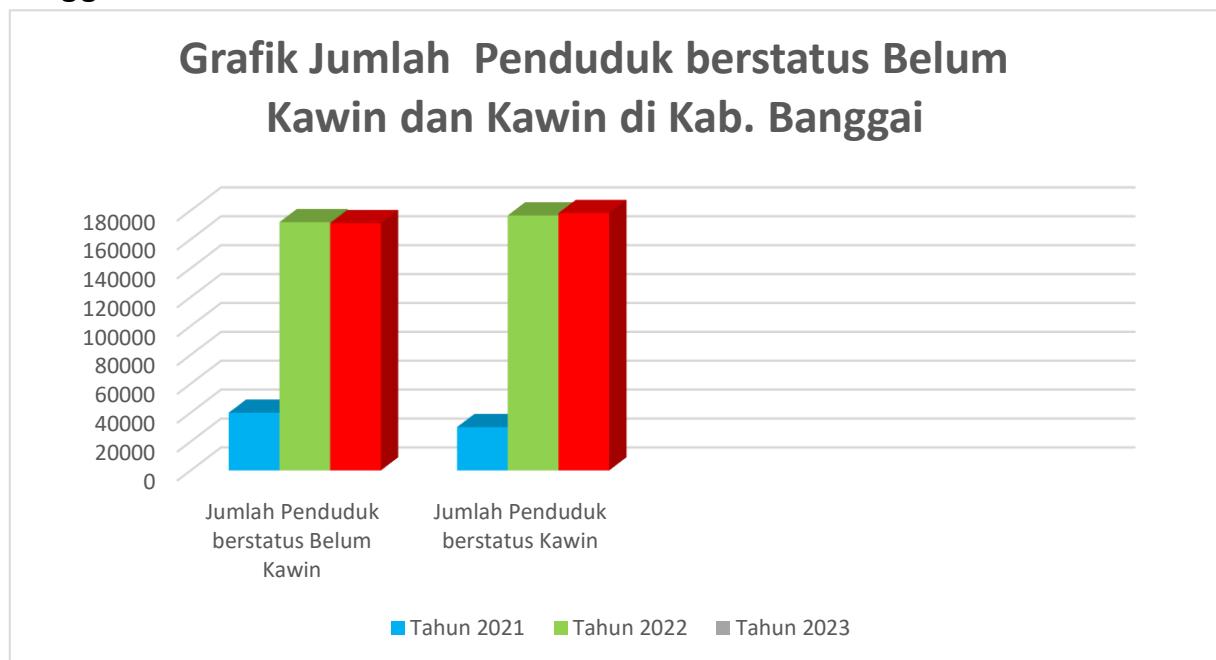
Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Tabel 2.5.9 Jumlah Penduduk berstatus Belum Kawin dan Kawin di Kab. Banggai

| No | Jumlah Penduduk Berstatus | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|----|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | Jumlah Penduduk berstatus Belum Kawin | 40000 | 171890 | 171223 |
| 2 | Jumlah Penduduk berstatus Kawin | 30000 | 176562 | 178224 |
| | Jumlah | 70000 | 348452 | 349447 |

Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Grafik 2.5.10 Jumlah Penduduk berstatus Belum Kawin dan Kawin di Kab. Banggai



Sumber : Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

2.6 Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banggai adalah salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola berbagai aspek terkait komunikasi publik, teknologi informasi, statistik, serta persandian. Dinas ini berfungsi untuk mendukung efektivitas pemerintahan daerah, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang baik dan tepat guna.

Tugas dan Fungsi Dinas Kominfostandi Kabupaten Banggai

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Banggai memiliki beberapa tugas dan fungsi utama yang berkaitan dengan pengelolaan komunikasi publik, statistik, informasi, serta keamanan data dan informasi. Berikut adalah tugas dan fungsi utama dari dinas ini:

1. Bidang Komunikasi Publik

Dinas ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Banggai dapat diterima dengan jelas dan tepat oleh masyarakat. Beberapa tugas dalam bidang komunikasi publik antara lain:

- Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik: Dinas Kominfostandi bertugas untuk memastikan bahwa informasi terkait kebijakan pemerintah, program pembangunan, dan kegiatan pemerintahan disebarluaskan kepada masyarakat secara transparan. Hal ini untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak informasi yang layak sesuai dengan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik.

- Penyebarluasan Informasi: Melalui berbagai saluran komunikasi seperti media massa (television, radio, surat kabar), media sosial, dan situs web resmi pemerintah daerah, Dinas Kominfostandi menyebarkan informasi penting kepada publik.
 - Pengelolaan Media Sosial Pemerintah: Dinas ini mengelola akun-akun media sosial resmi milik Pemerintah Kabupaten Banggai, yang digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan menyampaikan informasi terkini.
 - Penyelenggaraan Kegiatan Komunikasi Sosial: Meningkatkan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan komunikasi sosial, seperti seminar, sosialisasi kebijakan pemerintah, dan pelatihan komunikasi publik.
2. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi administrasi pemerintahan. Beberapa tugas di bidang ini antara lain:
- Pengembangan Infrastruktur TIK: Dinas Kominfostandi berperan dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK di Kabupaten Banggai, termasuk jaringan internet, pusat data, dan sistem informasi pemerintahan.
 - Sistem Informasi Pemerintahan: Dinas ini bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Banggai untuk mempercepat proses pelayanan publik dan meningkatkan transparansi pemerintahan.

- E-Government: Implementasi teknologi dalam pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan, seperti pengajuan izin, pembayaran pajak, dan lain-lain.
 - Pelatihan Teknologi Informasi: Dinas ini juga melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan aparatur pemerintah Kabupaten Banggai dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik.
3. Bidang Statistik

Bidang statistik bertugas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data statistik yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Beberapa tugas di bidang statistik antara lain:

- Pengumpulan dan Penyajian Data Statistik: Dinas ini mengumpulkan data dari berbagai sektor, seperti sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan di Kabupaten Banggai.
- Survei dan Penelitian: Melakukan survei atau penelitian untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Banggai.
- Penyusunan Indikator Pembangunan Daerah: Menyusun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan di Kabupaten Banggai, yang dapat digunakan untuk evaluasi kebijakan pemerintah.

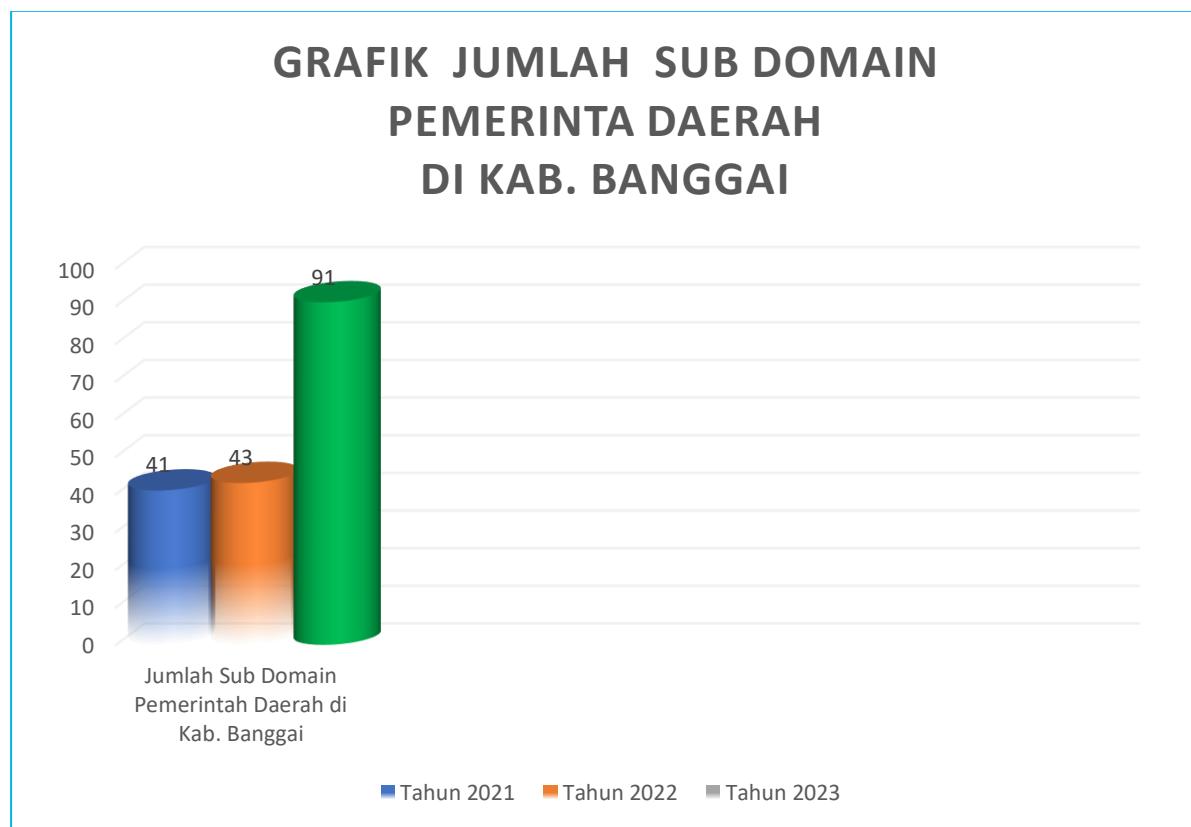
- Sosialisasi Penggunaan Data Statistik: Mengedukasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mengenai pentingnya data statistik dalam perencanaan dan pembangunan daerah.
4. Bidang Persandian
- Bidang persandian bertugas untuk mengelola dan menjaga keamanan informasi yang bersifat rahasia dan penting bagi pemerintahan Kabupaten Banggai. Beberapa tugas dalam bidang ini antara lain:
- Pengamanan Informasi Elektronik: Dinas Kominfo standi memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah aman dari ancaman peretasan atau kebocoran data.
 - Penyandian dan Dekripsi: Melakukan penyandian informasi yang bersifat rahasia dan penting agar tidak bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Begitu juga dengan kegiatan dekripsi informasi yang telah disandikan.
 - Pelatihan Keamanan Informasi: Memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah mengenai cara mengamankan data dan informasi, serta cara-cara menghadapi ancaman dunia maya (cybersecurity).
 - Penyusunan Kebijakan Keamanan Informasi: Mengembangkan dan menyusun kebijakan serta prosedur mengenai persandian dan pengamanan informasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banggai

Tabel 2.6.1 Jumlah Sub Domain Pemerinta Daerah Bidang E-Gov di Kab. Banggai

| No | Jumlah Sub Domain Pemerintah Daerah di Kab. Banggai | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|----|---|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah Sub Domain Pemerintah Daerah di Kab. Banggai | 41 | 43 | 91 |
| | | | | |

Sumber : DKISP, 2023

Grafik 2.6.2 Jumlah Sub Domain Pemerinta Daerah Bidang E-Gov di Kab. Banggai



Sumber : DKISP, 2023

Tabel 2.6.3 Jumlah Konten Bidang PIP DKISP di Kab. Banggai

| No | Tabel Jumlah Konten Bidang PIP DKISP di Kab. Banggai | Tahun 2023 |
|----|---|------------|
| 1. | Jumlah Konten Digital Pemerintah Daerah di Kab. Banggai | 3000 |
| 2. | Jumlah Konten Teks (Penulis Berita) Pemerintah Daerah di Kab. Banggai | 100 |
| 3. | Jumlah Konten Grafis (Karya Visual) Pemerintah Daerah di Kab. Banggai | 100 |
| 4. | Jumlah Konten Audio Video Pemerintah Daerah di Kab. Banggai | 300 |
| 5. | Jumlah Konten Audio Pemerintah Daerah di Kab. Banggai | 100 |

Sumber : DKISP, 2023

Grafik 2.6.4 Jumlah Konten Bidang PIP DKISP di Kab. Banggai



Sumber : DKISP, 2023

Tabel 2.6.5 Jumlah Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Bidang Persandian DKISP di Kab. Banggai

| No | Jumlah Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Bidang PIP DKISP di Kab. Banggai | Tahun 2023 |
|--------|---|------------|
| 1. | Jumlah Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Bidang PIP DKISP di Kab. Banggai | 22 |
| Jumlah | | |

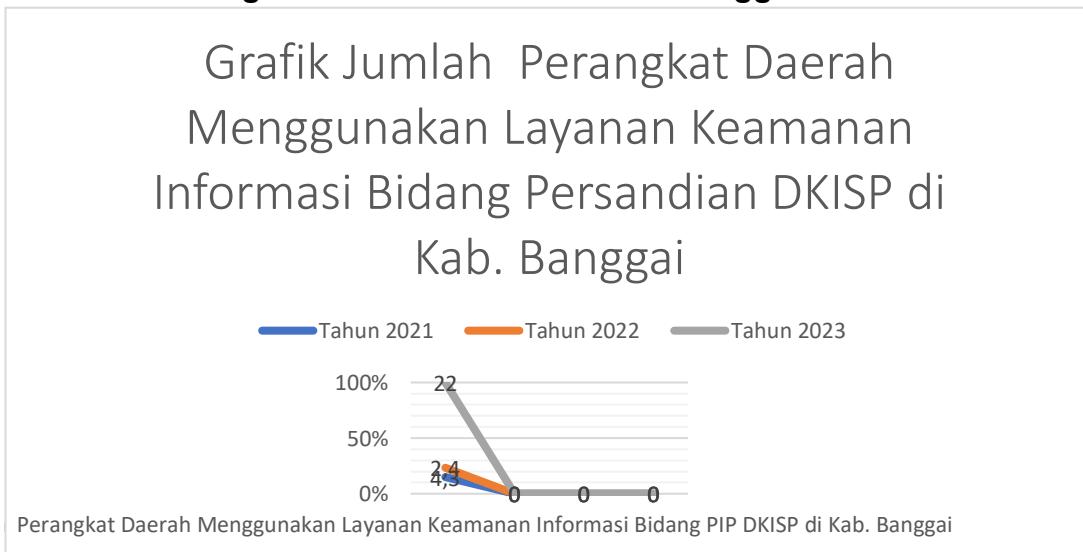
Sumber : DKISP, 2023

Tabel 2.6.6 Jumlah Tower (Bidang TIK) di Kab. Banggai

| No | Jumlah Tower Kab. Banggai | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|--------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah Tower Kab. Banggai | 101 | 122 | 198 |
| Jumlah | | | | |

Sumber : DKISP, 2023

Grafik 2.6.7 Jumlah Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Bidang Persandian DKISP di Kab. Banggai



Sumber : DKISP, 2023

Grafik 2.6.8 Jumlah Tower (Bidang TIK) di Kab. Banggai



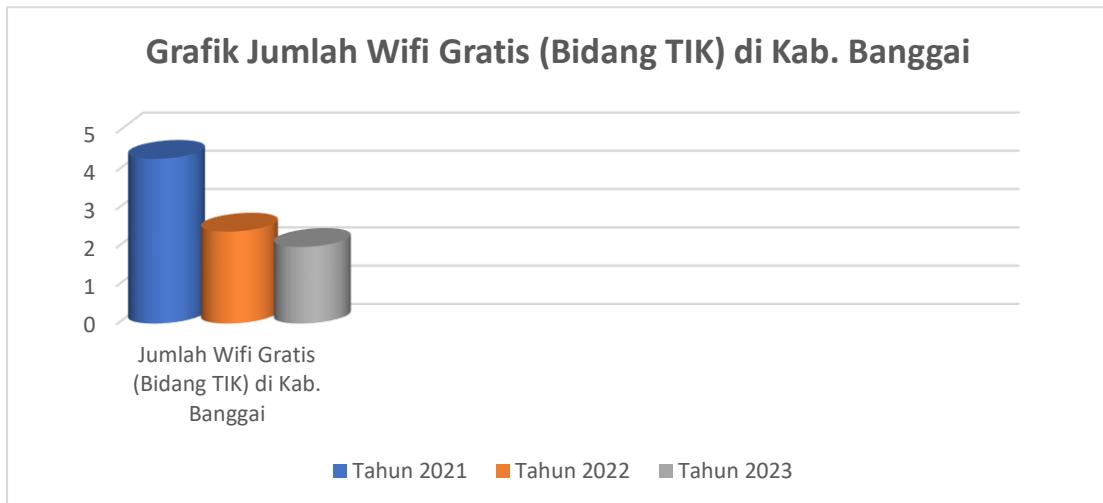
Sumber : DKISP, 2023

Tabel 2.6.9 Jumlah Wifi Gratis (Bidang TIK) di Kab. Banggai

| No | Jumlah Wifi Gratis Kab. Banggai | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|----|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah Wifi Gratis Kab. Banggai | | 10 | 19 |
| | Jumlah | | | |

Sumber : DKISP, 2023

Grafik 2.6.10 Jumlah Wifi Gratis (Bidang TIK) di Kab. Banggai



Sumber : DKISP, 2023

Tabel 2.6.9 Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi Metadata (Bidang Statistik) di Kab. Banggai

| No | Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi Metadata (Bidang Statistik) di Kab. Banggai | Tahun 2023 |
|----|--|------------|
| 1. | Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi Metadata (Bidang Statistik) di Kab. Banggai | 2 |
| | Jumlah | 2 |

Sumber : DKISP, 2023

2.7 Inspektorat Daerah

Inspektorat Kabupaten Banggai adalah lembaga pengawasan internal pemerintah di tingkat Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Tugas utama Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan di daerah tersebut, guna memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat juga memiliki fungsi untuk melaksanakan audit, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap keuangan serta kinerja aparatur pemerintah daerah, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Beberapa tugas dan fungsi utama Inspektorat Kabupaten Banggai antara lain:

1. Pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten.
2. Audit terhadap pengelolaan keuangan daerah, termasuk penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya.
3. Penyelidikan terkait dugaan penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dalam lingkungan pemerintahan daerah.
4. Pembinaan terhadap aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Banggai agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Penyuluhan kepada perangkat daerah mengenai tata kelola yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Inspektorat Kabupaten Banggai juga berfungsi untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di tingkat daerah.

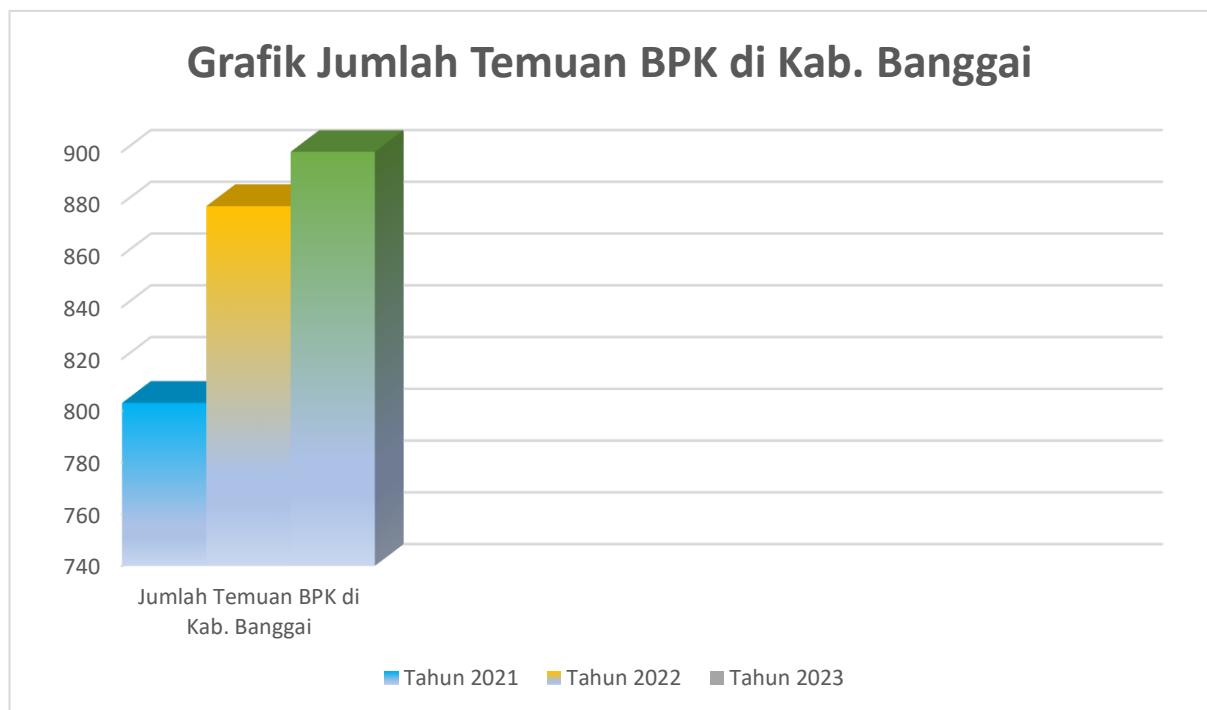
Untuk informasi lebih lanjut tentang Inspektorat Kabupaten Banggai, Anda bisa mengunjungi situs web resmi pemerintah Kabupaten Banggai atau menghubungi langsung kantor Inspektorat setempat.

Tabel 2.7.1 Jumlah Temuan BPK di Kab. Banggai

| No | Jumlah Temuan BPK di Kab. Banggai | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|----|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Jumlah Temuan BPK di Kab. Banggai | 803 | 879 | 900 |
| | Jumlah | 803 | 879 | 900 |

Sumber : DKISP, 2023

Grafik 2.7.2 Jumlah Temuan BPK di Kab. Banggai



Sumber : DKISP, 2023

Tabel 2.7.1 Persentase Pelanggaran Pegawai di Kab. Banggai

| No | Persentase Pelanggaran Pegawai di Kab. Banggai | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|----|--|------------|------------|------------|
| 1. | Persentase Pelanggaran Pegawai di Kab. Banggai | 6.89 % | 3.44 % | 1.75 % |
| | Jumlah | 6.89 % | 3.44 % | 1.75 % |

Sumber : DKISP, 2023

2.8 Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah dua aspek penting dalam pengelolaan dan pembangunan suatu wilayah. Kedua aspek ini saling berkaitan dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai keduanya:

1. Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan pembangunan daerah merujuk pada proses yang sistematis dalam merancang dan mengembangkan wilayah suatu daerah. Proses ini mencakup identifikasi masalah, penentuan prioritas, penentuan sasaran, dan perumusan strategi serta kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Beberapa komponen utama dalam perencanaan pembangunan daerah meliputi:
 - Visi dan Misi Daerah: Menentukan arah pembangunan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah.
 - Analisis Kebutuhan: Mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, rendahnya kualitas pendidikan, atau infrastruktur yang kurang memadai.
 - Perencanaan Sumber Daya: Mengelola dan mengalokasikan sumber daya (manusia, keuangan, alam) secara efisien untuk mendukung pembangunan daerah.

- Perencanaan Infrastruktur: Menyusun rencana pembangunan fasilitas fisik seperti jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain.
- Partisipasi Masyarakat: Mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan mereka.
- Kebijakan dan Regulasi: Menyusun kebijakan dan peraturan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD): RPJMD adalah dokumen perencanaan yang memuat sasaran, prioritas pembangunan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun.

Contoh implementasi perencanaan pembangunan daerah:

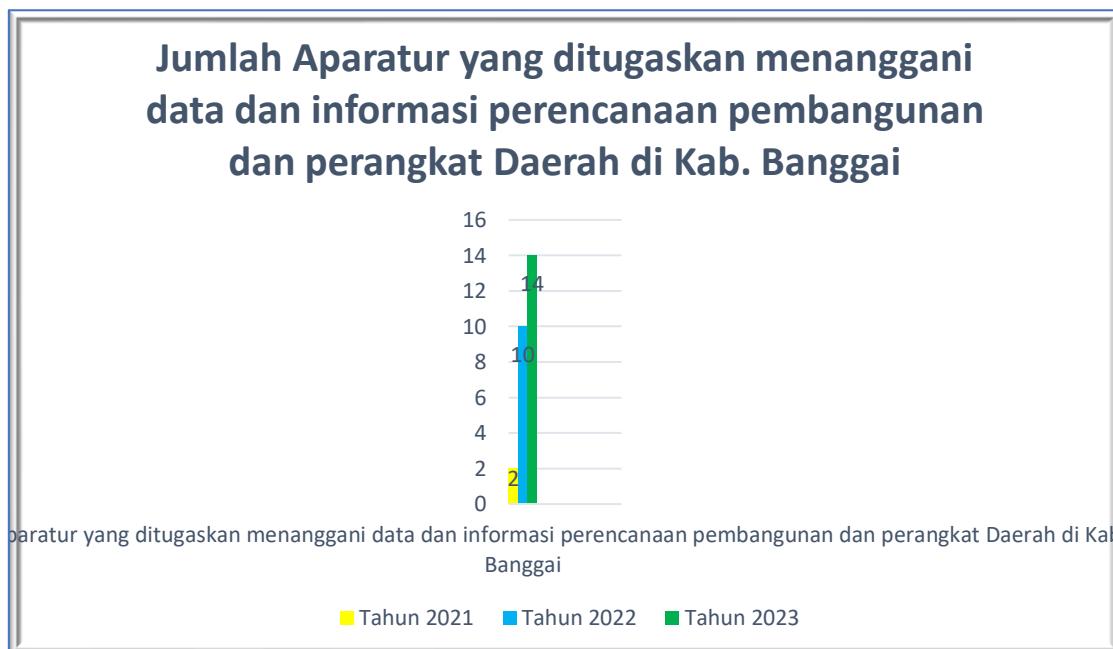
- Pembangunan sektor pariwisata di daerah yang memiliki potensi alam.
- Perbaikan sistem transportasi umum di kota besar untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas.
- Pembangunan daerah pinggiran untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah.

Tabel 2.8.1 Jumlah Aparatur yang ditugaskan menanggani data dan informasi perencanaan pembangunan dan perangkat Daerah di Kab. Banggai

| No | Jumlah Aparatur yang ditugaskan menanggani data dan informasi perencanaan pembangunan dan perangkat Daerah di Kab. Banggai | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|----|--|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah Aparatur yang ditugaskan menanggani data dan informasi perencanaan pembangunan dan perangkat Daerah di Kab. Banggai | 2 | 10 | 14 |
| | Jumlah | 2 | 10 | 14 |

Sumber : BAPPEDA LITBANG, 2023

Grafik 2.8.2 Jumlah Aparatur yang ditugaskan menanggani data dan informasi perencanaan pembangunan dan perangkat Daerah di Kab. Banggai



Sumber : BAPPEDA LITBANG, 2023

Tabel 2.8.3 Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang kewilayahan(Renstra & Renja) di Kab. Banggai

| No | Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang kewilayahan(Renstra & Renja) di Kab. Banggai | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|----|---|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang kewilayahan (Renstra & Renja) di Kab. Banggai | 23 | 23 | 24 |
| | Jumlah | 23 | 23 | 24 |

Sumber : BAPPEDA LITBANG, 2023

Grafik 2.8.4 Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang kewilayahan(Renstra & Renja) di Kab. Banggai



Sumber : BAPPEDA LITBANG, 2023

Tabel 2.8.5 Jumlah Program dalam RKPD di Kab. Banggai

| No | Jumlah Program dalam RKPD di Kab. Banggai | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|----|---|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah Program dalam RKPD di Kab. Banggai | 122 | 129 | 196 |
| | Jumlah | 122 | 129 | 196 |

Sumber : BAPPEDA LITBANG, 2023

Grafik 2.8.6 Jumlah Program dalam RKPD di Kab. Banggai



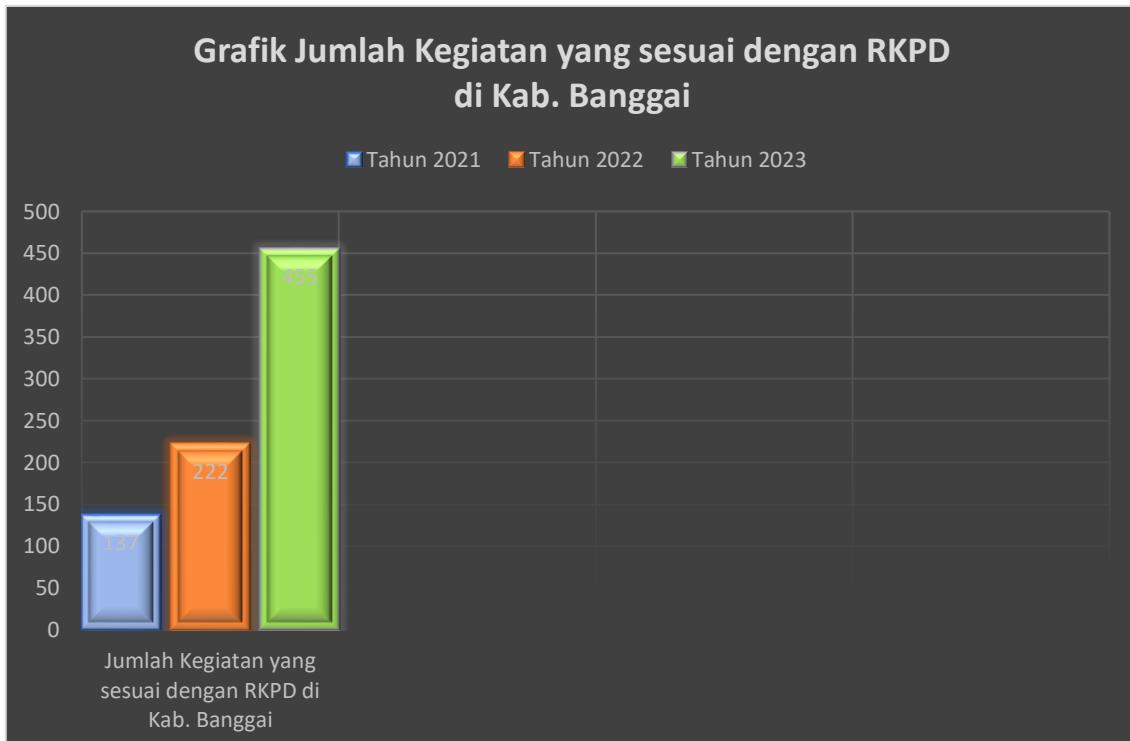
Sumber : BAPPEDA LITBANG, 2023

Tabel 2.8.7 Jumlah Kegiatan yang sesuai dengan RKPD di Kab. Banggai

| No | Jumlah Kegiatan yang sesuai dengan RKPD di Kab. Banggai | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|----|---|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah Kegiatan yang sesuai dengan RKPD di Kab. Banggai | 137 | 222 | 455 |
| | Jumlah | 137 | 222 | 455 |

Sumber : BAPPEDA LITBANG, 2023

Grafik 2.8.8 Jumlah Kegiatan yang sesuai dengan RKPD di Kab. Banggai



Sumber : BAPPEDA LITBANG, 2023

2.9 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya keuangan dan aset milik pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan yang baik juga penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran yang ada di pemerintah daerah.

2. Pengelolaan Aset Daerah

Aset daerah mencakup semua kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Pengelolaan aset daerah yang baik sangat penting untuk menjaga agar aset tersebut dapat digunakan secara maksimal dan tidak menimbulkan kerugian bagi daerah.

3. Regulasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan asetnya harus mematuhi berbagai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, antara lain:

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yang juga berlaku untuk daerah.

- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang mengatur tentang pembagian dana antara pusat dan daerah.
 - Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memberikan pedoman teknis bagi pengelolaan keuangan daerah.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Daerah, yang mengatur pengelolaan aset milik pemerintah daerah.
4. Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Beberapa tantangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain:
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten: Pengelolaan keuangan dan aset daerah membutuhkan tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam bidang akuntansi dan manajemen aset.
 - Korupsi dan Penyalahgunaan Aset: Kasus penyalahgunaan keuangan dan aset sering terjadi, yang merugikan daerah dan masyarakat.
 - Transparansi dan Akuntabilitas: Meski banyak daerah telah menerapkan sistem transparansi, namun masih ada beberapa daerah yang menghadapi masalah dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik.
 - Keterbatasan Dana: Daerah-daerah tertentu, terutama daerah dengan anggaran terbatas, sering kali kesulitan dalam mengelola keuangan dan aset secara optimal

5. Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain:

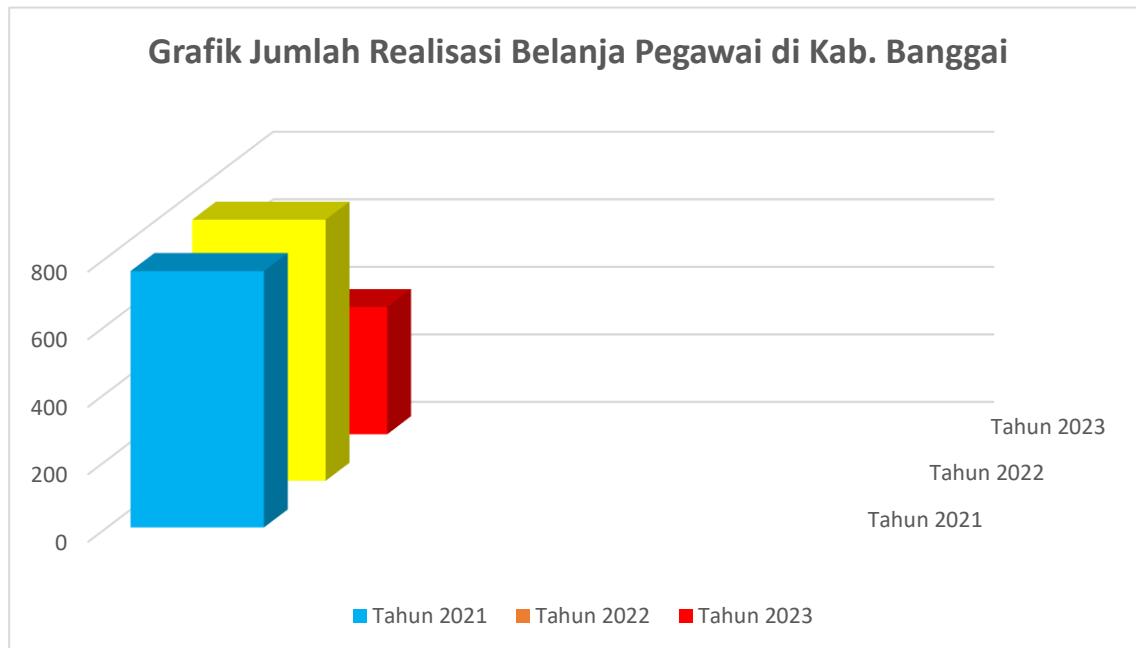
- Pelatihan dan Pengembangan SDM: Memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah daerah agar memiliki kompetensi yang cukup dalam mengelola keuangan dan aset daerah.
- Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Aset (SIMKAD): Menggunakan sistem informasi berbasis teknologi untuk mempermudah dan mempercepat proses pengelolaan keuangan dan aset.
- Peningkatan Pengawasan: Memperkuat pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan aset.
- Meningkatkan Transparansi: Menggunakan platform digital untuk menyebarkan informasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada masyarakat secara terbuka.

Tabel 2.9.1 Jumlah Realisasi Belanja Pegawai di Kab. Banggai

| No | Jumlah Realisasi Belanja Pegawai di Kab. Banggai | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|----|--|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah Realisasi Belanja Pegawai di Kab. Banggai | 758,9456 | 773,1879 | 376,3902 |
| | Jumlah | 758,9456 | 773,1879 | 376,3902 |

Sumber : Pengelolaan keuangan dan aset daerah, 2023

Grafik 2.9.2 Jumlah Realisasi Belanja Pegawai di Kab. Banggai



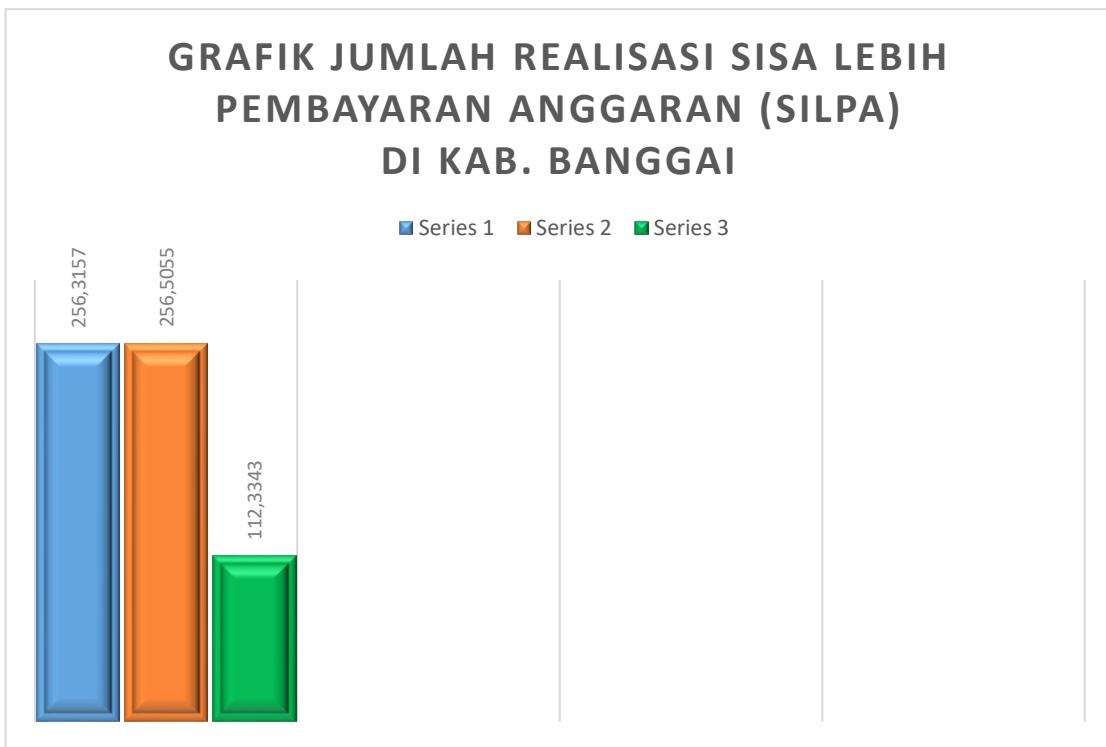
Sumber : Pengelolaan keuangan dan aset daerah, 2023

Tabel 2.9.3 Jumlah Realisasi Sisa Lebih Pembayaran anggaran (SILPA) di Kab. Banggai

| No | Jumlah Realisasi Sisa Lebih Pembayaran anggaran (SILPA) di Kab. Banggai | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|----|---|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah Realisasi Sisa Lebih Pembayaran anggaran (SILPA) di Kab. Banggai | 256,3157 | 256,5055 | 112,3343 |
| | Jumlah | 256,3157 | 256,5055 | 112,3343 |

Sumber : Pengelolaan keuangan dan aset daerah, 2023

Grafik 2.9.4 Jumlah Realisasi Sisa Lebih Pembayaran anggaran (SILPA) di Kab. Banggai



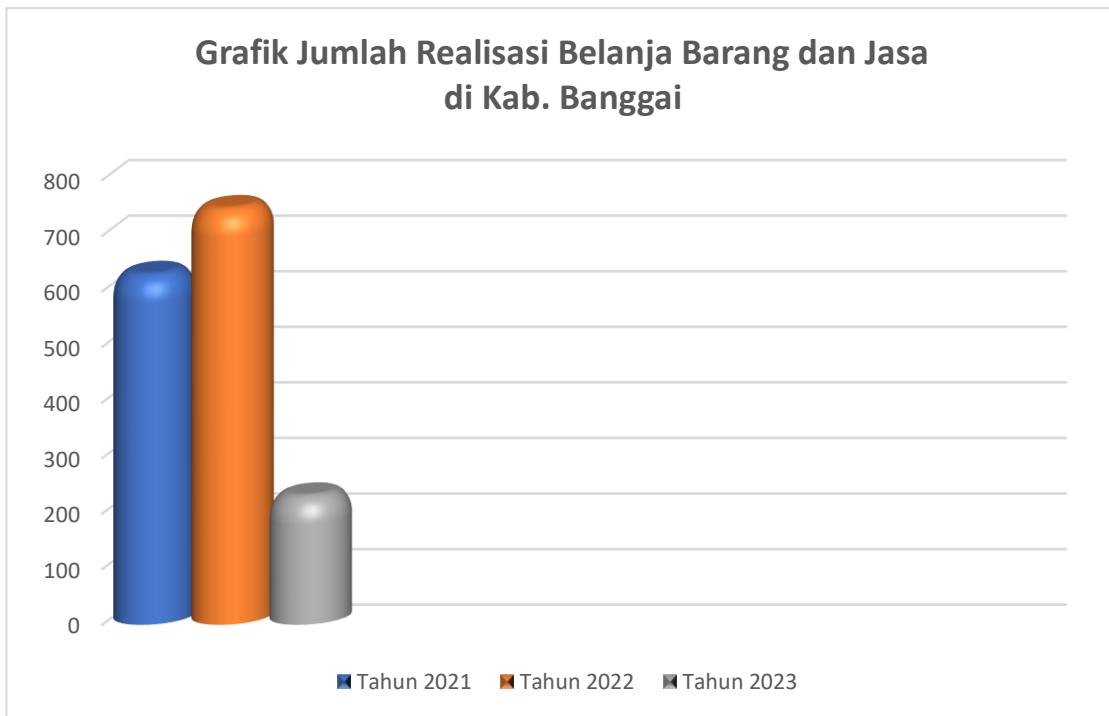
Sumber : Pengelolaan keuangan dan aset daerah, 2023

Tabel 2.9.5 Jumlah Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Kab. Banggai

| No | Jumlah Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Kab. Banggai | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|----|--|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Kab. Banggai | 627,1869 | 745,5942 | 228,4262 |
| | Jumlah | 627,1869 | 745,5942 | 228,4262 |

Sumber : Pengelolaan keuangan dan aset daerah, 2023

Grafik 2.9.6 Jumlah Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Kab. Banggai



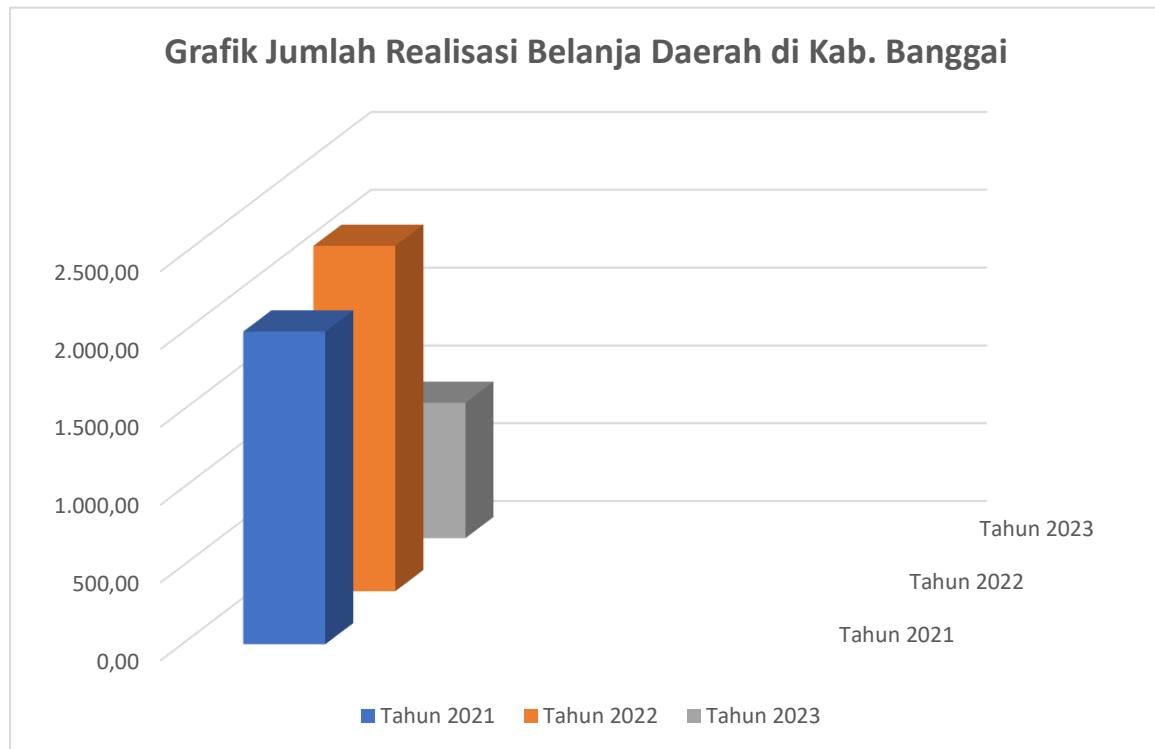
Sumber : Pengelolaan keuangan dan aset daerah, 2023

Tabel 2.9.7 Jumlah Realisasi Belanja Daerah di Kab. Banggai

| No | Jumlah Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Kab. Banggai | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|----|--|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Kab. Banggai | 2.009,0707 | 2.218,8672 | 869,5131 |
| | Jumlah | 2.009,0707 | 2.218,8672 | 869,5131 |

Sumber : Pengelolaan keuangan dan aset daerah, 2023

Grafik 2.9.8 Jumlah Realisasi Belanja Daerah di Kab. Banggai



Sumber : Pengelolaan keuangan dan aset daerah, 2023

2.10 Riset dan Inovasi Daerah

Riset dan Inovasi Daerah memainkan peran penting dalam memajukan pembangunan daerah, memperkuat daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Riset dan inovasi tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga mencakup pengembangan sumber daya manusia, sektor ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang relevan dengan kebutuhan daerah. Melalui riset dan inovasi, daerah dapat menemukan solusi baru untuk masalah yang ada dan menciptakan peluang baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.

1. Riset Daerah (Research and Development/R&D)

Riset daerah mencakup berbagai aktivitas penelitian yang bertujuan untuk memahami potensi, permasalahan, dan peluang yang ada di suatu daerah serta untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat diterapkan di daerah tersebut. Riset ini dapat bersifat fundamental, terapan, atau pengembangan teknologi, dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, serta sektor swasta.

Tujuan Riset Daerah:

- Memahami Potensi Daerah: Mengidentifikasi dan mengembangkan potensi unggulan daerah, seperti sektor pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dan sumber daya alam lainnya.
- Menyelesaikan Masalah Lokal: Riset daerah sering difokuskan pada pemecahan masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh masyarakat

setempat, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, dan permasalahan lingkungan.

- Meningkatkan Kualitas Layanan Publik: Riset juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur.
- Mendorong Kebijakan yang Berbasis Bukti: Menghasilkan data dan informasi yang dapat mendasari pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam perencanaan pembangunan daerah.

2. Inovasi Daerah

Inovasi daerah berhubungan dengan penciptaan dan penerapan ide, produk, proses, atau teknologi baru yang dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. Inovasi ini dapat mencakup banyak aspek, mulai dari inovasi di bidang teknologi, produk, jasa, hingga inovasi sosial yang dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Tujuan Inovasi Daerah:

- Meningkatkan Daya Saing Daerah: Inovasi yang berkelanjutan dapat memperkuat daya saing daerah, baik dalam konteks ekonomi lokal maupun daya tariknya sebagai destinasi investasi.
- Mempercepat Pembangunan Daerah: Inovasi dapat membantu mempercepat proses pembangunan daerah dengan cara menciptakan solusi yang lebih efisien, murah, dan mudah diterapkan.

- Mengurangi Kesenjangan Pembangunan: Inovasi dapat menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah, baik dalam skala regional maupun antara kota dan desa.
- Memberdayakan Masyarakat: Melalui inovasi sosial, masyarakat dapat diberdayakan untuk menciptakan solusi yang bermanfaat bagi kebutuhan lokal, seperti menciptakan lapangan kerja baru, mengatasi permasalahan sosial, atau memperbaiki kualitas hidup.

BAB III

PEMBANGUNAN MANUSIA

3.1 Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri mereka. Tujuan utamanya adalah agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemampuan mengendalikan diri, kepribadian yang baik, kecerdasan, moralitas yang luhur, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terhubung dengan nilai-nilai agama, budaya bangsa Indonesia, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan utamanya adalah agar potensi peserta didik berkembang, sehingga mereka menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan prioritas nasional, terlebih lagi dengan adanya peraturan alokasi minimal 20% dari APBD untuk bidang pendidikan. Oleh karena itu, inovasi-inovasi bidang pendidikan sangat diperlukan agar alokasi APBD sebesar 20% dapat menghasilkan SDM yang cerdas dan berdaya saing. Kewajiban alokasi dianggap salah satu langkah untuk menyelesaikan berbagai

permasalahan pendidikan, mulai dari pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan, serta partisipasi sekolah.

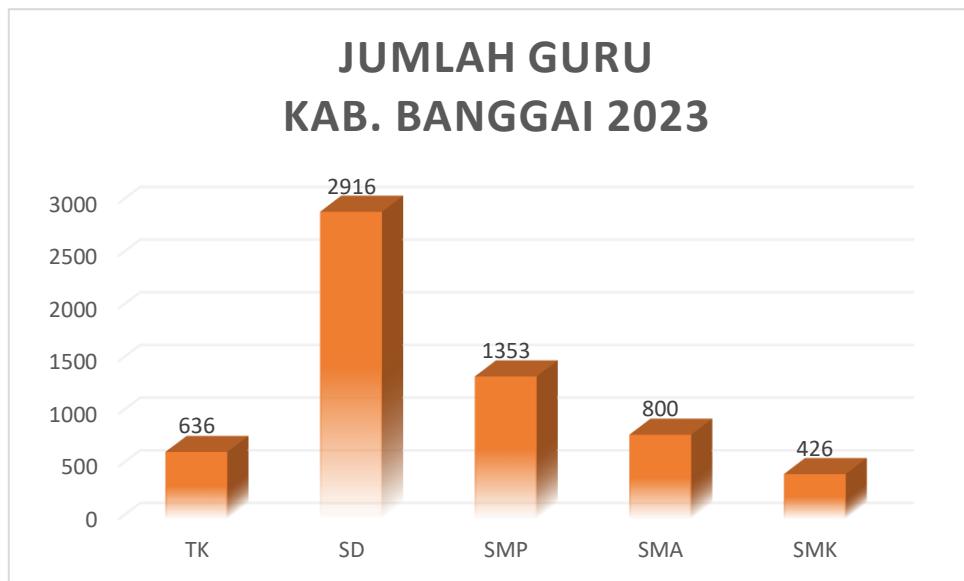
Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasana pendidikan seperti sekolah dan tenaga pendidik (guru) yang memadai. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai, Berikut merupakan data jumlah sekolah, guru dan siswa di Kab.Banggai.

Gambar 3.1.1 Jumlah Sekolah Kab.Banggai 2023



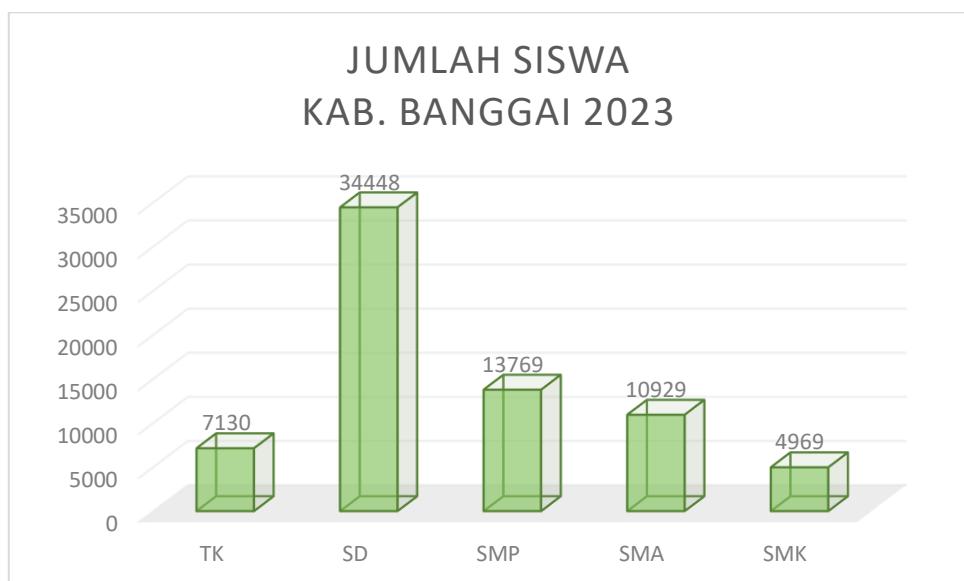
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai

Gambar 3.1.2 Jumlah Guru Kab.Banggai 2023



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai

Gambar 3.1.3 Jumlah Siswa Kab.Banggai 2023



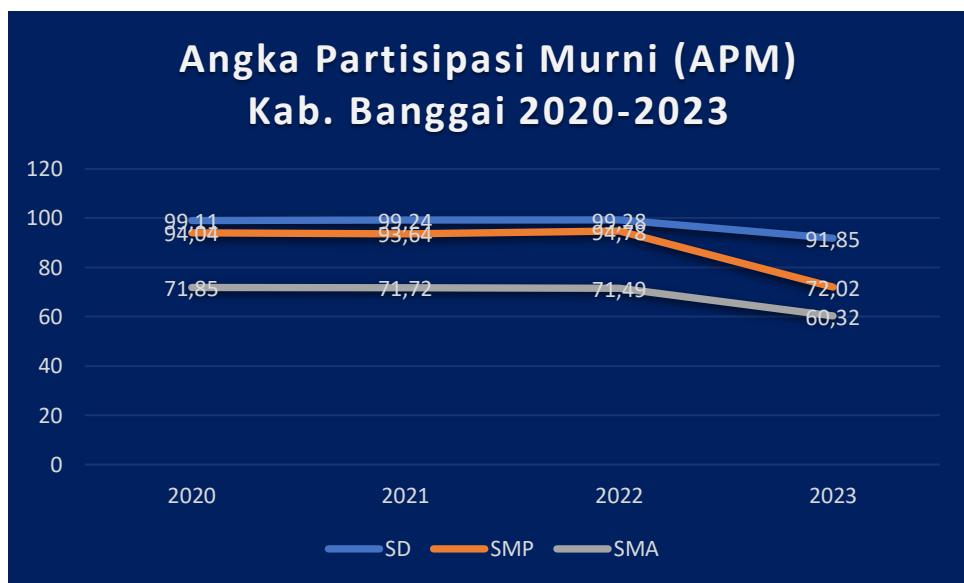
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai

Gambar 3.1.4 Indeks Pembangunan Manuasia (IPM) Kab.Banggai 2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Banggai

Gambar 3.1.5 Angka Partisipasi Murni (APM) Kab.Banggai 2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Banggai

Tabel 3.1.1 Jumlah Sekolah TK di Kab.Banggai Menurut Kecamatan Tahun 2023

| No | Wilayah | Taman Kanak-Kanak (TK) | | |
|--------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|
| | | Negeri | Swasta | Total |
| 1 | Kec. Luwuk | 2 | 21 | 23 |
| 2 | Kec. Toili | 0 | 26 | 26 |
| 3 | Kec. Pagimana | 1 | 9 | 10 |
| 4 | Kec. Bualemo | 0 | 9 | 9 |
| 5 | Kec. Toili Barat | 0 | 16 | 16 |
| 6 | Kec. Bunta | 0 | 16 | 16 |
| 7 | Kec. Kintom | 0 | 11 | 11 |
| 8 | Kec. Luwuk Timur | 0 | 7 | 7 |
| 9 | Kec. Nuhon | 0 | 8 | 8 |
| 10 | Kec. Balantak | 0 | 7 | 7 |
| 11 | Kec. Batui Selatan | 0 | 10 | 10 |
| 12 | Kec. Simpang Raya | 0 | 12 | 12 |
| 13 | Kec. Batui | 0 | 8 | 8 |
| 14 | Kec. Moilong | 0 | 5 | 5 |
| 15 | Kec. Masama | 0 | 11 | 11 |
| 16 | Kec. Lamala | 0 | 10 | 10 |
| 17 | Kec. Luwuk Utara | 0 | 4 | 4 |
| 18 | Kec. Nambo | 0 | 5 | 5 |
| 19 | Kec. Balantak Selatan | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Kec. Mantoh | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Kec. Luwuk Selatan | 1 | 4 | 5 |
| 22 | Kec. Lobu | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Kec. Balantak Utara | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 4 | 206 | 210 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai

Tabel 3.1.2 Jumlah Sekolah SD di Kab.Banggai Menurut Kecamatan Tahun 2023

| No | Wilayah | Sekolah Dasar (SD) | | |
|--------------|-----------------------|--------------------|-----------|------------|
| | | Negeri | Swasta | Total |
| 1 | Kec. Luwuk | 14 | 9 | 23 |
| 2 | Kec. Toili | 25 | 2 | 27 |
| 3 | Kec. Pagimana | 34 | 0 | 34 |
| 4 | Kec. Bualemo | 29 | 0 | 29 |
| 5 | Kec. Toili Barat | 20 | 1 | 21 |
| 6 | Kec. Bunta | 21 | 1 | 22 |
| 7 | Kec. Kintom | 12 | 1 | 13 |
| 8 | Kec. Luwuk Timur | 15 | 1 | 16 |
| 9 | Kec. Nuhon | 20 | 1 | 21 |
| 10 | Kec. Balantak | 10 | 2 | 12 |
| 11 | Kec. Batui Selatan | 16 | 2 | 18 |
| 12 | Kec. Simpang Raya | 15 | 0 | 15 |
| 13 | Kec. Batui | 13 | 1 | 14 |
| 14 | Kec. Moilong | 15 | 0 | 15 |
| 15 | Kec. Masama | 14 | 0 | 14 |
| 16 | Kec. Lamala | 10 | 0 | 10 |
| 17 | Kec. Luwuk Utara | 11 | 1 | 12 |
| 18 | Kec. Nambo | 9 | 0 | 9 |
| 19 | Kec. Balantak Selatan | 8 | 1 | 9 |
| 20 | Kec. Mantoh | 8 | 1 | 9 |
| 21 | Kec. Luwuk Selatan | 6 | 1 | 7 |
| 22 | Kec. Lobu | 8 | 0 | 8 |
| 23 | Kec. Balantak Utara | 5 | 0 | 5 |
| Total | | 338 | 25 | 363 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai

Tabel 3.1.3 Jumlah Sekolah SMP di Kab.Banggai Menurut Kecamatan Tahun 2023

| No | Wilayah | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | | |
|--------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|------------|
| | | Negeri | Swasta | Total |
| 1 | Kec. Luwuk | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Kec. Toili | 8 | 5 | 13 |
| 3 | Kec. Pagimana | 8 | 1 | 9 |
| 4 | Kec. Bualemo | 7 | 0 | 7 |
| 5 | Kec. Toili Barat | 6 | 3 | 9 |
| 6 | Kec. Bunta | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Kec. Kintom | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Kec. Luwuk Timur | 6 | 0 | 6 |
| 9 | Kec. Nuhon | 5 | 0 | 5 |
| 10 | Kec. Balantak | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Kec. Batui Selatan | 3 | 1 | 4 |
| 12 | Kec. Simpang Raya | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Kec. Batui | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Kec. Moilong | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Kec. Masama | 4 | 0 | 4 |
| 16 | Kec. Lamala | 4 | 0 | 4 |
| 17 | Kec. Luwuk Utara | 3 | 0 | 3 |
| 18 | Kec. Nambo | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Kec. Balantak Selatan | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Kec. Mantoh | 2 | 3 | 5 |
| 21 | Kec. Luwuk Selatan | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Kec. Lobu | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Kec. Balantak Utara | 1 | 0 | 1 |
| Total | | 86 | 25 | 111 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai

Tabel 3.1.4 Jumlah Sekolah SMA di Kab.Banggai Menurut Kecamatan Tahun 2023

| No | Wilayah | Sekolah Menengah Atas (SMA) | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|----------|-----------|
| | | Negeri | Swasta | Total |
| 1 | Kec. Luwuk | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Kec. Toili | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Kec. Pagimana | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Kec. Bualemo | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Kec. Toili Barat | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Kec. Bunta | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Kec. Kintom | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Kec. Luwuk Timur | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Kec. Nuhon | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Kec. Balantak | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Kec. Batui Selatan | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Kec. Simpang Raya | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Kec. Batui | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Kec. Moilong | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Kec. Masama | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Kec. Lamala | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Kec. Luwuk Utara | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Nambo | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kec. Balantak Selatan | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Kec. Mantoh | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Kec. Luwuk Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kec. Lobu | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kec. Balantak Utara | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 28 | 6 | 34 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai

Tabel 3.1.4 Jumlah Sekolah SMK di Kab.Banggai Menurut Kecamatan Tahun 2023

| No | Wilayah | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | | |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| | | Negeri | Swasta | Total |
| 1 | Kec. Luwuk | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Kec. Toili | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Kec. Pagimana | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Bualemo | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Kec. Toili Barat | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Kec. Bunta | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Kec. Kintom | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kec. Luwuk Timur | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Kec. Nuhon | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Kec. Balantak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Batui Selatan | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Kec. Simpang Raya | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Batui | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Moilong | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Kec. Masama | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Lamala | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec. Luwuk Utara | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Kec. Nambo | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Kec. Balantak Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kec. Mantoh | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kec. Luwuk Selatan | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Kec. Lobu | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kec. Balantak Utara | 1 | 0 | 1 |
| Total | | 12 | 13 | 25 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai

Tabel 3.1.5 Jumlah Guru di Kab.Banggai Menurut Kecamatan Tahun 2023

| No | Wilayah | TK | SD | SMP | SMA | SMA |
|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 1 | Kec. Luwuk | 118 | 302 | 151 | 202 | 142 |
| 2 | Kec. Toili | 97 | 235 | 154 | 86 | 47 |
| 3 | Kec. Pagimana | 24 | 245 | 91 | 76 | 0 |
| 4 | Kec. Bualemo | 44 | 166 | 89 | 51 | 32 |
| 5 | Kec. Toili Barat | 28 | 151 | 81 | 62 | 25 |
| 6 | Kec. Bunta | 20 | 173 | 71 | 20 | 15 |
| 7 | Kec. Kintom | 16 | 146 | 74 | 36 | 17 |
| 8 | Kec. Luwuk Timur | 31 | 119 | 66 | 42 | 0 |
| 9 | Kec. Nuhon | 19 | 125 | 68 | 15 | 26 |
| 10 | Kec. Balantak | 12 | 123 | 47 | 18 | 31 |
| 11 | Kec. Batui Selatan | 36 | 124 | 33 | 26 | 10 |
| 12 | Kec. Simpang Raya | 24 | 126 | 44 | 31 | 0 |
| 13 | Kec. Batui | 21 | 109 | 52 | 19 | 17 |
| 14 | Kec. Moilong | 33 | 113 | 50 | 23 | 0 |
| 15 | Kec. Masama | 14 | 104 | 51 | 0 | 13 |
| 16 | Kec. Lamala | 17 | 87 | 41 | 0 | 27 |
| 17 | Kec. Luwuk Utara | 18 | 78 | 36 | 19 | 0 |
| 18 | Kec. Nambo | 19 | 74 | 53 | 19 | 0 |
| 19 | Kec. Balantak Selatan | 28 | 97 | 5 | 0 | 11 |
| 20 | Kec. Mantoh | 11 | 63 | 31 | 20 | 0 |
| 21 | Kec. Luwuk Selatan | 3 | 68 | 33 | 35 | 0 |
| 22 | Kec. Lobu | 3 | 50 | 25 | 0 | 0 |
| 23 | Kec. Balantak Utara | 0 | 38 | 7 | 0 | 13 |
| Total | | 636 | 2916 | 1353 | 800 | 426 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai

Tabel 3.1.5 Jumlah Siswa di Kab.Banggai Menurut Kecamatan Tahun 2023

| No | Wilayah | TK | SD | SMP | SMA | SMA |
|--------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Kec. Luwuk | 1,239 | 4,552 | 2,151 | 2,938 | 1,907 |
| 2 | Kec. Toili | 1,081 | 3,241 | 1,535 | 1,108 | 447 |
| 3 | Kec. Pagimana | 637 | 2,083 | 1,062 | 663 | 412 |
| 4 | Kec. Bualemo | 263 | 2,339 | 989 | 1,099 | 0 |
| 5 | Kec. Toili Barat | 390 | 1,778 | 803 | 790 | 235 |
| 6 | Kec. Bunta | 244 | 1,912 | 764 | 436 | 200 |
| 7 | Kec. Kintom | 327 | 1,896 | 717 | 724 | 0 |
| 8 | Kec. Luwuk Timur | 349 | 1,68 | 680 | 422 | 236 |
| 9 | Kec. Nuhon | 185 | 1,8 | 666 | 254 | 433 |
| 10 | Kec. Balantak | 304 | 1,433 | 525 | 324 | 231 |
| 11 | Kec. Batui Selatan | 152 | 1,338 | 538 | 154 | 251 |
| 12 | Kec. Simpang Raya | 159 | 1,531 | 473 | 0 | 116 |
| 13 | Kec. Batui | 364 | 1,131 | 272 | 217 | 32 |
| 14 | Kec. Moilong | 271 | 925 | 365 | 449 | 0 |
| 15 | Kec. Masama | 284 | 1,697 | 32 | 0 | 111 |
| 16 | Kec. Lamala | 202 | 658 | 299 | 334 | 0 |
| 17 | Kec. Luwuk Utara | 242 | 966 | 357 | 277 | 0 |
| 18 | Kec. Nambo | 130 | 809 | 378 | 0 | 261 |
| 19 | Kec. Balantak Selatan | 121 | 725 | 284 | 248 | 0 |
| 20 | Kec. Mantoh | 70 | 595 | 316 | 280 | 0 |
| 21 | Kec. Luwuk Selatan | 59 | 525 | 233 | 212 | 0 |
| 22 | Kec. Lobu | 57 | 363 | 258 | 0 | 0 |
| 23 | Kec. Balantak Utara | 0 | 471 | 72 | 0 | 97 |
| Total | | 7130 | 34448 | 13769 | 10929 | 4969 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banggai

3.2 Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebuah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola, mengembangkan, dan memfasilitasi berbagai kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di kalangan pemuda, serta mendukung pengembangan olahraga untuk menciptakan prestasi dan kesehatan masyarakat.

Secara umum, tugas dan fungsi dari Dinas Pemuda dan Olahraga meliputi:

1. Pengembangan Kepemudaan: Dinas ini bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi pemuda dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan, kewirausahaan, serta partisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya.
2. Penyelenggaraan Olahraga: Melaksanakan program olahraga di tingkat kabupaten, baik yang bersifat pembinaan maupun kompetisi, guna meningkatkan prestasi olahraga di daerah tersebut.
3. Fasilitasi Infrastruktur dan Sarana Olahraga: Membangun dan memelihara fasilitas olahraga yang dapat digunakan oleh masyarakat, terutama pemuda, untuk mendukung kegiatan olahraga yang terorganisir.
4. Pemberdayaan Pemuda: Menyediakan pelatihan, pembinaan, dan peluang bagi pemuda untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan di berbagai bidang yang dapat mendukung perkembangan karir dan kehidupan mereka.
5. Program Sosial dan Kegiatan Pemberdayaan: Mengadakan program-program yang mendorong pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah, seperti program kepemudaan, sukarelawan, dan lainnya.

Dinas Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Banggai berupaya menciptakan generasi muda yang sehat, aktif, dan berprestasi, serta meningkatkan kualitas olahraga di daerah tersebut.

Tabel 3.2.1 Jumlah Event, Klub dan Gedung Olahraga Kab.Banggai Tahun 2023

| No | Indikator | Jumlah | Satuan |
|----|------------------------|--------|--------|
| 1 | Jumlah Event | 8 | Event |
| 2 | Jumlah Klub Olahraga | 74 | Klub |
| 3 | Jumlah Gedung Olahraga | 3 | Unit |

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

Gambar 3.2.1 Jumlah Event, Klub dan Gedung Olahraga Kab.Banggai Tahun 2023



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

Tabel 3.2.2 Jumlah Atlet dan Insan Olahraga Berprestasi Kab.Banggai Tahun 2023

| No | Indikator | Jumlah | Satuan |
|----|-----------------------------------|--------|--------|
| 1 | Jumlah Atlet Berprestasi | 36 | Orang |
| 2 | Jumlah Insan Olahraga Berprestasi | 9 | Orang |

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

Gambar 3.2.2 Jumlah Atlet dan Insan Olahraga Berprestasi Kab.Banggai Tahun 2023



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

Tabel 3.2.2 Persentase Pemuda Terlatih yang Menjadi Wirausaha Mandiri Kab.Banggai Tahun 2023

| No | Indikator | Jumlah | Satuan |
|----|---|--------|--------|
| 1 | Persentase Pemuda Terlatih | 50 | % |
| 2 | Persentase Pemuda Terlatih yang Menjadi Wirausaha Mandiri | 27 | % |

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

Gambar 3.2.2 Persentase Pemuda Terlatih yang Menjadi Wirausaha Mandiri Kab.Banggai Tahun 2023



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

3.3 Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai adalah lembaga pemerintah daerah berfungsi untuk menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, seperti peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, pengendalian wabah, serta upaya-upaya promotif dan preventif lainnya.

Beberapa tugas utamanya antara lain:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan: Memberikan layanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya di wilayah Kabupaten Banggai.
2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat: Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat di masyarakat.
3. Pengawasan Kesehatan: Melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek kesehatan masyarakat, termasuk sanitasi, lingkungan, dan penyakit menular.
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit: Melaksanakan program pencegahan penyakit seperti imunisasi, pengendalian penyakit menular, serta penanganan wabah jika terjadi.
5. Pelatihan dan Pengembangan SDM Kesehatan: Melakukan pelatihan bagi tenaga medis dan kesehatan di tingkat lokal, serta mendukung pengembangan profesi kesehatan.

Gambar 3.3.1 Jumlah Dokter di Kab.Banggai Tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Banggai

Gambar 3.3.2 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kab.Banggai Tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Banggai

Tabel 3.3.1 SDM Pelaksana Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kab.Banggai
Tahun 2023

| No | Standar Pelayanan Minimal | Dokter | Perawat | Bidan | SKM | Kesling | Gizi | Apoteker | Farmasi | Manajemen |
|----|---------------------------------------|--------|---------|-------|-----|---------|------|----------|---------|-----------|
| 1 | Ibu Hamil | 46 | 531 | 657 | | | 58 | 28 | 37 | 105 |
| 2 | Ibu Bersalin | 46 | 531 | 657 | | | 58 | 28 | 37 | 105 |
| 3 | Bayi Baru Lahir | 46 | 531 | 657 | | | 58 | 28 | 37 | 105 |
| 4 | Balita | 46 | 531 | 657 | | | 58 | 28 | 37 | 105 |
| 5 | Usia Pendidikan Dasar | 46 | 531 | | 159 | 42 | 58 | 28 | 37 | 105 |
| 6 | Usia Produktif | 46 | 531 | | 159 | | 58 | 28 | 37 | 105 |
| 7 | Usia Lanjut | 46 | 531 | | 159 | | 58 | 28 | 37 | 105 |
| 8 | Penderita Hipertensi | 46 | 531 | | 159 | | 58 | 28 | 37 | 105 |
| 9 | Penderita Diabetes Melitus | 46 | 531 | | 159 | | 58 | 28 | 37 | 105 |
| 10 | Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | 46 | 531 | | 159 | | 58 | 28 | 37 | 105 |
| 11 | Penderita Tuberkulosis Sesuai Standar | 46 | 531 | | 159 | | 58 | 28 | 37 | 105 |
| 12 | Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV | 46 | 531 | | 159 | | 58 | 28 | 37 | 105 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Banggai

Tabel 3.3.2 Jumlah Prasarana Kesehatan Kab.Banggai Tahun 2023

| No | Prasarana | Jumlah | Satuan |
|----|--------------------|--------|--------|
| 1 | Rumah Sakit | 2 | Unit |
| 2 | Poliklinik | 6 | Unit |
| 3 | Puskesmas | 30 | Unit |
| 4 | Puskesmas Pembantu | 96 | Unit |
| 5 | Apotek | 23 | Unit |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Banggai

Tabel 3.3.3 Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Kab.Banggai Tahun 2023

| No | Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah | Satuan |
|----|--|---------|--------|
| 1 | Bayi Baru Lahir | 6717 | Unit |
| 2 | Balita | 30657 | Unit |
| 3 | Anak Usia Pendidikan Dasar | 38232 | Unit |
| 4 | Orang Usia 15-59 Tahun | 187,778 | Unit |
| 5 | Orang Usia 60 Tahun Keatas | 42091 | Unit |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Banggai

3.4 Sosial

Dinas Sosial adalah salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan sosial di Kabupaten Banggai. Dinas ini memiliki tugas utama dalam memberikan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Beberapa layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial antara lain:

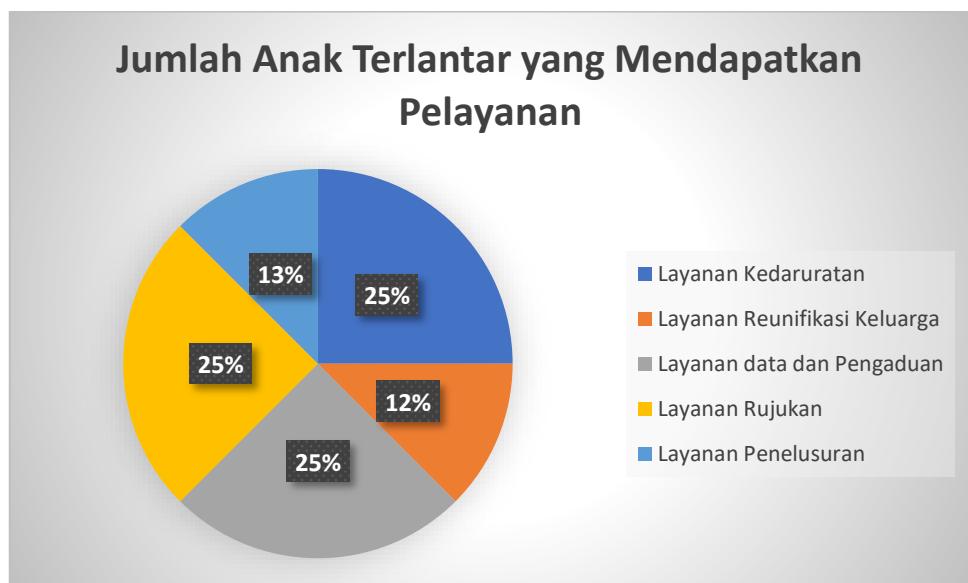
1. Bantuan Sosial: Penyaluran bantuan kepada warga yang membutuhkan, termasuk bantuan untuk keluarga miskin, anak yatim, lansia, dan penyandang disabilitas.
2. Pemberdayaan Masyarakat: Program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan pelatihan, peningkatan keterampilan, dan pemberian modal usaha.
3. Rehabilitasi Sosial: Menangani masalah sosial seperti penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, serta orang dengan gangguan jiwa.
4. Pelayanan Kepada Anak dan Lansia: Perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia.
5. Penanggulangan Kemiskinan: Program-program untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut, seperti pemberian bantuan langsung tunai atau program pemberdayaan ekonomi.

Tabel 3.4.1 Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Kab.Banggai Tahun 2023

| No | Layanan | Jumlah | Satuan |
|----|------------------------------|--------|--------|
| 1 | Layanan Kedaruratan | 4 | Orang |
| 2 | Layanan Reunifikasi Keluarga | 2 | Orang |
| 3 | Layanan data dan Pengaduan | 4 | Orang |
| 4 | Layanan Rujukan | 4 | Orang |
| 5 | Layanan Penelusuran | 2 | Orang |

Sumber: Dinas Sosial Kab.Banggai

Gambar 3.4.1 Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Kab.Banggai Tahun 2023



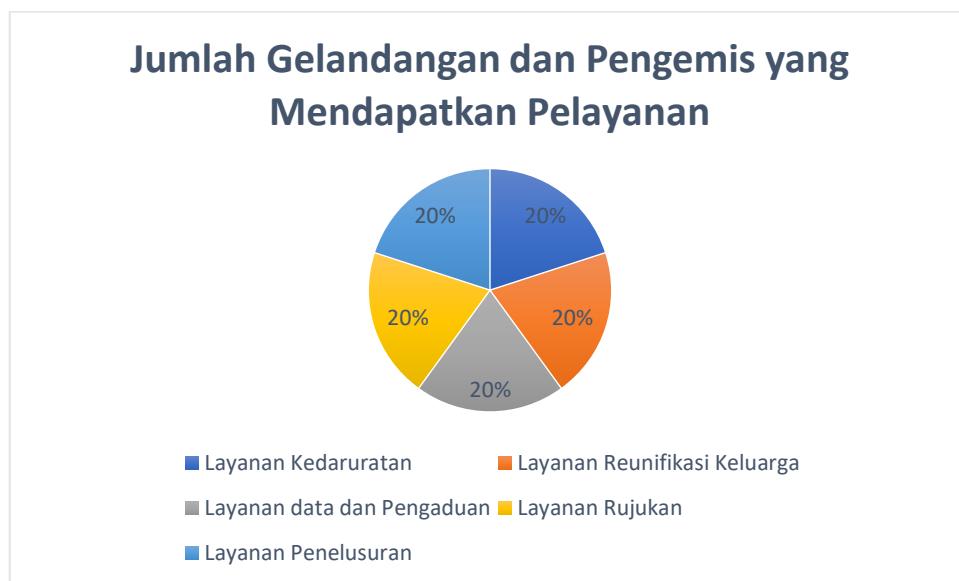
Sumber: Dinas Sosial Kab.Banggai

Tabel 3.4.2 Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Pelayanan Kab.Banggai Tahun 2023

| No | Layanan | Jumlah | Satuan |
|----|------------------------------|--------|--------|
| 1 | Layanan Kedaruratan | 2 | Orang |
| 2 | Layanan Reunifikasi Keluarga | 2 | Orang |
| 3 | Layanan data dan Pengaduan | 2 | Orang |
| 4 | Layanan Rujukan | 2 | Orang |
| 5 | Layanan Penelusuran | 2 | Orang |

Sumber: Dinas Sosial Kab.Banggai

Gambar 3.4.2 Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Pelayanan Kab.Banggai Tahun 2023

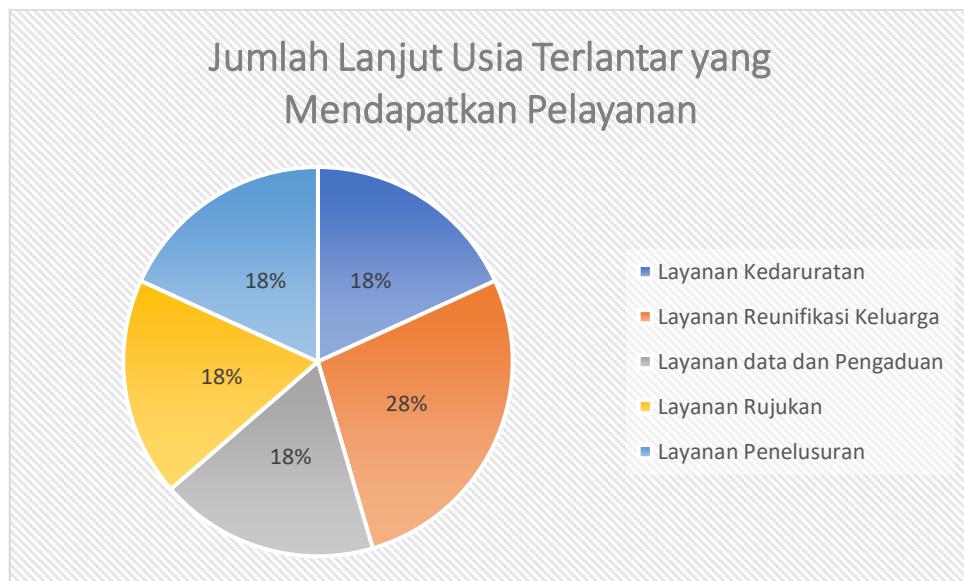


Tabel 3.4.3 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Kab.Banggai
Tahun 2023

| No | Layanan | Jumlah | Satuan |
|----|------------------------------|--------|--------|
| 1 | Layanan Kedaruratan | 2 | Orang |
| 2 | Layanan Reunifikasi Keluarga | 3 | Orang |
| 3 | Layanan data dan Pengaduan | 2 | Orang |
| 4 | Layanan Rujukan | 2 | Orang |
| 5 | Layanan Penelusuran | 2 | Orang |

Sumber: Dinas Sosial Kab.Banggai

Gambar 3.4.3 Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan
Kab.Banggai Tahun 2023



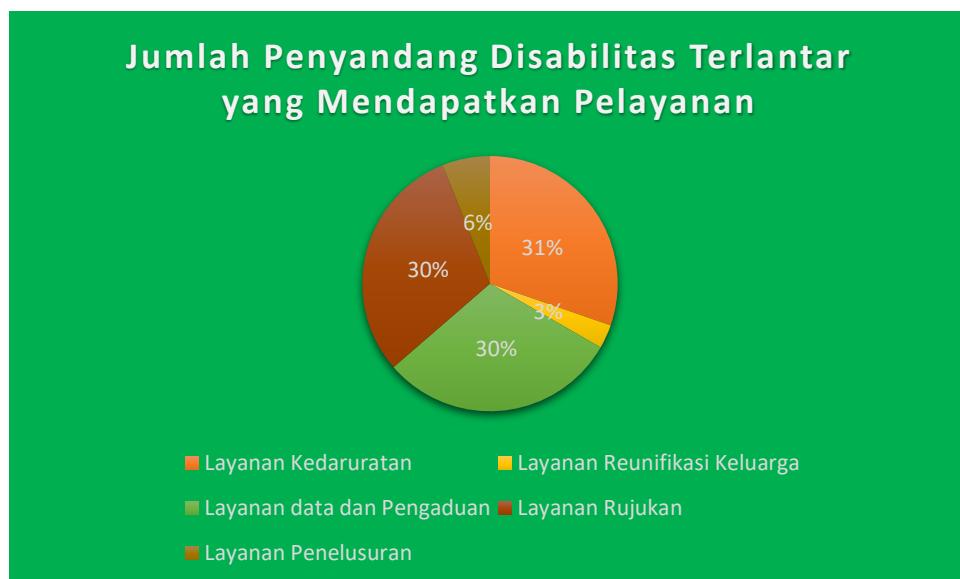
Sumber: Dinas Sosial Kab.Banggai

Tabel 3.4.4 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Kab.Banggai Tahun 2023

| No | Layanan | Jumlah | Satuan |
|----|------------------------------|--------|--------|
| 1 | Layanan Kedaruratan | 10 | Orang |
| 2 | Layanan Reunifikasi Keluarga | 1 | Orang |
| 3 | Layanan data dan Pengaduan | 10 | Orang |
| 4 | Layanan Rujukan | 10 | Orang |
| 5 | Layanan Penelusuran | 2 | Orang |

Sumber: Dinas Sosial Kab.Banggai

Gambar 3.4.4 Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan Kab.Banggai Tahun 2023



Sumber: Dinas Sosial Kab.Banggai

Tabel 3.4.5 Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Kab.Banggai Tahun 2023

| No | Layanan | Jumlah | Satuan |
|----|---|--------|--------|
| 1 | Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal | 35 | Orang |
| 2 | Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang | 35 | Orang |
| 3 | Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal | 47 | Orang |
| 4 | Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang | 47 | Orang |
| 5 | Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga | 2 | Orang |
| 6 | Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga | 19 | Orang |
| 7 | Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana | 419 | Orang |
| 8 | Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi | 12 | Orang |

Sumber: Dinas Sosial Kab.Banggai

3.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat desa serta mendukung pembangunan desa. DPMD bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan fokus pada pembangunan yang berbasis pada potensi dan kebutuhan lokal.

Beberapa tugas dan fungsi utama DPMD meliputi:

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa: Melakukan berbagai program pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat desa agar lebih mandiri dan sejahtera.
2. Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa: Membantu pemerintah desa dalam mengelola administrasi dan pemerintahan desa yang baik dan transparan, serta mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan desa.
3. Pendampingan Desa: Memberikan pendampingan teknis dan pembinaan kepada aparatur desa, serta masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan desa, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi desa.
4. Pembangunan Infrastruktur Desa: Mengkoordinasi dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur di desa yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
5. Pengelolaan Dana Desa: Membantu dalam pengelolaan dan pengawasan dana desa agar digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DPMD juga berperan dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan program yang mendukung kemandirian desa.

Tabel 3.5.1 Jumlah Desa Sesuai Kriteria di Kab.Banggai 2023

| No | Indikator | Jumlah | Satuan |
|----|---|--------|--------|
| 1 | Jumlah Desa Tertinggal | 3 | Desa |
| 2 | Jumlah Desa Berkembang | 163 | Desa |
| 3 | Jumlah Desa Tertinggal yang memenuhi Kriteria Desa Berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun | 1 | Desa |
| 4 | Jumlah Desa Berkembang yang memenuhi Kriteria Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun | 56 | Desa |

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

Gambar 3.5.1 Jumlah Desa Sesuai Kriteria di Kab.Banggai 2023



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

Tabel 3.5.2 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Kab.Banggai

| No | Tahun | Jumlah BUMD | Satuan |
|----|-------|-------------|--------|
| 1 | 2020 | 11 | BUMD |
| 2 | 2021 | 12 | BUMD |
| 3 | 2022 | 21 | BUMD |
| 4 | 2023 | 140 | BUMD |

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

Tabel 3.5.3 Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kab.Banggai

| No | Tahun | Jumlah PKK | Satuan |
|----|-------|------------|--------|
| 1 | 2020 | 361 | PKK |
| 2 | 2021 | 361 | PKK |
| 3 | 2022 | 361 | PKK |
| 4 | 2023 | 362 | PKK |

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

Tabel 3.5.4 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kab.Banggai

| No | Tahun | Jumlah LPM | Satuan |
|----|-------|------------|--------|
| 1 | 2020 | 337 | LPM |
| 2 | 2021 | 337 | LPM |
| 3 | 2022 | 337 | LPM |
| 4 | 2023 | 337 | LPM |

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

Tabel 3.5.5 Jumlah Kantor Pemerintah Desa atau Sarana Prasarana Kab.Banggai

| No | Tahun | Jumlah Kantor Pemerintah Desa atau Sarana Prasarana | Satuan |
|----|-------|---|--------|
| 1 | 2020 | 291 | Unit |
| 2 | 2021 | 291 | Unit |
| 3 | 2022 | 291 | Unit |
| 4 | 2023 | 291 | Unit |

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai

3.6 Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan dan Kearsipan adalah institusi yang memiliki peran penting dalam mengelola informasi, dokumentasi, serta arsip daerah. Fokus utamanya mencakup pengelolaan perpustakaan sebagai pusat literasi dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan arsip sebagai bagian dari manajemen informasi dan pelestarian sejarah daerah.

A. Tugas utama

❖ Perpustakaan:

- Menyediakan koleksi bahan pustaka (buku, majalah, jurnal, dll.) untuk masyarakat.
- Meningkatkan budaya literasi melalui program edukasi, pelatihan, dan layanan baca.
- Menyediakan akses teknologi informasi dalam mendukung pembelajaran berbasis digital.

❖ Kearsipan:

- Mengelola arsip daerah sebagai sumber informasi strategis.
- Menyusun kebijakan terkait pengelolaan dokumen resmi pemerintahan.

- Melakukan preservasi arsip bersejarah untuk pelestarian warisan budaya lokal.

B. Fungsi Utama

- Memberikan layanan informasi kepada masyarakat.
- Menyediakan dukungan untuk pendidikan formal dan nonformal.
- Mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui pengelolaan arsip yang baik.
- Melestarikan dokumen-dokumen penting yang bernilai sejarah.

C. Program dan Inisiatif

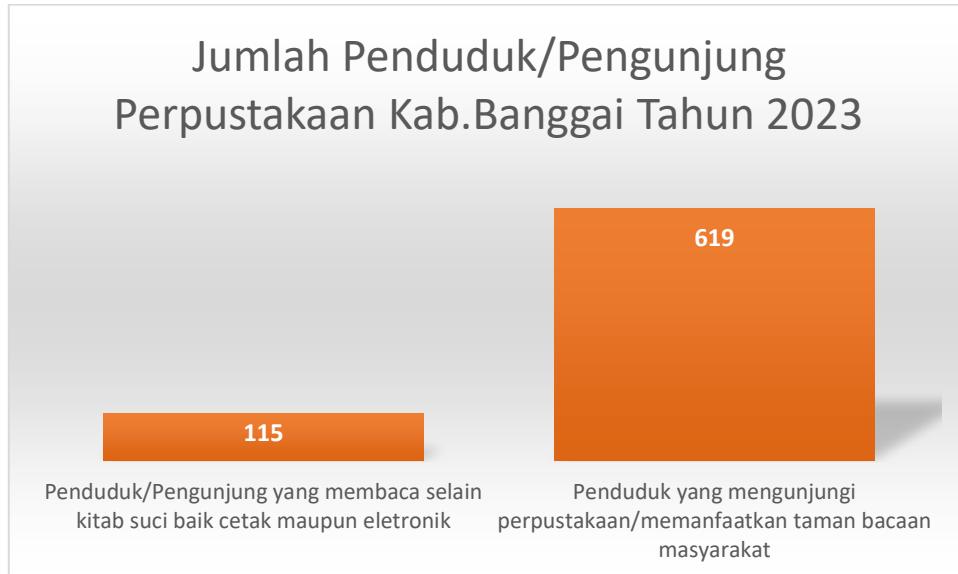
1. Digitalisasi Arsip: Transformasi arsip fisik menjadi arsip digital untuk memudahkan akses dan melindungi dari risiko kerusakan.
2. Pojok Literasi: Ruang baca khusus di berbagai kecamatan untuk mendekatkan akses literasi ke masyarakat.
3. Pelatihan Literasi Digital: Membantu masyarakat memahami teknologi dan cara mengakses informasi digital.
4. Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif: Menjaga kelangsungan data pemerintahan dan layanan publik yang efektif.

Tabel 3.6.1 Jumlah Penduduk/Pengunjung Perpustakaan Kab.Banggai Tahun 2023

| No | Indikator | Jumlah | Satuan |
|----|---|--------|--------|
| 1 | Penduduk/Pengunjung yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik | 115 | Orang |
| 2 | Penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat | 619 | Orang |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Banggai

Gambar 3.6.1 Jumlah Penduduk/Pengunjung Perpustakaan Kab.Banggai Tahun 2023



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Banggai

Tabel 3.6.2 Jumlah Peminjam Koleksi Perpustakaan Kab.Banggai Tahun 2020-2023

| No | Tahun | Jumlah Peminjam Koleksi Perpustakaan | Satuan |
|----|-------|--------------------------------------|--------|
| 1 | 2020 | 220 | Buku |
| 2 | 2021 | 172 | Buku |
| 3 | 2022 | 214 | Buku |
| 4 | 2023 | 132 | Buku |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Banggai

Gambar 3.6.2 Jumlah Peminjam Koleksi Perpustakaan Kab.Banggai Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Banggai

Tabel 3.6.3 Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Kab.Banggai Tahun 2020-2023

| No | Tahun | Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan | Satuan |
|----|-------|---|----------|
| 1 | 2020 | 41860 | Exemplar |
| 2 | 2021 | 43634 | Exemplar |
| 3 | 2022 | 43634 | Exemplar |
| 4 | 2023 | 43863 | Exemplar |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Banggai

Gambar 3.6.3 Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Kab.Banggai
Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Banggai

Tabel 3.6.4 Jumlah Perpustakaan Umum Desa atau Kelurahan dan Perpustakaan
Khusus yang Terkelola Baik Tahun 2020-2023

| No | Tahun | Jumlah Perpustakaan Umum Desa atau Kelurahan dan Perpustakaan Khusus yang Terkelola Baik | Satuan |
|----|-------|--|----------|
| 1 | 2020 | 19 | Exemplar |
| 2 | 2021 | 19 | Exemplar |
| 3 | 2022 | 19 | Exemplar |
| 4 | 2023 | 19 | Exemplar |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Banggai

Tabel 3.6.5 Persentase Arsip Dokumen Daerah Dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2023

| No | Tahun | Persentase Arsip Dokumen Daerah Dalam Kondisi Baik | Satuan |
|----|-------|--|------------|
| 1 | 2020 | 75 | Persentase |
| 2 | 2021 | 75 | Persentase |
| 3 | 2022 | 85 | Persentase |
| 4 | 2023 | 90 | Persentase |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Banggai

Tabel 3.6.6 Persentase Arsip Statis dan Dinamis yang Dikelola Tahun 2020-2023

| No | Tahun | Persentase Arsip Statis dan Dinamis yang Dikelola | Satuan |
|----|-------|---|------------|
| 1 | 2020 | 2 | Persentase |
| 2 | 2021 | 2 | Persentase |
| 3 | 2022 | 3 | Persentase |
| 4 | 2023 | 5 | Persentase |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Banggai

Tabel 3.6.7 Persentase Sarpas Kearsipan dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2023

| No | Tahun | Persentase Sarpas Kearsipan dalam Kondisi Baik | Satuan |
|----|-------|--|------------|
| 1 | 2020 | 100 | Persentase |
| 2 | 2021 | 100 | Persentase |
| 3 | 2022 | 100 | Persentase |
| 4 | 2023 | 100 | Persentase |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Banggai

3.7 Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan serta transmigrasi.

A. Tugas utama:

❖ Ketenagakerjaan:

- Pengembangan tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan.
- Penempatan kerja, baik di tingkat lokal maupun di luar daerah.
- Perlindungan dan pengawasan hubungan industrial serta kesejahteraan tenaga kerja.

❖ Transmigrasi:

- Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi untuk meningkatkan pemerataan penduduk.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran melalui penyediaan sarana dan prasarana.

B. Visi dan Misi

Dinas ini umumnya memiliki visi dan misi yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah, seperti:

- Visi: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menciptakan lapangan kerja yang produktif.
- Misi: Menyediakan layanan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang berbasis teknologi, efektif, dan efisien.

C. Program Kerja

Beberapa program kerja yang biasanya dijalankan:

- Pelatihan Tenaga Kerja: Untuk meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan industri.

- Fasilitasi Penempatan Kerja: Termasuk job fair atau kerjasama dengan perusahaan.
- Pengembangan Kawasan Transmigrasi: Dalam rangka mengoptimalkan potensi wilayah baru.

**Tabel 3.7.1 Jumlah Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
Tahun 2020-2023**

| No | Tahun | Jumlah Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek | Satuan |
|----|-------|---|--------|
| 1 | 2020 | 7896 | Orang |
| 2 | 2021 | 8279 | Orang |
| 3 | 2022 | 22042 | Orang |
| 4 | 2023 | 22044 | Orang |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banggai

Tabel 3.7.2 Jumlah Pekerja/Buruh yang Ter-PHK Tahun 2020-2023

| No | Tahun | Jumlah Pekerja/Buruh yang Ter-PHK | Satuan |
|----|-------|-----------------------------------|--------|
| 1 | 2020 | 64 | Orang |
| 2 | 2021 | 14 | Orang |
| 3 | 2022 | 19 | Orang |
| 4 | 2023 | 21 | Orang |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banggai

Tabel 3.7.3 Jumlah Pengangguran yang Dilatih Tahun 2020-2023

| No | Tahun | Jumlah Pengangguran yang Dilatih | Satuan |
|----|-------|----------------------------------|--------|
| 1 | 2020 | 96 | Orang |
| 2 | 2021 | 160 | Orang |
| 3 | 2022 | 240 | Orang |
| 4 | 2023 | 174 | Orang |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banggai

Tabel 3.7.4 Jumlah Perselisihan Kepentingan Tahun 2020-2023

| No | Tahun | Jumlah Perselisihan Kepentingan | Satuan |
|----|-------|---------------------------------|--------|
| 1 | 2020 | 64 | Kasus |
| 2 | 2021 | 131 | Kasus |
| 3 | 2022 | 151 | Kasus |
| 4 | 2023 | 22 | Kasus |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banggai

Tabel 3.7.5 Jumlah Perselisihan PHK Tahun 2020-2023

| No | Tahun | Jumlah Perselisihan PHK | Satuan |
|----|-------|-------------------------|--------|
| 1 | 2020 | 64 | Kasus |
| 2 | 2021 | 14 | Kasus |
| 3 | 2022 | 19 | Kasus |
| 4 | 2023 | 21 | Kasus |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banggai

Tabel 3.7.6 Jumlah Perselisihan yang Diselesaikan Melalui Perundingan Bipartite
Tahun 2020-2023

| No | Tahun | Jumlah Perselisihan yang Diselesaikan Melalui Perundingan Bipartite | Satuan |
|----|-------|--|--------|
| 1 | 2020 | 64 | Kasus |
| 2 | 2021 | 8 | Kasus |
| 3 | 2022 | 0 | Kasus |
| 4 | 2023 | 0 | Kasus |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banggai

Tabel 3.7.7 Jumlah Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten/Kota yang Diberdayakan
Tahun 2020-2023

| No | Tahun | Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten/Kota yang Diberdayakan | Satuan |
|----|-------|--|---------|
| 1 | 2020 | 1 | Lembaga |
| 2 | 2021 | 1 | Lembaga |
| 3 | 2022 | 1 | Lembaga |
| 4 | 2023 | 0 | Lembaga |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banggai

Tabel 3.7.8 Jumlah Lulusan Bersertifikat Kompetensi Tahun 2020-2023

| No | Tahun | Lulusan Bersertifikat Kompetensi | Satuan |
|----|-------|----------------------------------|--------|
| 1 | 2020 | 16 | Orang |
| 2 | 2021 | 40 | Orang |
| 3 | 2022 | 112 | Orang |
| 4 | 2023 | 54 | Orang |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banggai

Tabel 3.7.9 Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan Tahun 2020-2023

| No | Tahun | Lulusan Bersertifikat Pelatihan | Satuan |
|----|-------|---------------------------------|------------|
| 1 | 2020 | 100 | Persentase |
| 2 | 2021 | 100 | Persentase |
| 3 | 2022 | 100 | Persentase |
| 4 | 2023 | 100 | Persentase |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banggai

Tabel 3.7.10 Persentase LPK yang Terakreditasi Tahun 2020-2023

| No | Tahun | LPK yang Terakreditasi | Satuan |
|----|-------|------------------------|------------|
| 1 | 2020 | 84,62 | Persentase |
| 2 | 2021 | 84,62 | Persentase |
| 3 | 2022 | 84,62 | Persentase |
| 4 | 2023 | 84,62 | Persentase |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Banggai

3.8 Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah organisasi perangkat daerah yang berperan penting dalam melaksanakan tugas-tugas strategis terkait beberapa aspek, yaitu:

1. Pengendalian Penduduk

Fokus pada upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana (KB) serta perencanaan berbasis data kependudukan.

2. Keluarga Berencana (KB)

Melaksanakan program untuk mendorong keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan sumber daya yang tersedia, termasuk pemberian pelayanan KB dan edukasi masyarakat.

3. Pemberdayaan Perempuan

Bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik, serta mendorong kesetaraan gender.

4. Perlindungan Anak

Memastikan hak-hak anak terpenuhi, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksplorasi, dan diskriminasi, serta menyediakan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

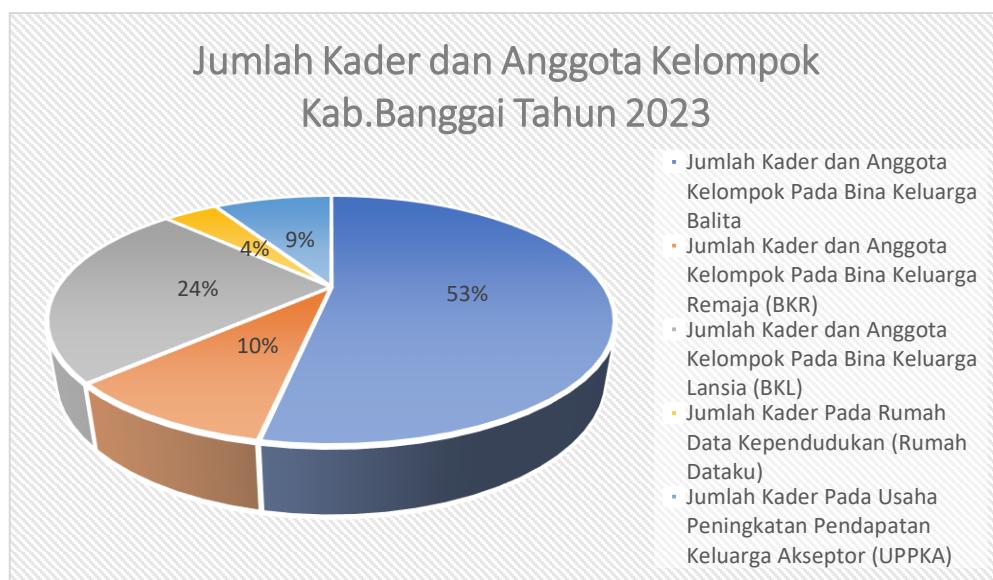
Dinas ini bekerja sama dengan instansi terkait, pemerintah desa/kelurahan, organisasi masyarakat, dan mitra lainnya untuk memastikan pelaksanaan program yang efektif di tingkat daerah. Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) dinas ini biasanya mencerminkan kebutuhan lokal dan prioritas pembangunan Kabupaten Banggai.

Tabel 3.8.1 Jumlah Kader dan Anggota Kelompok Kab.Banggai Tahun 2023

| No | Indikator | Jumlah | Satuan |
|----|--|--------|----------------|
| 1 | Jumlah Kader dan Anggota Kelompok Pada Bina Keluarga Balita | 641 | Kelompok/Orang |
| 2 | Jumlah Kader dan Anggota Kelompok Pada Bina Keluarga Remaja (BKR) | 119 | Kelompok/Orang |
| 3 | Jumlah Kader dan Anggota Kelompok Pada Bina Keluarga Lansia (BKL) | 293 | Kelompok/Orang |
| 4 | Jumlah Kader Pada Rumah Data Kependudukan (Rumah Dataku) | 48 | Kelompok/Orang |
| 5 | Jumlah Kader Pada Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 105 | Kelompok/Orang |

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab.Banggai

Gambar 3.8.1 Jumlah Kader dan Anggota Kelompok Kab.Banggai Tahun 2023



Sumber: Dinas P2KBP3A Kab.Banggai

Tabel 3.8.2 Jumlah Anggota Kelompok Pada Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor Tahun 2021-2023

| No | Tahun | Anggota Kelompok Pada Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor | Satuan |
|----|-------|--|----------|
| 1 | 2021 | 70 | Kelompok |
| 2 | 2022 | 119 | Kelompok |
| 3 | 2023 | 149 | Kelompok |

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab.Banggai

Tabel 3.8.3 Jumlah Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Tahun 2021-2023

| No | Tahun | Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) | Satuan |
|----|-------|--|--------|
| 1 | 2021 | 16 | Unit |
| 2 | 2022 | 19 | Unit |
| 3 | 2023 | 23 | Unit |

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab.Banggai

Tabel 3.8.4 Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Berdasarkan Identitas dan Informasi Kelompok Tahun 2021-2023

| No | Tahun | Bina Keluarga Balita (BKB) Berdasarkan Identitas dan Informasi Kelompok | Satuan |
|----|-------|---|----------|
| 1 | 2021 | 45 | Kelompok |
| 2 | 2022 | 59 | Kelompok |
| 3 | 2023 | 88 | Kelompok |

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab.Banggai

Tabel 3.8.5 Jumlah Fasilitas Kesehatan (Faskes) Menurut Sasaran Dalam Pelayanan
Tahun 2021-2023

| No | Tahun | Fasilitas Kesehatan (Faskes) Menurut Sasaran Dalam Pelayanan | Satuan |
|----|-------|--|--------|
| 1 | 2021 | 15 | Unit |
| 2 | 2022 | 31 | Unit |
| 3 | 2023 | 31 | Unit |

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab.Banggai

Tabel 3.8.6 Jumlah Kampung Keluarga Berencana (KB) Berdasarkan Informasi yang Dimiliki (Desa/Kelurahan) Tahun 2021-2023

| No | Tahun | Kampung Keluarga Berencana (KB) Berdasarkan Informasi yang Dimiliki (Desa/Kelurahan) | Satuan |
|----|-------|--|--------|
| 1 | 2021 | 337 | Unit |
| 2 | 2022 | 337 | Unit |
| 3 | 2023 | 337 | Unit |

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab.Banggai

Tabel 3.8.7 Jumlah Kampung Keluarga Berencana (KB) berdasarkan Sarana yang Dimiliki dan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Tahun 2021-2023

| No | Tahun | Kampung Keluarga Berencana (KB) berdasarkan Sarana yang Dimiliki dan Pelaksanaan Mekanisme Operasional | Satuan |
|----|-------|--|--------|
| 1 | 2021 | - | Unit |
| 2 | 2022 | 25 | Unit |
| 3 | 2023 | 31 | Unit |

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab.Banggai

Tabel 3.8.8 Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Pos KB) Tahun 2021-2023

| No | Tahun | Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Pos KB) | Satuan |
|----|-------|---|-----------|
| 1 | 2021 | 337 | Institusi |
| 2 | 2022 | 337 | Institusi |
| 3 | 2023 | 337 | Institusi |

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab.Banggai

Tabel 3.8.9 Jumlah Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB) Tahun 2021-2023

| No | Tahun | Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB) | Satuan |
|----|-------|-------------------------------------|----------|
| 1 | 2021 | 12 | Kelompok |
| 2 | 2022 | 20 | Kelompok |
| 3 | 2023 | 21 | Kelompok |

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab.Banggai

Tabel 3.8.10 Jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Tahun 2021-2023

| No | Tahun | Petugas Lapangan Keluarga Berencana | Satuan |
|----|-------|-------------------------------------|----------|
| 1 | 2021 | 15 | Kelompok |
| 2 | 2022 | 29 | Kelompok |
| 3 | 2023 | 29 | Kelompok |

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab.Banggai

BAB IV

INFRASTRUKTUR

4.1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai adalah instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan bidang Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan di bidang Penataan Ruang
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan di bidang Penataan Ruang
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di Bidang Pekerjaan Umum dan di Bidang Penataan Ruang;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bidang Pekerjaan Umum dan di bidang Penataan Ruang
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Pekerjaan Umum dan di bidang Penataan Ruang;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di berbagai bidang, termasuk:

- Pengelolaan sumber daya air dan irigasi
- Pembangunan dan preservasi infrastruktur jalan dan jembatan.
- Pembangunan dan penataan gedung serta lingkungannya.
- Peningkatan kapasitas tenaga ahli konstruksi.
- Pengendalian dan pemanfaatan tata ruang daerah.

Adapun Data-data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebagai berikut :

Gambar 4.1.1 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas PUPR Tahun 2023

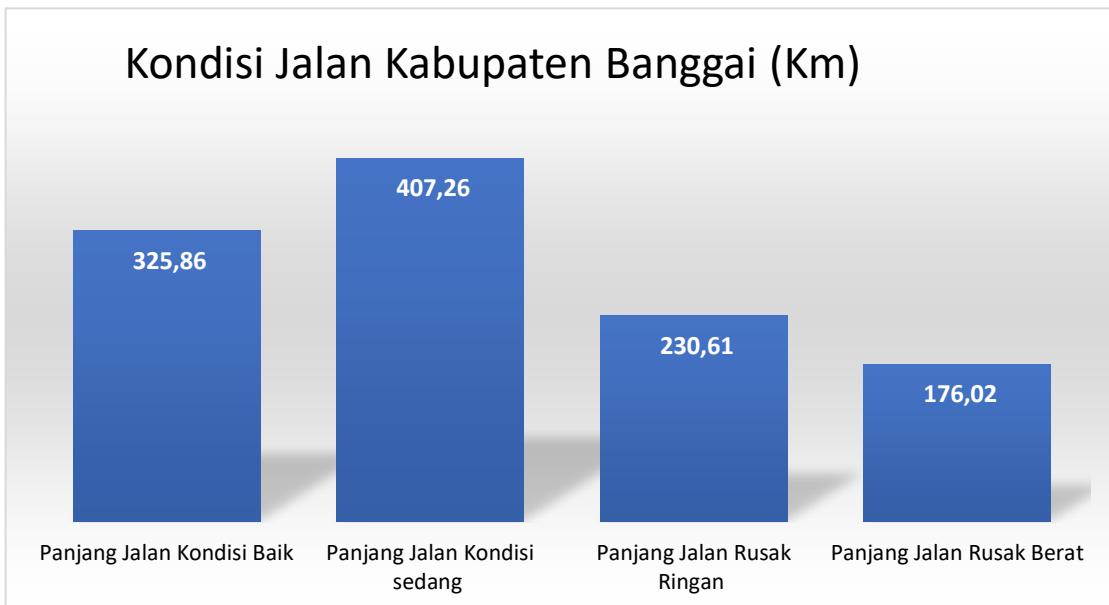
Gambar 4.1.2 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas PUPR Tahun 2023

Gambar 4.1.3 Jumlah Kondisi Jalan Kabupaten Banggai (Km) Tahun 2023



Sumber : Dinas PUPR Tahun 2023

Tabel 4.1.1 Capaian Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah dalam kondisi baik Tahun 2023

| No | Infrastruktur Dasar dan Wilayah | Realisasi |
|----|---|-----------|
| 1 | Irigasi kabupaten dalam kondisi baik | 63, 68 % |
| 2 | Rumah Tangga dengan akses air minum layak | 78, 11 % |
| 3 | Rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman | 82,74% |
| 4 | Bangunan Negara berfungsi baik | 47% |
| 5 | Jalan kabupaten dalam kondisi mantap | 69,90% |
| 6 | Pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi | 0% |
| 7 | Kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang | 80,00% |
| | Rata-rata Pencapaian | 60,20% |

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2023

Tabel 4.1.2 Infrastruktur dasar dan wilayah di Kabupaten Banggai Tahun 2023

| No | Infrastruktur Dasar dan wilayah | Jumlah Total | Kondisi | | |
|----|--------------------------------------|--------------|---------|-----------|---------|
| | | | Baik | Sedang | Rusak |
| 1 | Prasarana Jalan | 1.178,46 | 443,1 | 307,15 | 426,099 |
| 2 | Drainase Kabupaten | 17,01096 | 20,5 | 16,990.46 | 0 |
| 3 | Irigasi Kabupaten | 143.670 | 81,758 | 14,092 | 47,82 |
| 4 | Jumlah Bangunan Pemerintah Kabupaten | 241 | 165 | 38 | 10 |
| 5 | Jumlah Jembatan di Kabupaten | 3.169,84 | 2805,14 | 240,9 | 123,8 |

Sumber : PUPR Tahun 2023

4.2 Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Dinas Perkimtan) adalah instansi yang bertugas membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkimtan) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas Dinas Perkimtan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program
3. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas
4. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5. pemberian kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
6. pendukungan penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan

- keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
7. peningkatan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan
 8. pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
 9. pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pertanahan
 10. penunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya
 11. penjaminan terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Adapun Data-data pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Dinas Perkimtan) yaitu sebagai berikut :

Gambar 4.2.1 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kabupaten Banggai Tahun 2019-2023



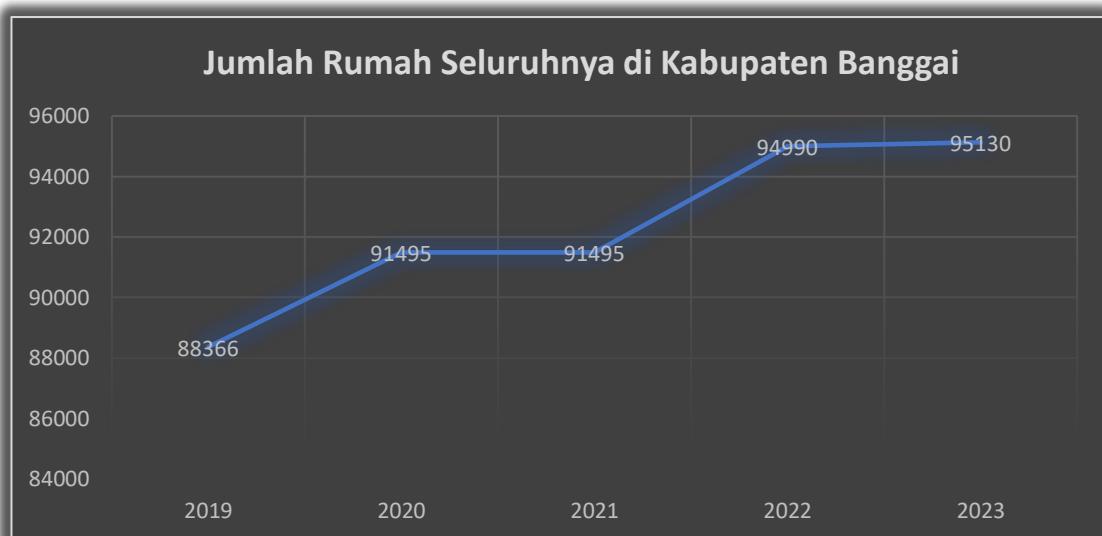
Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

Gambar 4.2.2 Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni Kabupaten Banggai Tahun 2028-2023



Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

Gambar 4.2.3 Jumlah Rumah Seluruhnya di Kabupaten Banggai Tahun 2019-2020



Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

Gambar 4.2.4 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019 - 2023



Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan telah menyusun Anggaran terkait Program Kegiatan yang mendukung Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai yaitu : Program Pengembangan Perumahan dan Kegiatannya yaitu, Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan : Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani dan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana. Dinas perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan juga telah menyiapkan data hasil identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana dan pengumpulan data korban bencana pada tahun 2023 dengan data sebagai berikut :

Tabel 4.2.1 Daftar Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Tahun 2023

| No | Kecamatan | Jenis Bencana | Desa | Jumlah Rumah | Jumlah KK | Jumlah Jiwa |
|--------------|-----------|-----------------------|---------------|--------------|------------|-------------|
| 1 | Nambo | Banjir | Nambo Lempek | 6 | 6 | 17 |
| | | Banjir | Koyoan Permai | 3 | 3 | 8 |
| | | Banjir | Padungyo | 31 | 34 | 103 |
| | | Banjir | Sayambongin | 21 | 27 | 96 |
| 2 | Kintom | Banjir | Salon Baru | 31 | 43 | 154 |
| | | Banjir | Salon | 40 | 51 | 185 |
| 3 | Pagimana | Banjir | Toipan | 5 | 5 | 17 |
| | | Banjir | Lambangan | 21 | 23 | 84 |
| | | Angin Putting Beliung | Gomuo | 2 | 2 | 5 |
| | | Angin Putting Beliung | Tempe | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Bunta | Banjir | Huhak | 1 | 1 | 4 |
| Total | | | | 163 | 197 | 679 |

Sumber : Dinas Permukiman Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

Tabel 4.2.2 Data rumah yang terkena bencana di tahun sebelumnya dan tahun 2023

| No | Tahun Terjadinya Bencana | Kecamatan | Desa | Jumlah Rumah | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan |
|--------------|--------------------------|------------------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 1 | 2022 | Balantak Selatan | Dondo | 53 | 17 | 13 | 20 |
| Total | | | | 53 | 17 | 13 | 20 |

Sumber : Dinas Permukiman Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

4.3 Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banggai adalah instansi pemerintah yang bertugas untuk merencanakan, mengelola, dan melaksanakan kebijakan serta program di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Tugas utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai antara lain:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Mengelola sumber daya alam yang ada di Kabupaten Banggai, termasuk perlindungan terhadap kawasan konservasi dan hutan.
2. Pengawasan Lingkungan: Melakukan pengawasan terhadap aktivitas industri, pertambangan, dan aktivitas lain yang berpotensi merusak lingkungan hidup di daerah tersebut.
3. Penyuluhan dan Edukasi Lingkungan: Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
4. Penyusunan Kebijakan dan Peraturan: Menyusun kebijakan dan peraturan daerah yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup di tingkat kabupaten.
5. Pengelolaan Sampah dan Limbah: Mengelola sampah dan limbah rumah tangga, industri, dan sektor lain dengan cara yang ramah lingkungan.
6. Pemantauan Kualitas Lingkungan: Melakukan pemantauan terhadap kualitas udara, air, tanah, serta faktor lingkungan lainnya untuk memastikan standar lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program-program, kegiatan, atau kontak langsung, biasanya bisa mengakses situs resmi pemerintah Kabupaten Banggai atau menghubungi Dinas Lingkungan Hidup setempat.

Tabel 4.3.1 Analis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022-2023

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Tahun 2023 | | Capaian Kinerja Tahun 2023 |
|----------------------------------|----------------------------------|--------|------------|-----------|----------------------------|
| | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 80,418 | 79,2 | 98,48 |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | | | 98,48 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Banggai. IKLH difokuskan pada media lingkungan air, udara dan tutupan lahan. IKLH menggambarkan kondisi kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan pada Kabupaten Banggai yang pengukurannya dilakukan pada setiap tahunnya. Kualitas air diukur pada sungai, kualitas udara diukur pada kawasan perumahan, transportasi, industri, dan perkantoran, sedangkan kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan indeks tutupan lahan.

Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Gambar 4.3.1 Indeks kualitas Air Tahun 2020-2023



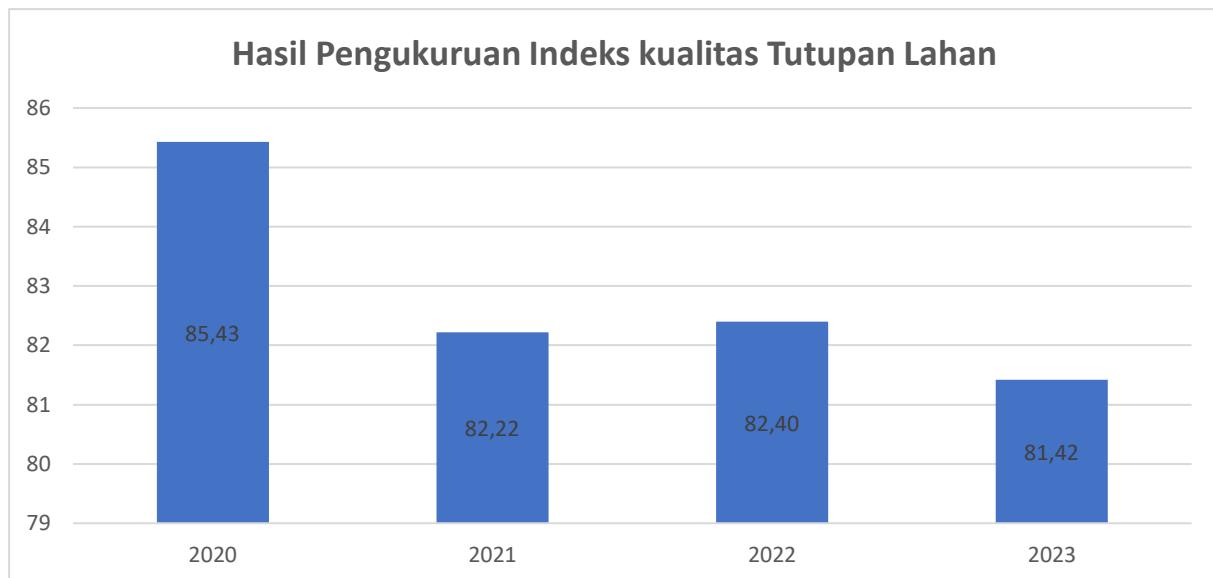
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Gambar 4.3.2 Indeks Kualitas Udara Tahun 2020-2023



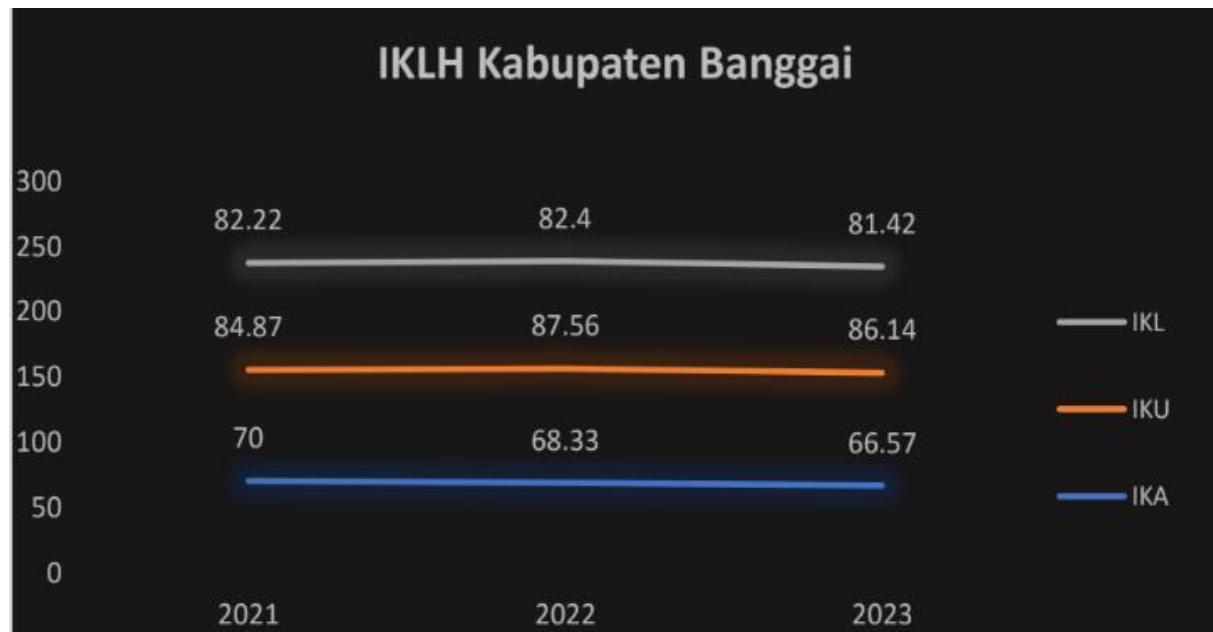
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Gambar 4.3.3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Gambar 4.3.4 Perbandingan IKA,IKU, dan IKL Kabupaten Banggai, 2021-2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

4.4 Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banggai adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengatur sektor perhubungan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Tugas utama Dinas Perhubungan adalah menciptakan sistem transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan, serta mendukung kelancaran mobilitas orang dan barang di wilayah Kabupaten Banggai.

Beberapa tugas dan fungsi utama Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai antara lain:

1. Pengelolaan Infrastruktur Transportasi: Dinas Perhubungan bertugas untuk merencanakan, membangun, dan memelihara infrastruktur transportasi di Kabupaten Banggai, seperti jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, dan fasilitas transportasi lainnya.
2. Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas: Mengatur dan mengawasi arus lalu lintas kendaraan bermotor, baik di jalan raya maupun di kawasan pelabuhan atau terminal, untuk memastikan kelancaran dan keamanan lalu lintas.
3. Pelayanan Transportasi Umum: Menyediakan layanan transportasi umum yang terjangkau, aman, dan efisien bagi masyarakat, serta mendorong penggunaan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan dan polusi.
4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi: Menjamin keselamatan transportasi dengan mengawasi dan memastikan kendaraan bermotor, angkutan umum, serta fasilitas transportasi lainnya memenuhi standar keselamatan.

5. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi: Menyusun kebijakan, peraturan, dan standar yang mengatur operasional sektor perhubungan di daerah, baik itu mengenai angkutan barang maupun orang.
6. Penyuluhan dan Edukasi Lalu Lintas: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas dan penggunaan moda transportasi yang tepat.
7. Pemantauan dan Penegakan Hukum: Memantau kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, serta melakukan penegakan hukum terkait pelanggaran yang terjadi di sektor perhubungan.
8. Pengelolaan Pelabuhan dan Transportasi Laut: Mengelola pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kabupaten Banggai dan memastikan kelancaran transportasi laut, yang merupakan moda transportasi penting bagi wilayah kepulauan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang program, kegiatan, atau layanan yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai, Anda bisa mengunjungi situs web resmi Pemerintah Kabupaten Banggai atau menghubungi langsung Dinas Perhubungan setempat.

Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi pada Peraturan Bupati Banggai Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai, adapun kendala yang dihadapi yakni :

- Dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor di mana pengujian kendaraan bermotor pada setiap kabupaten harus terakreditasi pada Kementerian Perhubungan

- Kendala yang dihadapi pada Pengadaan, Pemasangan, Pemeliharaan dan Penghapusan Rambu Lalu Lintas (APILL), pada tahun 2023 juga terkendala pada masalah anggaran dan
- Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan parkir yakni karena belum disediakan lahan atau lokasi parkir oleh Pemerintah Kabupaten Banggai.

Tabel 4.4.1 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja | Keterangan |
|----|--|--------|-----------------|------------------|
| 1 | Rasio konektivitas kabupaten/kota | Persen | 0,65 | Dokumen |
| 2 | Kinerja lalu lintas kabupaten/kota | Persen | 0,59 | Dokumen |
| 3 | jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia | Unit | 5 | Dokumen |
| 4 | jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan | Unit | 4 | Dokumen |
| 5 | jumlah kendaraan yang diuji per tahun | Unit | 1338 | Dokumen |
| 6 | jumlah kendaraan wajib uji | Unit | 9843 | Dokumen |
| 7 | jumlah penetapan tarif lintas penyebrangan | Rupiah | 0 | Surat Pernyataan |
| 8 | jumlah lintas penyebrangan dalam kabupaten atau kota | Unit | 1 | Surat Pernyataan |
| 9 | Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten/kota | Unit | 297 | Dokumen |
| 10 | Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota | Persen | 82,50 | Dokumen |
| 11 | Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C | Persen | 125,00% | Dokumen |

Sumber : Dinas Perhubungan 2023

BAB V

EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.1 Pangan

Dinas Ketahanan Pangan adalah salah satu instansi pemerintah daerah yang bertugas mengelola urusan terkait ketahanan pangan. Fokus utama dinas ini meliputi:

- A. Perencanaan dan Implementasi Ketahanan Pangan
 - Memastikan ketersediaan, distribusi, dan stabilitas harga pangan di wilayah Kabupaten Banggai.
 - Meningkatkan aksesibilitas pangan bagi seluruh masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan gizi.
- B. Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah
 - Menyediakan stok pangan strategis untuk situasi darurat atau bencana.
 - Mengelola distribusi pangan untuk kelompok rentan.
- C. Pengembangan Pertanian dan Perikanan Lokal
 - Mendorong produksi pangan lokal melalui dukungan kepada petani, nelayan, dan peternak.
 - Memberikan pelatihan dan akses teknologi pertanian serta pengelolaan sumber daya alam.
- D. Pengawasan Keamanan Pangan
 - Menjamin kualitas pangan yang beredar aman dan sehat bagi masyarakat.
 - Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam inspeksi dan sertifikasi produk pangan.
- E. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat
 - Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan bergizi.

- Mengkampanyekan ketahanan pangan berbasis rumah tangga, seperti urban farming dan diversifikasi pangan lokal.

Tabel 5.1.1 Pola Pangan Harapan (PPH) di Kab.Banggai 2023

| No | Indikator | Jumlah | Satuan |
|----|---|--------|--------|
| 1 | Pola Pangan Harapan (PPH) Padi Sawah | 25,0 | PPH |
| 2 | Pola Pangan Harapan (PPH) Umbi-Umbian | 1,3 | PPH |
| 3 | Pola Pangan Harapan (PPH) Hewani | 16,1 | PPH |
| 4 | Pola Pangan Harapan (PPH) Minyak dan Lemak | 5,0 | PPH |
| 5 | Pola Pangan Harapan (PPH) Buah/Biji Berminyak | 0,4 | PPH |
| 6 | Pola Pangan Harapan (PPH) Kacang-Kacangan | 4,5 | PPH |
| 7 | Pola Pangan Harapan (PPH) Gula | 2,1 | PPH |
| 8 | Pola Pangan Harapan (PPH) Sayur dan Buah | 28,4 | PPH |
| 9 | Skor PPH Kabupaten Banggai | 82,8 | PPH |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai

Gambar 5.1.1 Pola Pangan Harapan (PPH) di Kab.Banggai 2023



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai

Tabel 5.1.2 Jumlah Penyaluran Bibit Satu Juta Satu Pekarangan di Kab.Banggai 2023

| No | Indikator | Jumlah | Satuan |
|----|--|--------|----------------|
| 1 | Jumlah Penyaluran Bibit Satu Juta Satu Pekarangan | 300 | Kartu Keluarga |
| 2 | Jumlah Kecamatan Penyaluran Bibit Satu Juta Satu Pekarangan | 6 | Kecamatan |
| 3 | Jumlah Penyaluran Bibit Satu Juta Satu Pekarangan (Tanaman Cabai) | 7500 | Polibag |
| 4 | Jumlah Penyaluran Bibit Satu Juta Satu Pekarangan (Terong) | 7500 | Polibag |
| 5 | Jumlah Penyaluran Bibit Satu Juta Satu Pekarangan (Insektisida) | 300 | Botol |
| 6 | Jumlah Penyaluran Bibit Satu Juta Satu Pekarangan (Pupuk dan Pupuk Cair Biasa) | 600 | Kg/Botol |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai

Tabel 5.1.3 Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Satuan di Kab.Banggai 2023

| No | Indikator | Jumlah | Satuan |
|----|--|--------|------------|
| 1 | Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan | 63,33 | PPH |
| 2 | Pola Pangan Harapan (PPH) Energi/Kalori Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan | 7404 | Kalori |
| 3 | Pola Pangan Harapan (PPH) AKE Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan | 309 | Persentase |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai

Tabel 5.1.4 Angka Kecukupan Energi (AKE) Kab.Banggai Tahun 2021-2023

| No | Tahun | Angka Kecukupan Energi (AKE) | Satuan |
|----|-------|------------------------------|------------------|
| 1 | 2021 | 1915 | Kkal/Kapita/Hari |
| 2 | 2022 | 2058 | Kkal/Kapita/Hari |
| 3 | 2023 | 2093 | Kkal/Kapita/Hari |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai

Tabel 5.1.5 Angka Kecukupan Protein (AKP) Kab.Banggai Tahun 2021-2023

| No | Tahun | Angka Kecukupan Protein (AKP) | Satuan |
|----|-------|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2021 | 57,1 | Kkal/Kapita/Hari |
| 2 | 2022 | 58,8 | Kkal/Kapita/Hari |
| 3 | 2023 | 60,6 | Kkal/Kapita/Hari |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai

Tabel 5.1.6 Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab.Banggai Tahun 2021-2023

| No | Tahun | Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah | Satuan |
|----|-------|--|--------|
| 1 | 2021 | 20000 | Kg |
| 2 | 2022 | 18700 | Kg |
| 3 | 2023 | 22065 | Kg |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai

5.2 Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Banggai

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Fokus dinas ini meliputi:

A. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tanaman Pangan:

- Pengembangan varietas unggul lokal dan modern.
- Penyuluhan teknik budidaya tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai.
- Optimalisasi lahan dan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi.

2. Hortikultura:

- Promosi tanaman hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias.
- Peningkatan kualitas produk hortikultura agar memenuhi standar pasar.
- Pelatihan dan pemberdayaan petani hortikultura.

3. Perkebunan:

- Pengelolaan dan pengembangan komoditas perkebunan unggulan, seperti kelapa, kakao, dan cengkeh.
- Peningkatan produktivitas perkebunan rakyat melalui teknologi modern.
- Pengelolaan berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk komoditas perkebunan.

4. Program Dukungan:

- Penyediaan sarana produksi seperti bibit, pupuk, dan alat pertanian.
- Fasilitasi akses pasar dan pengembangan rantai distribusi.
- Penguatan kelembagaan petani, kelompok tani, dan koperasi

B. Visi dan Misi

- Visi: Mendukung Kabupaten Banggai sebagai daerah agraris yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam secara optimal.
- Misi:
 1. Meningkatkan ketahanan pangan daerah.
 2. Memperkuat daya saing produk hortikultura dan perkebunan.
 3. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui inovasi dan teknologi.

C. Program Unggulan

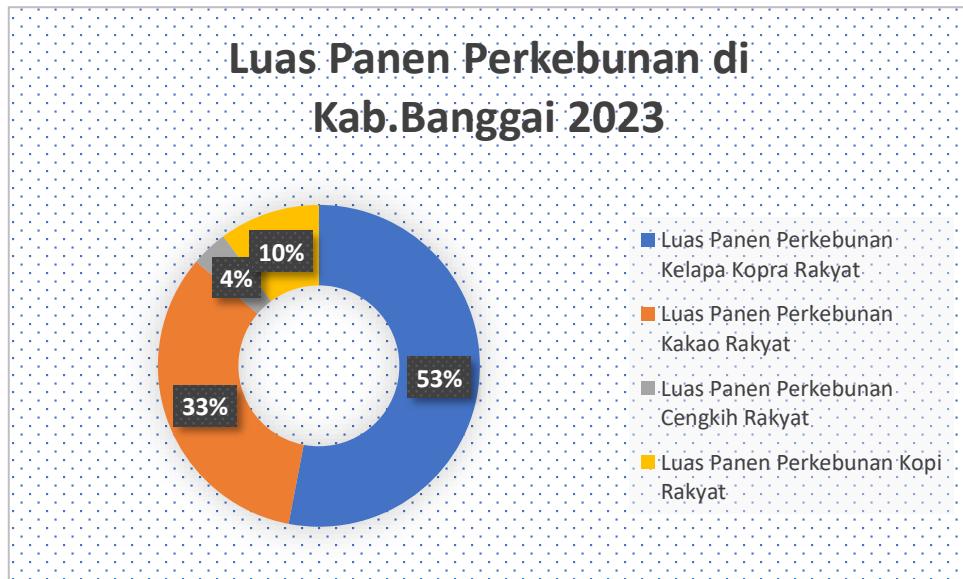
- Pengembangan *cluster* komoditas unggulan (seperti padi dan kelapa).
- Peningkatan kemampuan petani melalui pelatihan teknis.
- Pengelolaan lahan marginal menjadi produktif.
- Penerapan teknologi pertanian berbasis digital (pertanian cerdas).

Tabel 5.2.1 Jumlah Luas Panen Perkebunan di Kab.Banggai 2023

| No | Indikator | Jumlah | Satuan |
|----|---|----------|--------|
| 1 | Luas Panen Perkebunan Kelapa Kopra Rakyat | 40876,81 | Ha |
| 2 | Luas Panen Perkebunan Kakao Rakyat | 25591 | Ha |
| 3 | Luas Panen Perkebunan Cengkih Rakyat | 2827 | Ha |
| 4 | Luas Panen Perkebunan Kopi Rakyat | 7800 | Ha |

Sumber: Dinas TPHP Kab.Banggai

Gambar 5.2.1 Jumlah Luas Panen Perkebunan di Kab.Banggai 2023



Sumber: Dinas TPHP Kab.Banggai

Tabel 5.2.2 Jumlah Produksi Perkebunan di Kab.Banggai 2023

| No | Indikator | Jumlah | Satuan |
|----|--|----------|--------|
| 1 | Jumlah Produksi Perkebunan Kelapa Kopra Rakyat | 51283,56 | Ton |
| 2 | Jumlah Produksi Perkebunan Kakao Rakyat | 15975,93 | Ton |
| 3 | Jumlah Produksi Perkebunan Cengkikh Rakyat | 1270,15 | Ton |
| 4 | Jumlah Produksi Perkebunan Kopi Rakyat | 361,43 | Ton |

Sumber: Dinas TPHP Kab.Banggai

Gambar 5.2.2 Jumlah Produksi Perkebunan di Kab.Banggai 2023



Sumber: Dinas TPHP Kab.Banggai

Tabel 5.2.3 Jumlah Produktivitas Perkebunan di Kab.Banggai 2023

| No | Indikator | Jumlah | Satuan |
|----|---|--------|--------|
| 1 | Jumlah Produktivitas Perkebunan Kelapa Kpora Rakyat | 1,25 | KwHa |
| 2 | Jumlah Produktivitas Perkebunan Kakao Rakyat | 0,62 | KwHa |
| 3 | Jumlah Produktivitas Perkebunan Cengkoh Rakyat | 0,44 | KwHa |
| 4 | Jumlah Produktivitas Perkebunan Kopi Rakyat | 0,50 | KwHa |

Sumber: Dinas TPHP Kab.Banggai

Gambar 5.2.3 Jumlah Produktivitas Perkebunan di Kab.Banggai 2023



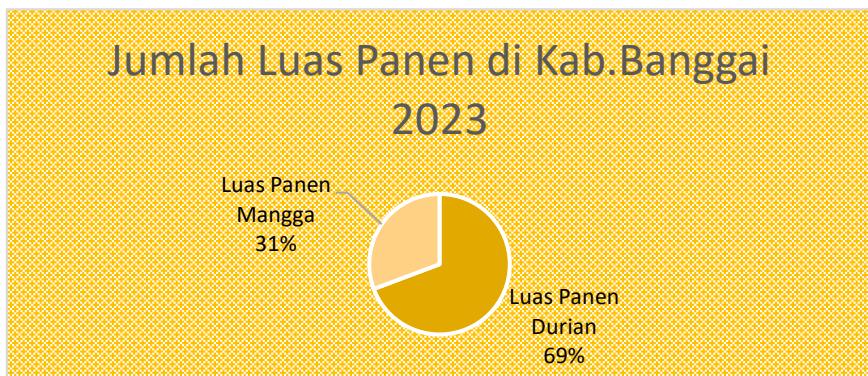
Sumber: Dinas TPHP Kab.Banggai

Tabel 5.2.4 Jumlah Luas Panen di Kab.Banggai 2023

| No | Indikator | Jumlah | Satuan |
|----|-------------------|--------|------------|
| 1 | Luas Panen Durian | 46982 | Ha (Pohon) |
| 2 | Luas Panen Mangga | 20843 | Ha (Pohon) |

Sumber: Dinas TPHP Kab.Banggai

Gambar 5.2.4 Jumlah Luas Panen di Kab.Banggai 2023



Sumber: Dinas TPHP Kab.Banggai

Tabel 5.2.5 Jumlah Produksi di Kab.Banggai 2023

| No | Indikator | Jumlah | Satuan |
|----|------------------------|----------|--------|
| 1 | Jumlah Produksi Mangga | 81016,47 | Ton |
| 2 | Jumlah Produksi Durian | 10657,30 | Ton |

Sumber: Dinas TPHP Kab.Banggai

Gambar 5.2.5 Jumlah Produksi di Kab.Banggai 2023



Sumber: Dinas TPHP Kab.Banggai

5.3 Pariwisata

Dinas Pariwisata adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola, mengembangkan, dan mempromosikan sektor pariwisata. Kabupaten Banggai dikenal dengan kekayaan alamnya yang meliputi pantai, pulau-pulau kecil, terumbu karang, dan keanekaragaman budaya lokal, yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Pengembangan Destinasi Wisata:
 - Meningkatkan kualitas destinasi wisata alam, budaya, dan buatan.
 - Membangun dan memperbaiki infrastruktur penunjang pariwisata seperti akses jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum.
2. Peningkatan Promosi Pariwisata:
 - Memperkenalkan potensi wisata Kabupaten Banggai melalui media digital, event pariwisata, dan kolaborasi dengan agen perjalanan.
 - Mengikuti pameran dan festival pariwisata nasional maupun internasional.
3. Pengelolaan Kebudayaan:
 - Melestarikan dan mempromosikan tradisi, seni, dan budaya lokal sebagai bagian dari daya tarik wisata.
 - Mendukung kegiatan seni dan budaya di tingkat lokal dan regional.
4. Penguatan Ekonomi Kreatif:
 - Mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata, seperti kerajinan tangan, kuliner khas, dan produk lokal lainnya.
 - Membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di sektor pariwisata untuk meningkatkan daya saing.

5. Pemberdayaan Masyarakat:

- Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata.
- Memberikan pelatihan kepada pelaku wisata seperti pemandu wisata dan pengelola homestay.

B. Potensi Wisata di Kabupaten Banggai

1. Wisata Alam:

- Pulau Dua: Dikenal dengan pemandangan indah dan terumbu karangnya yang memukau.
- Air Terjun Salodik: Air terjun bertingkat dengan suasana hutan tropis yang asri.
- Pantai Kilo Lima: Lokasi snorkeling yang menawarkan keindahan bawah laut.
- Gunung Batui: Tempat favorit bagi pendaki dan pecinta alam.

2. Wisata Bahari:

- Pulau Peling, dengan pantai berpasir putih dan ekosistem laut yang kaya.
- Ekowisata mangrove di beberapa kawasan pesisir.

3. Wisata Budaya:

- Festival budaya lokal, seperti pagelaran seni tradisional dan ritual adat masyarakat Banggai.
- Desa wisata berbasis budaya dan tradisi lokal.

C. Visi dan Misi

- Visi: Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai destinasi wisata unggulan berbasis alam, budaya, dan kearifan lokal yang berkelanjutan.
- Misi:
 1. Mengembangkan destinasi wisata berstandar internasional.

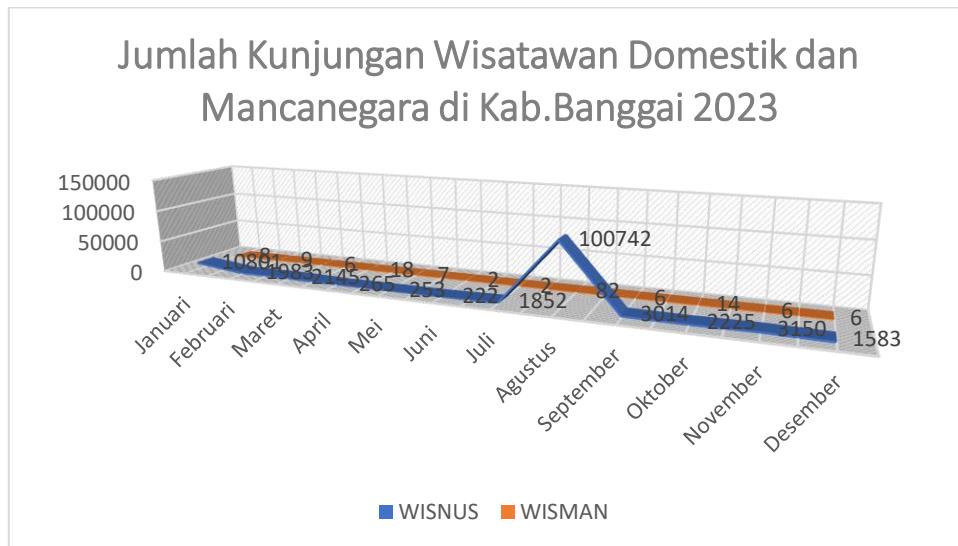
2. Melestarikan warisan budaya dan lingkungan sebagai aset pariwisata.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata.

Tabel 5.3.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kab.Banggai
2023

| BULAN | WISNUS | WISMAN | JUMLAH |
|---------------|---------------|------------|----------------|
| Januari | 10801 | 8 | 10809 |
| Februari | 1983 | 9 | 1992 |
| Maret | 2145 | 6 | 2151 |
| April | 265 | 18 | 283 |
| Mei | 253 | 7 | 260 |
| Juni | 222 | 2 | 224 |
| Juli | 1852 | 2 | 1854 |
| Agustus | 100742 | 82 | 100824 |
| September | 3014 | 6 | 3020 |
| Oktober | 2225 | 14 | 2239 |
| November | 3150 | 6 | 3156 |
| Desember | 1583 | 6 | 1589 |
| Jumlah | 128235 | 166 | 128,401 |

Sumber: Dinas Pariwisata Kab.Banggai

Gambar 5.3.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kab.Banggai 2023



Sumber: Dinas Pariwisata Kab.Banggai

Tabel 5.3.2 Jumlah Obyek Wisata di Kab.Banggai 2023

| No | Indikator | Jumlah | Satuan |
|----|----------------------------|--------|--------|
| 1 | Jumlah Obyek Wisata Alam | 82 | Unit |
| 2 | Jumlah Obyek Wisata Buatan | 12 | Unit |

Sumber: Dinas Pariwisata Kab.Banggai

Tabel 5.3.3 Jumlah Penginapan/Losmes Kab.Banggai Tahun 2021-2023

| No | Tahun | Jumlah Penginapan/Losmes | Satuan |
|----|-------|--------------------------|--------|
| 1 | 2021 | 13 | Unit |
| 2 | 2022 | 13 | Unit |
| 3 | 2023 | 13 | Unit |

Sumber: Dinas Pariwisata Kab.Banggai

Tabel 5.3.4 Total Spending of Money Kab.Banggai Tahun 2022-2023

| No | Tahun | Total Spending of Money | Satuan |
|----|-------|-------------------------|--------|
| 1 | 2022 | 6.238.675.000 M | Rupiah |
| 2 | 2023 | 6.295.000.000 M | Rupiah |

Sumber: Dinas Pariwisata Kab.Banggai

Tabel 5.3.5 Jumlah Hotel Kab.Banggai Tahun 2023

| No | Indikator | Jumlah | Satuan |
|----|-----------------------------|--------|--------|
| 1 | Jumlah Hotel Berbintang | 3 | Unit |
| 2 | Jumlah Hotel Non Berbintang | 57 | Unit |

Sumber: Dinas Pariwisata Kab.Banggai

Tabel 5.3.6 Jumlah Restoran/Rumah Makan Kab.Banggai Tahun 2021-2023

| No | Tahun | Jumlah Restoran/Rumah Makan | Satuan |
|----|-------|-----------------------------|--------|
| 1 | 2021 | 254 | Unit |
| 2 | 2022 | 447 | Unit |
| 3 | 2023 | 456 | Unit |

Sumber: Dinas Pariwisata Kab.Banggai

Tabel 5.3.7 Jumlah Kelompok Kesenian Kab.Banggai Tahun 2021-2023

| No | Tahun | Jumlah Kelompok Kesenian | Satuan |
|----|-------|--------------------------|----------|
| 1 | 2021 | 18 | Kelompok |
| 2 | 2022 | 18 | Kelompok |
| 3 | 2023 | 17 | Kelompok |

Sumber: Dinas Pariwisata Kab.Banggai

5.4 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah. Fokus utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah serta penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi masyarakat.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Pengembangan Koperasi:

- Membantu pembentukan dan pengelolaan koperasi yang sehat dan profesional.
- Memberikan pelatihan kepada pengurus koperasi tentang manajemen dan administrasi.
- Meningkatkan akses koperasi terhadap sumber pendanaan dan pasar.

2. Pemberdayaan UKM:

- Fasilitasi permodalan untuk pelaku usaha kecil dan menengah melalui kerja sama dengan lembaga keuangan.
- Pelatihan dan pendampingan dalam hal manajemen usaha, pemasaran, dan inovasi produk.
- Promosi dan pengembangan produk UKM melalui pameran, bazar, dan media digital.

3. Peningkatan Akses Pasar:

- Membantu pelaku UKM memperluas jaringan pemasaran, baik lokal, nasional, maupun internasional.
- Mendorong digitalisasi UKM untuk memanfaatkan platform e-commerce.

4. Pengembangan Ekonomi Lokal:
 - Mendorong pembentukan desa atau kecamatan mandiri berbasis koperasi dan UKM.
 - Mendukung penciptaan produk unggulan daerah.
5. Pengawasan dan Pembinaan:
 - Melakukan pengawasan terhadap koperasi agar beroperasi sesuai prinsip dan peraturan yang berlaku.
 - Membantu UKM memenuhi standar produk untuk memasuki pasar yang lebih luas.

B. Visi dan Misi

- Visi: Mewujudkan koperasi dan UKM Kabupaten Banggai yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.
- Misi:
 1. Memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi.
 2. Meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UKM.
 3. Mendorong inovasi dan digitalisasi dalam pengembangan koperasi dan UKM.
 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha mikro dan koperasi berbasis ekonomi kreatif.

C. Program Unggulan

1. Pembiayaan dan Pendanaan:
 - Program akses permodalan melalui kemitraan dengan perbankan atau dana bergulir.
 - Subsidi bunga untuk usaha mikro kecil.

2. Pelatihan dan Pemberdayaan:
 - Pelatihan kewirausahaan bagi generasi muda dan pelaku usaha mikro.
 - Pengembangan kapasitas manajemen koperasi dan UKM.
3. Pengembangan Produk Lokal:
 - Promosi produk UKM unggulan Banggai seperti kerajinan, olahan makanan khas, dan produk kreatif lainnya.
 - Sertifikasi halal, SNI, dan izin edar bagi produk UKM.
4. Transformasi Digital:
 - Pelatihan e-commerce dan pemasaran digital.
 - Bantuan platform teknologi untuk koperasi dan UKM.

Tabel 5.4.1 Data Pelaku Usaha Mikro Kab.Banggai Menurut Kecamatan Tahun 2023

| No | Wilayah | Sektor Usaha | | |
|--------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|
| | | Perdagangan | Home Industri | Jasa |
| 1 | Kec. Luwuk | 978 | 98 | 194 |
| 2 | Kec. Luwuk Selatan | 658 | 39 | 86 |
| 3 | Kec. Luwuk Utara | 503 | 86 | 66 |
| 4 | Kec. Luwuk Timur | 176 | 63 | 20 |
| 5 | Nambo | 138 | 97 | 33 |
| 6 | Kintom | 289 | 86 | 46 |
| 7 | Batui | 361 | 68 | 86 |
| 8 | Batui Selatan | 319 | 113 | 53 |
| 9 | Moilong | 478 | 161 | 107 |
| 10 | Toili | 825 | 275 | 241 |
| 11 | Toili Barat | 534 | 79 | 111 |
| 12 | Pagimana | 440 | 380 | 58 |
| 13 | Lobu | 35 | 18 | 7 |
| 14 | Bunta | 97 | 87 | 42 |
| 15 | Nuhon | 56 | 43 | 27 |
| 16 | Simpang Raya | 127 | 60 | 28 |
| 17 | Masama | 103 | 26 | 23 |
| 18 | Lamala | 142 | 71 | 36 |
| 19 | Mantoh | 129 | 13 | 18 |
| 20 | Balantak Selatan | 66 | 24 | 16 |
| 21 | Balantak | 151 | 74 | 35 |
| 22 | Balantak Utara | 66 | 14 | 18 |
| 23 | Bualemo | 281 | 48 | 40 |
| Total | | 6952 | 2023 | 1391 |

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Banggai

Tabel 5.4.2 Jumlah Koperasi Aktif Kab.Banggai Tahun 2020-2023

| No | Tahun | Jumlah Koperasi Aktif | Satuan |
|----|-------|-----------------------|--------|
| 1 | 2020 | 133 | Unit |
| 2 | 2021 | 149 | Unit |
| 3 | 2022 | 150 | Unit |
| 4 | 2023 | 155 | Unit |

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Banggai

Tabel 5.4.3 Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi Kab.Banggai Tahun 2020-2023

| No | Tahun | Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi | Satuan |
|----|-------|-------------------------------------|---------|
| 1 | 2020 | 44154 | Anggota |
| 2 | 2021 | 56618 | Anggota |
| 3 | 2022 | 59443 | Anggota |
| 4 | 2023 | 26264 | Anggota |

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Banggai

Tabel 5.4.4 Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra Kab.Banggai Tahun 2020-2023

| No | Tahun | Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra | Satuan |
|----|-------|---|------------|
| 1 | 2020 | 0,79 | Persentase |
| 2 | 2021 | 0,79 | Persentase |
| 3 | 2022 | 0,79 | Persentase |
| 4 | 2023 | 0,79 | Persentase |

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Banggai

Tabel 5.4.5 Persentase Fasilitas Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab.Banggai Tahun 2020-2023

| No | Tahun | Persentase Fasilitas Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan Untuk Koperasi | Satuan |
|----|-------|--|------------|
| 1 | 2020 | 3,1 | Persentase |
| 2 | 2021 | 3,06 | Persentase |
| 3 | 2022 | 3,01 | Persentase |
| 4 | 2023 | 3,57 | Persentase |

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Banggai

Tabel 5.4.6 Persentase Fasilitas Penerbitan Ijin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kasusaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab.Banggai Tahun 2020-2023

| No | Tahun | Persentase Fasilitas Penerbitan Ijin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kasusaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi | Satuan |
|----|-------|--|------------|
| 1 | 2020 | 10 | Persentase |
| 2 | 2021 | 10 | Persentase |
| 3 | 2022 | 15 | Persentase |
| 4 | 2023 | 18,18 | Persentase |

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Banggai

Tabel 5.4.7 Persentase Fasilitas Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab.Banggai Tahun 2020-2023

| No | Tahun | Persentase Fasilitas Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah | Satuan |
|----|-------|--|------------|
| 1 | 2020 | 46,24 | Persentase |
| 2 | 2021 | 46,03 | Persentase |
| 3 | 2022 | 50,79 | Persentase |
| 4 | 2023 | 50 | Persentase |

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Banggai

Tabel 5.4.8 Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab.Banggai Tahun 2020-2023

| No | Tahun | Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah | Satuan |
|----|-------|---|------------|
| 1 | 2020 | 28,9 | Persentase |
| 2 | 2021 | 15,87 | Persentase |
| 3 | 2022 | 58,2 | Persentase |
| 4 | 2023 | 32,47 | Persentase |

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Banggai

5.5 PERIKANAN

Dinas Perikanan Kabupaten Banggai adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola sektor perikanan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Dinas ini memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang ada di wilayah tersebut, termasuk perikanan laut, perikanan darat, serta pengembangan usaha perikanan.

Beberapa tugas utama Dinas Perikanan Kabupaten Banggai meliputi:

1. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan: Memastikan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, baik untuk perikanan tangkap maupun budidaya.
2. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan: Program-program untuk membantu nelayan dan pelaku usaha perikanan agar lebih sejahtera, misalnya melalui pelatihan, bantuan alat tangkap, dan akses pemasaran hasil perikanan.
3. Pemantauan dan Pengawasan: Melakukan pengawasan terhadap kegiatan perikanan di laut maupun di darat, serta melindungi lingkungan perairan dari kerusakan.
4. Pemberdayaan Masyarakat: Dinas ini juga terlibat dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan pelatihan di bidang perikanan.
5. Promosi Produk Perikanan Lokal: Memperkenalkan produk-produk perikanan dari Kabupaten Banggai ke pasar yang lebih luas, baik di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional.

Dinas Perikanan juga sering bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Banggai.

Berikut Data-data Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2023 yaitu Sebagai beriku :

Tabel 5.5.1 Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2023-2023

| No | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | Satuan Data |
|----|--|-------------|---------|----------|-------------|
| 1 | Produksi Ikan Budidaya Kolam Mas | 27560 | 95840 | 18700 | Kg |
| 2 | Produksi Ikan Budidaya Kolam Nila | 31200 | 92327 | 107750 | Kg |
| 3 | Produksi Ikan Budidaya Kolam Lele | 36934 | 53200 | 66510 | Kg |
| 4 | Produksi Ikan Air Payau Sistem Tambak Udang Vaname | 542672 | 2423000 | 25750000 | Kg |
| 5 | Produksi Ikan Budidaya Laut Rumput laut | 511500 | 46800 | 25750000 | Kg |
| 6 | Produksi Ikan Budidaya Kolam Patin | 5,556 | 5556 | 6556 | Kg |
| 7 | Produksi Ikan Budidaya Kolam Lele | 116.465.500 | 53200 | 52750 | Kg |

Sumber : Dinas Perikanan, 2023

Tabel 5.5.2 Jumlah Nilai Produksi Perikanan Tahun 20212023

| No | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | Satuan Data |
|----|--|-------------|-------------|------------|-------------|
| 1 | Nilai Produksi Ikan Budidaya Kolam Mas | 689000000 | 665000000 | 335000000 | Rupiah |
| 2 | Nilai Produksi Ikan Budidaya Kolam Nila | 780000000 | 2333179000 | 4833750000 | Rupiah |
| 3 | Nilai Produksi Ikan Air Payau Sistem Tambak Udang Vaname | 32560320000 | 1,45361E+11 | 149422000 | Rupiah |
| 4 | Nilai Produksi Ikan Budidaya Laut Rumput laut | 3580500000 | 235800000 | 238750000 | Rupiah |

Sumber : Dinas Perikanan, 2023

Tabel 5.5.3 Luas Area Budidaya Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2021-2023

| No | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | Satuan Data |
|----|--|--------|--------|--------|-------------|
| 1 | Luas Areal Budidaya Ikan Kolam | 149939 | 149939 | 149939 | Ha |
| 2 | Luas Areal Budidaya Ikan Mina Padi | 5000 | 5000 | 5000 | Ha |
| 3 | Luas Areal Budidaya Ikan Sistem Keramba | 2568 | 2568 | 2568 | Ha |
| 4 | Luas Areal Budidaya Ikan Air Payau Sistem Tambak | 583200 | 583200 | 583205 | Ha |
| 5 | Luas Areal Budidaya Ikan Budidaya KeLaut | 2640 | 2640 | 2640 | Ha |

Sumber : Dinas Perikanan, 2023

Tabel 5.5.4 Jumlah Rumah Tangga Pemilik Budidaya Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2021-2023

| No | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | Satuan Data |
|----|--|------|------|------|-------------|
| 1 | Jumlah Rumah Tangga Perikanan/Pemilik Ikan Kolam | 175 | 175 | 175 | RTP |
| 2 | Jumlah Rumah Tangga Perikanan/Pemilik Ikan Mina Padi | 21 | 21 | 21 | RTP |
| 3 | Jumlah Rumah Tangga Perikanan/Pemilik Ikan Air Payau Sistem Tambak | 350 | 352 | 348 | RTP |
| 4 | Jumlah Rumah Tangga Perikanan/Pemilik Ikan Budidaya Ikan Laut | 1125 | 1144 | 1174 | RTP |

Sumber : Dinas Perikanan, 2023

5.6 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai adalah instansi pemerintah yang bertugas untuk mengelola dan mengembangkan sektor peternakan serta kesehatan hewan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan peternak, kesehatan hewan, serta mendukung ketahanan pangan daerah.

Beberapa tugas utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai antara lain:

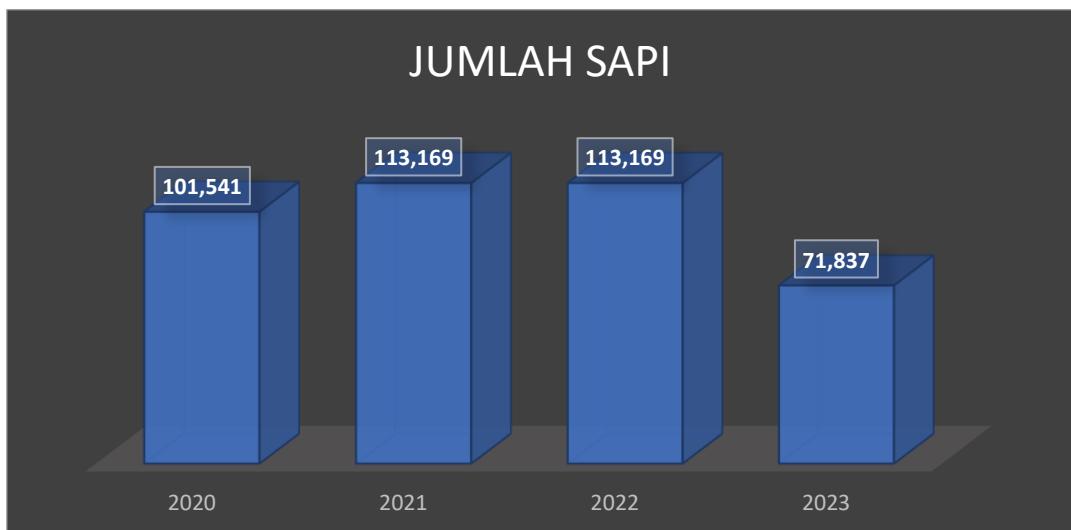
1. Pengembangan Sektor Peternakan: Menyusun dan melaksanakan kebijakan serta program untuk meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan, baik untuk ternak besar (seperti sapi, kerbau) maupun ternak kecil (seperti kambing, domba, ayam).
2. Kesehatan Hewan: Dinas ini bertanggung jawab untuk memantau dan mengendalikan penyakit hewan, melakukan vaksinasi, serta melakukan tindakan preventif dan kuratif terhadap penyakit yang dapat mengancam kesehatan hewan dan kesehatan manusia (zoonosis).
3. Pemberdayaan Peternak: Dinas ini memberikan pelatihan, penyuluhan, dan bantuan teknis kepada peternak untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang manajemen peternakan yang baik dan ramah lingkungan.
4. Pengawasan dan Regulasi: Melakukan pengawasan terhadap peredaran dan konsumsi produk peternakan, seperti daging, susu, dan telur, untuk memastikan produk tersebut aman dan memenuhi standar kualitas.
5. Penyuluhan dan Edukasi: Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait cara merawat hewan ternak, pencegahan penyakit, serta pentingnya sanitasi dan kebersihan dalam usaha peternakan.

6. Peningkatan Infrastruktur Peternakan: Dinas ini juga berperan dalam peningkatan fasilitas pendukung sektor peternakan, seperti tempat pengolahan pakan ternak, fasilitas kesehatan hewan, dan infrastruktur pasar ternak.
7. Keamanan Pangan: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga berperan dalam memastikan bahwa produk peternakan yang beredar aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, serta tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan.

Melalui program-program tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai berupaya untuk mendukung keberlanjutan sektor peternakan, meningkatkan kualitas hidup peternak, serta menjaga keberlanjutan pasokan pangan asal hewan di daerah ini.

Berikut data-data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan :

Gambar 5.6.1 Jumlah sapi kabupaten banggai Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 202

Gambar 5.6.2 Jumlah Kambing Kabupaten Banggai 2020-2023



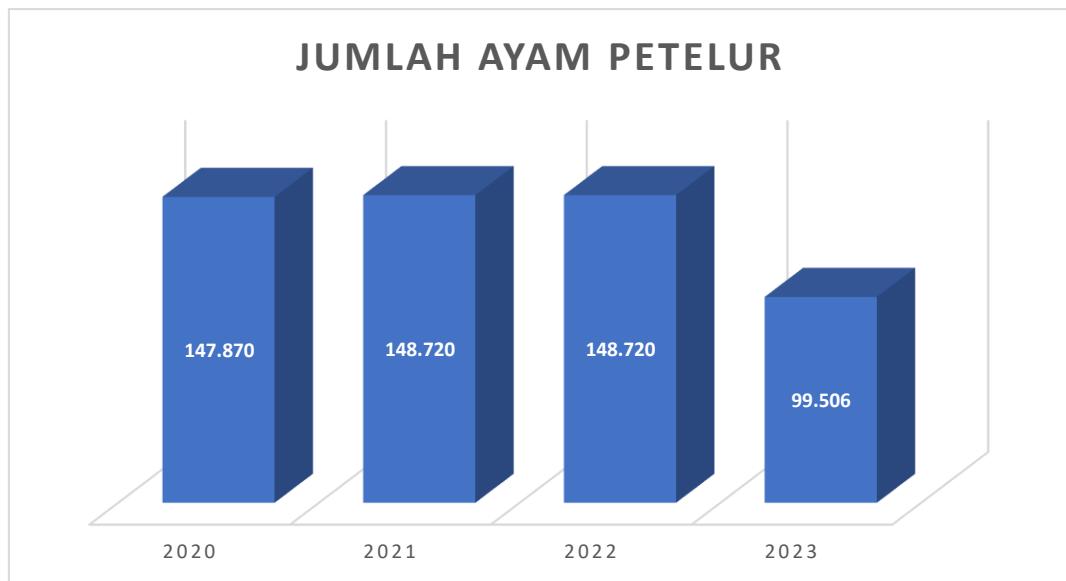
Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2023

Gambar 5.6.3 Jumlah Babi Kabupaten Banggai Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2023

Gambar 5.6.4 Jumlah Ayam Petelur Kabupaten Banggai Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2023

Gambar 5.6.5 Jumlah Itik Kabupaten Banggai Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2023

5.7 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kabupaten Banggai adalah lembaga pemerintahan yang memiliki tugas utama dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai sumber, seperti pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya. Badan ini berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah dengan menyediakan dana yang diperlukan untuk menjalankan berbagai program pemerintah dan pelayanan publik.

Beberapa tugas utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai antara lain:

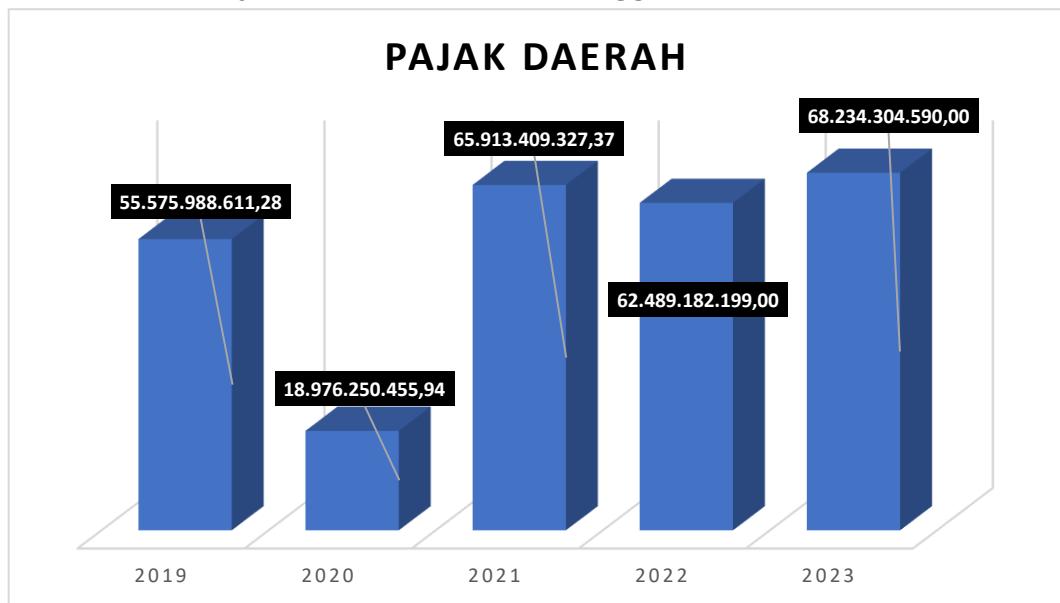
1. Pengelolaan Pajak Daerah: BPD bertanggung jawab atas pengelolaan pajak daerah yang meliputi pajak hotel, restoran, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, dan pajak lainnya. Pengumpulan pajak ini menjadi sumber utama pendapatan daerah.
2. Pengelolaan Retribusi Daerah: BPD juga mengelola retribusi daerah yang dikenakan untuk berbagai layanan atau kegiatan yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti retribusi pasar, retribusi tempat rekreasi, dan retribusi lainnya.
3. Perencanaan dan Penetapan Anggaran: Badan ini turut berperan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran daerah berdasarkan proyeksi pendapatan yang dapat diperoleh dari pajak dan retribusi.
4. Pemungutan dan Pengawasan: BPD bertugas untuk memungut pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melakukan pengawasan agar proses pemungutan berjalan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum.
5. Sosialisasi dan Edukasi: BPD melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pajak dan retribusi, serta pentingnya pembayaran pajak untuk mendukung pembangunan daerah. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
6. Pengelolaan Sumber Pendapatan Lainnya: Selain pajak dan retribusi, BPD juga mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah, seperti hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil usaha daerah, dan pendapatan lainnya.

7. Peningkatan Efisiensi dan Transaksi Elektronik: Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai seringkali mengembangkan sistem pembayaran elektronik untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi mereka.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai berperan vital dalam mendukung keuangan daerah, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat setempat.

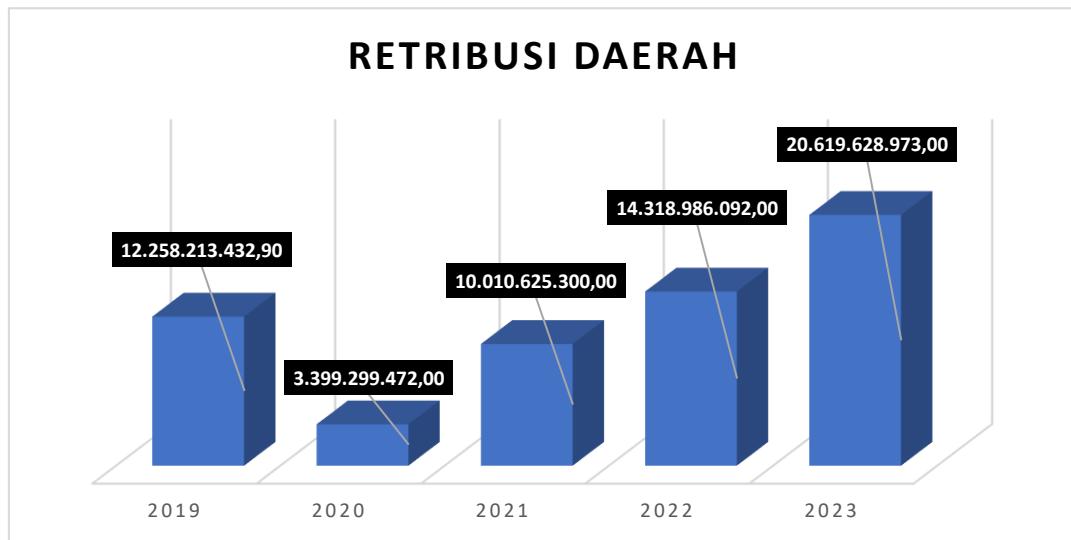
Berikut Data-data pada Badan Pendapatan Daerah :

Gambar 5.7.1 Pajak Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2010-2023



Sumber : Badan Pendapatan Daerah, 2023

Gambar 5.7.2 Jumlah Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pendapatan Daerah, 2023

Gambar 5.7.3 Jumlah Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pendapatan Daerah, 2023

Tabel 5.7.1 Data Statistik Sektoral Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai

| No | Indikator | 2022 | 2023 | Satuan Data |
|----|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | Realisasi Pendapatan Pajak Daerah | 62.489.182.199 | 68.234.304.590 | Milyar |
| 2 | Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah | 14.318.986.092 | 20.599.154.673 | Milyar |
| 3 | Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 3.962.201.303 | 5.714.244.284 | Milyar |
| 4 | Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah | 130.853.622.702 | 140.326.206.468 | Milyar |
| 5 | Anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan | 7.586.662.000 | 6.886.662.000 | Milyar |
| 6 | Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 1.500.000.000 | 2.000.000.000 | Milyar |
| 7 | Anggaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 25.000.000 | 50.000.000 | Milyar |
| 8 | Anggaran Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 10.790.000 | 45.790.000 | Milyar |
| 9 | Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.000.000.000 | 2.650.000.000 | Milyar |
| 10 | Anggaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 3.583.581.909 | 3.833.581.000 | Milyar |
| 11 | Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 150.000.000 | 225.000.000 | Milyar |
| 12 | Anggaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | - | 150.000.000 | Milyar |
| 13 | Anggaran Retribusi Terminal | 337.133.680 | 487.133.000 | Milyar |
| 14 | Anggaran Retribusi Tempat Khusus Parkir | 500.000.000 | 750.000.000 | Milyar |

| | | | | |
|----|--|---------------|----------------|--------|
| 15 | Anggaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan | 810.192.637 | 1.810.192.000 | Milyar |
| 16 | Anggaran Retribusi Izin Trayek | 52.662.500 | 77.662.000 | Milyar |
| 17 | Anggaran Retr. Tempat Peginapan/Pesanggrahan/Villa | 200.000.000 | 300.000.000 | Milyar |
| 18 | Anggaran Retr. Pemakaian Daerah Penyewaan & Tanah/Bangunan | 300.000.000 | 300.000.000 | Milyar |
| 19 | Anggaran Retribusi Rumah Potong Hewan | 350.628.700 | 400.628.000 | Milyar |
| 20 | Anggaran Retribusi Tempat Pelelangan | 376.691.148 | 401.691.000 | Milyar |
| 21 | Anggaran Retribusi Pelayanan Pasar | 2.108.300.635 | 2.108.300.000 | Milyar |
| 22 | Anggaran Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Ber Alkohol | 154.900.000 | 154.900.000 | Milyar |
| 23 | Anggaran Retribusi Tera/Tera Ulang | 552.530.000 | 1.592.535.486 | Milyar |
| 24 | Anggaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 50.000.000 | 75.000.000 | Milyar |
| 25 | Anggaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (DTW Pila Weanto Salodik) | 227.329.490 | 302.329.000 | Milyar |
| 26 | Anggaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) | 875.557.787 | 1.075.557.000 | Milyar |
| 27 | Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan | 5.974.651.473 | 11.316.728.808 | Milyar |
| 28 | Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 846.305.000 | 994.765.000 | Milyar |
| 29 | Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 9.900.000 | 7.500.000 | Milyar |

| | | | | |
|----|---|---------------|---------------|--------|
| 30 | Realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 17.800.000 | 19.000.000 | Milyar |
| 31 | Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 698.267.000 | 1.532.960.750 | Milyar |
| 32 | Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 2.098.213.953 | 906.496.085 | Milyar |
| 33 | Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 10.206.000 | 3.750.000 | Milyar |
| 34 | Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | - | 151.906.000 | Milyar |
| 35 | Realisasi Retribusi Terminal | 168.150.000 | 167.113.000 | Milyar |
| 36 | Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir | 261.639.000 | 232.410.000 | Milyar |
| 37 | Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan | 984.092.375 | 1.056.038.385 | Milyar |
| 38 | Realisasi Retribusi Izin Trayek | 3.825.000 | 1.275.000 | Milyar |
| 39 | Realisasi Retr. Tempat Peginapan/Pesanggrahan/Villa | 65.600.000 | 98.470.000 | Milyar |
| 40 | Realisasi Retr. Pemakaian Daerah Penyewaan & Tanah/Bangunan | 107.000.000 | 171.104.505 | Milyar |
| 41 | Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan | 219.360.800 | 163.939.000 | Milyar |
| 42 | Realisasi Retribusi Tempat Pelelangan | 161.362.665 | 127.158.440 | Milyar |
| 43 | Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar | 1.386.898.000 | 1.732.235.000 | Milyar |
| 44 | Realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Ber Alkohol | 39.500.000 | 49.500.000 | Milyar |
| 45 | Realisasi Retribusi Tera/Tera Ulang | 23.846.500 | 24.644.000 | Milyar |

| | | | | |
|----|---|-------------|-------------|--------|
| 46 | Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 25.260.000 | 18.140.000 | Milyar |
| 47 | Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (DTW Pila Weanto Salodik) | 186.752.500 | 240.460.000 | Milyar |
| 48 | Realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) | 774.309.926 | 933.366.300 | Milyar |
| 49 | Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Hotel | 50,02% | 78,79% | Persen |
| 50 | Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Restoran | 64,58% | 59,48% | Persen |
| 51 | Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Hiburan | 41,02% | 44,64% | Persen |
| 52 | Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Reklame | 56,38% | 44,13% | Persen |
| 53 | Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Penerangan Jalan | 72,53% | 76,12% | Persen |
| 54 | Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Parkir | 65,87% | 83,17% | Persen |
| 55 | Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah /Air Tanah | 59,61% | 15,19% | Persen |
| 56 | Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan | 55,85% | 70,23% | Persen |
| 57 | Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak BPHTB | 77,30% | 97,89% | Persen |
| 58 | Perbandingan Anggaran dan Realisasi PBB-P2 | 74,61% | 70,86% | Persen |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, 2023

5.8 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banggai adalah instansi pemerintah yang bertugas untuk mengelola dan memfasilitasi penanaman modal (investasi) serta memberikan pelayanan perizinan secara terintegrasi di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas ini memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Berikut beberapa tugas utama dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai:

- 1. Fasilitasi Penanaman Modal**

DPMPTSP bertanggung jawab untuk menarik investasi ke daerah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ini termasuk memberikan informasi tentang peluang investasi, prosedur investasi, dan manfaat yang bisa didapatkan oleh para investor. Dinas ini juga berperan dalam mengkoordinasikan antara investor dengan instansi terkait lainnya.

- 2. Pelayanan Perizinan Terpadu**

Salah satu fungsi utama DPMPTSP adalah memberikan pelayanan perizinan secara terintegrasi melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sistem ini mempermudah pengusaha atau investor dalam mengurus berbagai izin yang dibutuhkan, seperti izin usaha, izin lokasi, izin lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan izin lainnya. Proses perizinan ini dilakukan dengan cara yang lebih efisien dan transparan.

- 3. Penyederhanaan Prosedur Perizinan**

DPMPTSP berusaha untuk menyederhanakan prosedur perizinan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, baik yang berinvestasi maupun yang membutuhkan layanan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meminimalkan birokrasi yang rumit dan waktu yang lama dalam mengurus izin.

4. Pemberian Informasi dan Konsultasi

Dinas ini menyediakan berbagai informasi terkait investasi dan perizinan. DPMPTSP juga memberikan layanan konsultasi bagi masyarakat dan calon investor mengenai proses perizinan, kewajiban yang harus dipenuhi, serta potensi sektor usaha yang bisa dikembangkan di Kabupaten Banggai.

5. Pengawasan dan Evaluasi

Selain memberikan izin, DPMPTSP juga berfungsi untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan usaha yang telah mendapatkan izin. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendukung keberlanjutan investasi di daerah.

6. Promosi dan Pengembangan Investasi

DPMPTSP memiliki peran dalam mempromosikan potensi investasi yang ada di Kabupaten Banggai, baik melalui kegiatan pameran, seminar, maupun kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah pusat. Dinas ini juga terlibat dalam pengembangan sektor-sektor unggulan daerah yang dapat menarik minat investor.

7. Pelayanan Administrasi dan Layanan Non-Perizinan

Selain perizinan, DPMPTSP juga memberikan layanan administrasi terkait dengan sektor-sektor usaha yang tidak memerlukan izin formal, namun tetap membutuhkan pengaturan dan pengawasan dari pemerintah daerah.

8. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Dinas ini juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, penyuluhan, dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha lokal yang ingin mengembangkan usaha mereka, baik di bidang perdagangan, industri, pertanian, maupun pariwisata.

9. Digitalisasi Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai berupaya untuk melakukan digitalisasi dalam pelayanan, memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha mengakses layanan secara online, seperti pengajuan

izin atau konsultasi mengenai investasi. Ini untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan akses bagi masyarakat.

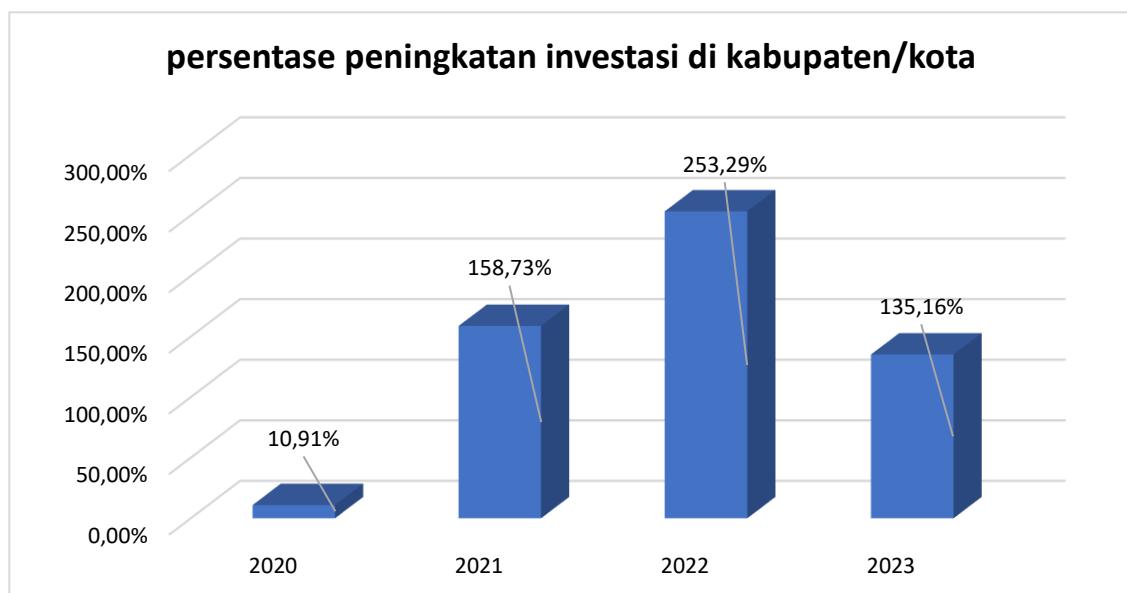
10. Koordinasi Antar Instansi

DPMPTSP juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan instansi terkait lainnya, baik di tingkat provinsi, pusat, maupun lembaga swasta, untuk memastikan investasi dan perizinan berjalan lancar.

Dengan adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai, diharapkan dapat tercipta iklim investasi yang kondusif, mempercepat proses perizinan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Berikut Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai yaitu Sebagai Berikut :

Gambar 5.8.1 Persentase persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Gambar 5.8.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Tabel 5.8.1 Data Statistik sektoral Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2023

| No | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|--|-------|-------|-------|
| 1 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | 216 | 393 | 477 |
| 2 | Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN | 730 | 2.940 | 633 |
| 3 | Jumlah seluruh PMA/PMDN | 216 | 540 | 700 |
| 4 | Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal | 13 | 7 | 6 |
| 5 | Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal | 1.546 | 4.004 | 6.330 |
| 6 | Laporan realisasi penanaman modal | 216 | 540 | 700 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

5.9 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Banggai adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola sektor perdagangan dan industri di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi daerah melalui peningkatan perdagangan, industri, serta memperkuat daya saing produk lokal.

Berikut adalah beberapa tugas utama dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai:

- 1. Pengembangan Sektor Perdagangan**

Dinas ini bertanggung jawab untuk mengatur dan mengembangkan sektor perdagangan di Kabupaten Banggai. Ini mencakup pengelolaan pasar tradisional dan modern, pengaturan distribusi barang, serta mengatur sistem perdagangan yang efisien dan transparan. Disperdagin juga bekerja untuk memastikan ketersediaan barang dan kebutuhan pokok di pasar dengan harga yang wajar.

- 2. Peningkatan Daya Saing Produk Lokal**

Salah satu tugas Disperdagin adalah meningkatkan daya saing produk lokal dari Kabupaten Banggai, baik di pasar lokal, nasional, maupun internasional. Ini dilakukan melalui promosi produk unggulan, pelatihan bagi pelaku usaha, serta pengembangan kemasan dan standar kualitas produk yang lebih baik.

- 3. Pembinaan dan Pengawasan Industri**

Dinas ini juga berfungsi untuk membina pelaku industri, baik industri kecil, menengah, maupun besar. Disperdagin membantu pengusaha dalam mengembangkan usaha mereka, memberikan informasi mengenai regulasi industri, serta melakukan pengawasan terhadap operasional industri untuk memastikan mereka berjalan sesuai dengan standar yang berlaku.

4. Fasilitasi Pemasaran Produk

Dinas Perdagangan dan Perindustrian turut berperan dalam memfasilitasi pemasaran produk lokal dengan mengadakan berbagai pameran, bazar, atau event promosi lainnya. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk-produk daerah Banggai ke pasar yang lebih luas, baik dalam maupun luar negeri.

5. Pengaturan dan Pengawasan Harga Barang

Disperdagin juga memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi harga barang di pasaran, khususnya barang-barang kebutuhan pokok agar tidak terjadi fluktuasi harga yang tinggi yang dapat merugikan konsumen. Hal ini termasuk pemantauan terhadap praktik perdagangan yang tidak sehat seperti penimbunan barang atau penipuan harga.

6. Pemberdayaan Pedagang dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Dinas ini memiliki fokus untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan pedagang serta pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Salah satu caranya adalah melalui pelatihan, pemberian fasilitas, atau bantuan untuk meningkatkan kualitas produk dan keterampilan manajerial bagi pelaku usaha.

7. Regulasi dan Kebijakan Perdagangan

Disperdagin merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta regulasi yang terkait dengan perdagangan dan industri di tingkat daerah. Ini termasuk mengatur izin usaha, aturan tentang perdagangan antar daerah, dan kebijakan lain yang mendukung pengembangan ekonomi daerah.

8. Pengembangan Infrastruktur Perdagangan dan Industri

Dinas ini berperan dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung sektor perdagangan dan industri, seperti pasar tradisional, gedung pertemuan, serta fasilitas pendukung bagi usaha industri, baik besar maupun kecil.

9. Pemantauan dan Evaluasi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan sektor perdagangan dan industri di Kabupaten Banggai.

Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sektor ini dan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan agar sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

10. Penyuluhan dan Edukasi

Disperdagin juga memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama pelaku usaha, mengenai pentingnya mengikuti peraturan, standar kualitas, serta cara-cara baru dalam berbisnis agar usaha mereka lebih berkembang dan berkelanjutan.

11. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Disperdagin turut terlibat dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Banggai, dengan menyediakan akses bagi pelaku usaha di sektor pariwisata dan produk-produk kreatif seperti kerajinan tangan, seni lokal, dan produk khas daerah.

Melalui berbagai tugas tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai berperan besar dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong daya saing produk lokal agar lebih dikenal dan diminati.

Tabel 5.9.1 Jumlah Pasar dan Jumlah Pedagang Kaki Lima Kabupaten Banggai Tahun 2021-2023

| No | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | Satuan Data |
|----|---------------------------|------|------|------|-------------|
| 1 | Jumlah pasar tradisional | 15 | 15 | 15 | Unit |
| 2 | Jumlah Pedagang Kaki Lima | 563 | 563 | 562 | Orang |

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2023

Tabel 5.9.2 Volume ekspor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai Tahun 2021-2023

| No | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | Satuan Data |
|----|--|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 1 | Volume Eksport Komoditi Hasil Perkebunan | 3.604.484,98 | 2.844.414,41 | 2029269,7 | KGM |
| 2 | Volume Eksport Komoditi Hasil Perikanan Dan Kelautan | 20.500 | 21,111 | 394021,21 | KGM |
| 3 | Volume Eksport Komoditi Hasil Minyak dan Gas | 57.596.144,99 | 80.536.821,28 | 735412,1 | TON |

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2023

Tabel 5.9.2 Jumlah Nilai Ekspor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai Tahun 2021-2023

| No | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Nilai Ekspor Total | 6.479.683.472.272,40 | 12,007,232,559,600 | 10,920,051,514,828,80 |
| 2 | Nilai Eksport Komoditi Hasil Perkebunan | 133,024,335,237,40 | 99,798,562,650 | 53,012,558,745,60 |
| 3 | Nilai Eksport Komoditi Hasil Perikanan Dan Kelautan | 1,000,526,780 | 270,962,500 | 37,126,042,060,80 |
| 4 | Nilai Eksport Komoditi Hasil Minyak dan Gas | 6.345.658.610.255 | 11,904,863,034,540 | 7,913,328,333,312,00 |
| 5 | Nilai FOB Komoditi Hasil Perkebunan | 133,024,335,237,40 | 99,798,562,650 | 53,012,558,745,60 |
| 6 | Nilai FOB Komoditi Hasil Perikanan Dan Kelautan | 1,000,526,780 | 270,962,500 | 37,126,042,060,80 |
| 7 | Nilai FOB Komoditi Hasil Minyak dan Gas | 6.345.658.610.255 | 11,904,863,034,540 | 7,913,328,333,312,00 |

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2023

BAB VI

PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPOL PP

6.1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk mengurangi risiko bencana, menangani penanggulangan bencana, serta membantu pemulihan pasca-bencana di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. BPBD berperan dalam memastikan kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap bencana alam, baik itu bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, atau bencana lainnya.

Berikut adalah beberapa tugas dan peran utama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai:

1. Perencanaan dan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

BPBD bertanggung jawab untuk menyusun rencana penanggulangan bencana di tingkat kabupaten. Rencana ini mencakup berbagai aspek, seperti mitigasi bencana, kesiapsiagaan, respon darurat, dan pemulihan pasca-bencana.

2. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat

BPBD melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai potensi bencana yang mungkin terjadi di daerah tersebut, serta bagaimana cara mengurangi risiko dan menyelamatkan diri ketika terjadi bencana.

3. Pelaksanaan Mitigasi Bencana

BPBD Kabupaten Banggai berperan aktif dalam kegiatan mitigasi bencana, yaitu upaya untuk mengurangi atau menghindari risiko bencana melalui berbagai kegiatan.

4. Kesiapsiagaan dan Latihan

BPBD rutin mengadakan latihan kesiapsiagaan bencana, baik untuk aparat pemerintah, masyarakat, maupun relawan. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan dalam menghadapi situasi darurat, termasuk evakuasi cepat, penyelamatan korban, serta penanganan bencana di lapangan.

5. Respon Darurat dan Penanganan Bencana

Salah satu tugas utama BPBD adalah melakukan koordinasi dan respon cepat ketika terjadi bencana. BPBD bertanggung jawab untuk mengerahkan tim reaksi cepat, memberikan bantuan darurat seperti makanan, obat-obatan, tempat pengungsian, serta memastikan proses evakuasi berjalan dengan lancar dan aman.

6. Pengelolaan Dana dan Logistik Bencana

BPBD mengelola dana yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana dan memastikan bantuan logistik tersedia saat dibutuhkan. Ini mencakup pengadaan perlengkapan evakuasi, obat-obatan, tenda pengungsian, serta kebutuhan mendesak lainnya yang diperlukan selama penanggulangan bencana.

7. Pemulihan Pasca-Bencana

Setelah bencana berlalu, BPBD bertugas untuk memimpin upaya pemulihan dengan memberikan bantuan kepada korban bencana, seperti rekonstruksi rumah yang rusak, penyediaan fasilitas kesehatan, serta bantuan sosial untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak.

8. Koordinasi Antar Instansi

BPBD berfungsi sebagai lembaga yang mengkoordinasikan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana, baik itu lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga swasta, maupun relawan. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa bantuan dan sumber daya dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

9. Penyusunan dan Pemantauan Peta Risiko Bencana

BPBD turut menyusun peta risiko bencana untuk memetakan daerah-daerah yang rawan bencana di Kabupaten Banggai. Peta ini berguna untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat dan pemerintah terkait area yang lebih rentan terhadap bencana, seperti wilayah rawan banjir, tanah longsor, atau gempa bumi.

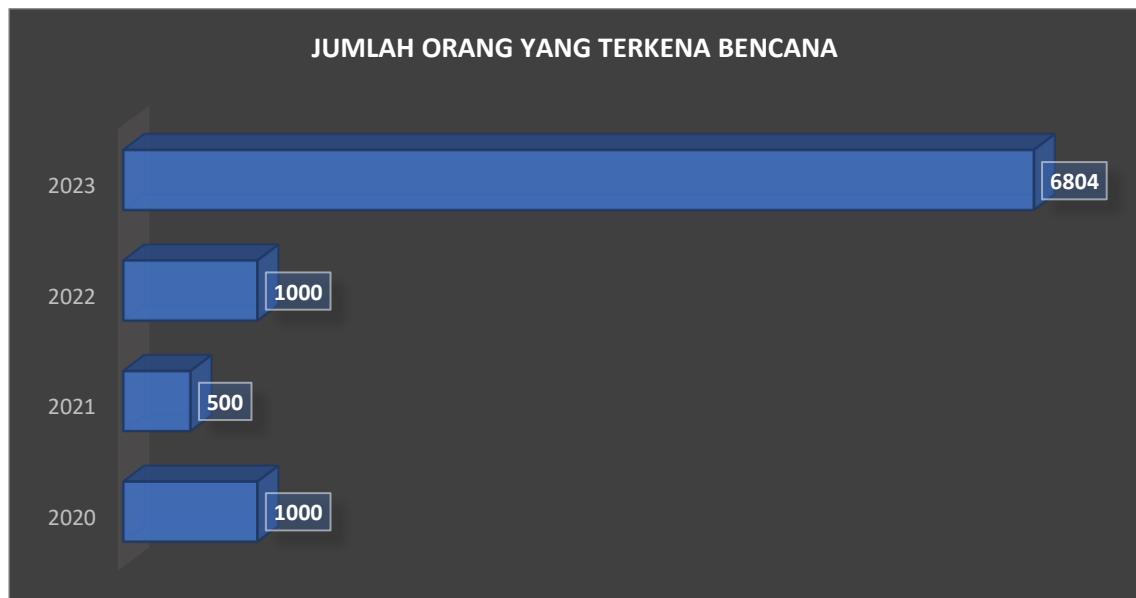
10. Advokasi Kebijakan Penanggulangan Bencana

BPBD juga berperan dalam advokasi kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ini termasuk mendorong pembuatan regulasi dan kebijakan yang dapat mengurangi dampak bencana serta mempersiapkan daerah lebih baik dalam menghadapi bencana di masa depan.

Melalui tugas-tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai berperan penting dalam memastikan masyarakat siap menghadapi potensi bencana, serta dapat mengurangi dampak bencana yang terjadi, dan memulihkan keadaan pasca-bencana secara efektif.

Berikut Data-data Pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Banggai Sebagai Berikut :

Gambar 6.1.1 Jumlah Orang yang Terkena Bencana Tahun 2020-2023



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana, 2023

Gambar 6.1.2 Jumlah Kejadian Bencana Banjir Tahun 2020-2023



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana, 2023

**Tabel 5.8.1 Jumlah Fasilitas Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Banggai
Tahun 2021-2023**

| No | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | Satuan Data |
|----|--|------|------|------|-------------|
| 1 | Jumlah Mobil Penanggulangan Bencana | 3 | 3 | 4 | Unit |
| 2 | Jumlah Motor Dinas Penanggulangan Bencana | 5 | 14 | 15 | Unit |
| 3 | Jumlah Perahu Karet Dinas Penanggulangan Bencana | 5 | 13 | 13 | Unit |
| 4 | Jumlah Tenda Dinas Penanggulangan Bencana | 6 | 6 | 6 | Unit |
| 5 | Jumlah Valbet Dinas Penanggulangan Bencana | 4 | 4 | 4 | Unit |

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana, 2023

6.2 Pemadam Kebakaran

Pemadam kebakaran merupakan salah satu layanan penting yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran. Di Kabupaten Banggai, layanan pemadam kebakaran dikelola oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kabupaten Banggai. Pemadam kebakaran ini memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat serta melindungi properti dari kerusakan akibat kebakaran.

Peran dan Tugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai berperan penting dalam upaya penanggulangan kebakaran yang dapat terjadi di berbagai sektor, baik itu di kawasan pemukiman, industri, ataupun hutan dan lahan. Beberapa tugas utama Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai antara lain:

1. Pencegahan Kebakaran (Fire Prevention)
2. Tanggap Darurat Kebakaran
3. Penyelamatan dan Penanganan Bencana Lain
Selain kebakaran, Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai juga berperan dalam penanggulangan bencana lainnya, seperti penyelamatan korban kecelakaan atau bencana alam (misalnya tanah longsor atau banjir), serta melakukan pertolongan pertama kepada korban bencana.
4. Penyuluhan dan Pelatihan
5. Pengawasan dan Pelaporan

Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai

- Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar): Mobil damkar yang dilengkapi dengan alat pemadam api dan selang panjang digunakan untuk menyuplai air ke sumber api.

- Alat Pemadam Api Ringan (APAR): Pemadam kebakaran juga memiliki alat pemadam api ringan yang bisa digunakan untuk kebakaran kecil yang masih bisa dikendalikan.
- Peralatan Penyelamatan: Pemadam kebakaran dilengkapi dengan alat-alat penyelamatan, seperti tangga, alat pemotong, dan alat bantu lainnya untuk membantu evakuasi korban yang terjebak.
- Water Tank dan Sumber Air: Kabupaten Banggai, khususnya daerah yang rawan kebakaran, memiliki fasilitas penyediaan air yang memadai, termasuk penampungan air (reservoir) dan saluran untuk distribusi air.

Kolaborasi dengan Instansi Lain

Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai bekerja sama dengan berbagai instansi lain dalam menangani kebakaran dan penanggulangan bencana, seperti:

- Polres Banggai: Untuk pengamanan dan investigasi pasca-kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pihak yang lalai atau sengaja menyebabkan kebakaran.
- BPBD Kabupaten Banggai: BPBD mendukung dalam hal koordinasi dan distribusi bantuan ketika kebakaran menjadi bagian dari bencana yang lebih besar.
- TNI: Terlibat dalam pengamanan dan penanganan kebakaran di area yang lebih luas atau ketika bencana kebakaran melibatkan kerusakan besar.
- Satpol PP: Untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi kejadian kebakaran dan saat evakuasi.

6. 3 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu lembaga yang berperan dalam menjaga ketertiban dan penegakan hukum di daerah, termasuk dalam konteks penanggulangan bencana. Di Kabupaten Banggai, peran Satpol PP dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Dukungan dalam Penegakan Peraturan: Satpol PP berperan dalam memastikan bahwa peraturan daerah mengenai penanggulangan bencana, seperti pembatasan pergerakan warga saat bencana atau pelaksanaan aturan evakuasi, dapat diterapkan dengan efektif.
2. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat: Satpol PP bekerja sama dengan BPBD dan lembaga terkait lainnya untuk memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewaspadaan terhadap bencana dan cara bertindak di saat darurat.
3. Evakuasi dan Pengamanan: Dalam situasi bencana, Satpol PP turut berperan dalam proses evakuasi korban dan mengamankan lokasi-lokasi yang terdampak bencana, seperti mengatur arus lalu lintas dan memastikan tidak ada orang yang berada di lokasi berbahaya.
4. Pemberian Bantuan dan Logistik: Satpol PP membantu dalam distribusi bantuan logistik dan memastikan bantuan sampai ke tempat yang tepat. Mereka juga dapat berperan dalam pengelolaan tempat-tempat pengungsian.
5. Penegakan Hukum dan Ketertiban Umum: Satpol PP membantu menjaga ketertiban umum di tengah situasi darurat bencana, termasuk menangani penyalahgunaan atau kerusuhan yang bisa timbul di tengah krisis.

6. Penegakan Keamanan dan Ketertiban di Lokasi Pengungsian: Satpol PP menjaga keamanan di tempat-tempat pengungsian dan memastikan tidak ada penyalahgunaan atau tindakan yang merugikan di lokasi tersebut.

Kolaborasi dengan Instansi Terkait

Satpol PP Kabupaten Banggai bekerja sama dengan berbagai instansi dalam rangka penanggulangan bencana. Beberapa instansi yang terlibat adalah:

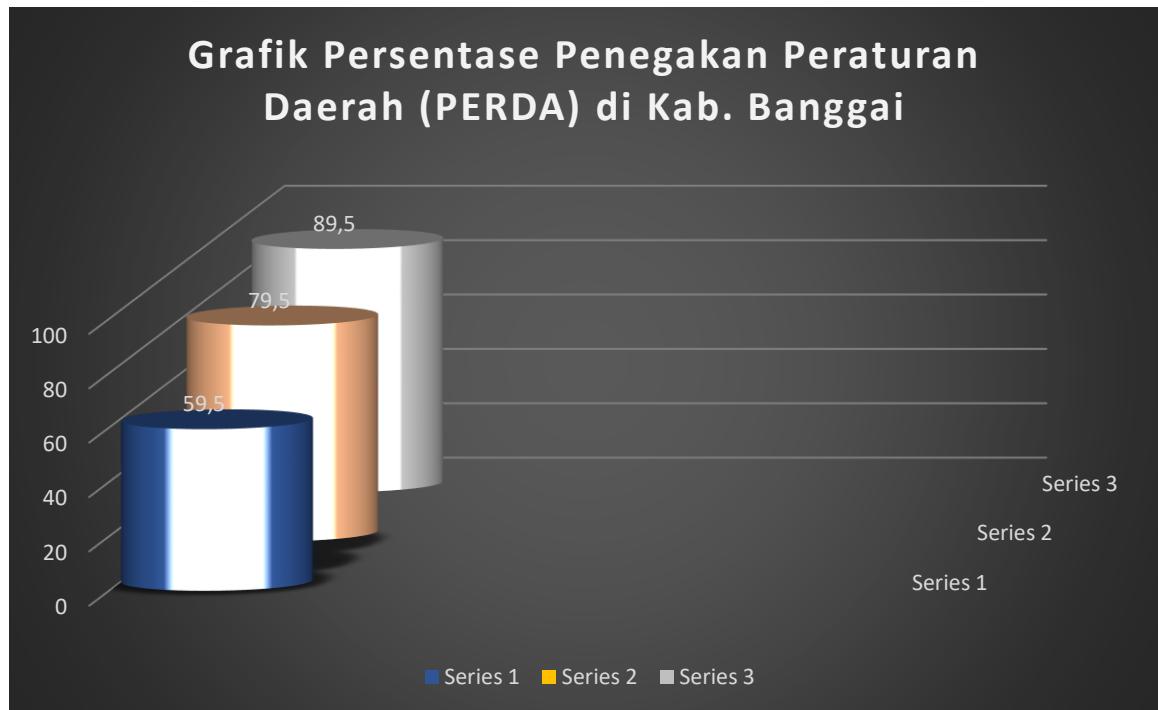
- BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah): Bertanggung jawab dalam merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Banggai.
- TNI dan Polri: Untuk mengamankan wilayah bencana dan membantu proses evakuasi.
- Dinas Sosial: Memberikan bantuan sosial kepada korban bencana.
- Relawan dan LSM: Berkolaborasi dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

Tabel 6.3.1 Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) di Kab. Banggai

| No | Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) di Kab. Banggai | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|----|---|------------|------------|------------|
| 1. | Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) di Kab. Banggai | 59,5 | 79,5 | 89,5 |
| | Jumlah | 59,5 | 79,5 | 89,5 |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

Grafik 6.3.2 Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) di Kab. Banggai



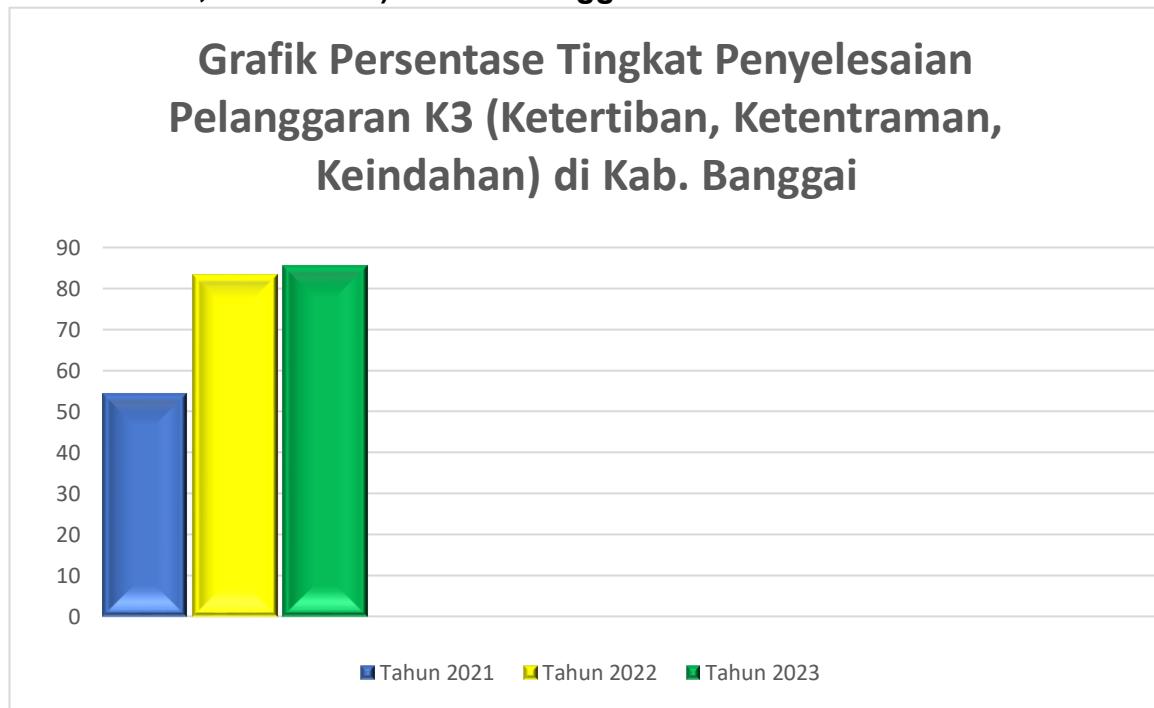
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

Tabel 6.3.3 Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kab. Banggai

| No | Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kab. Banggai | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|----|---|------------|------------|------------|
| 1. | Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kab. Banggai | 54,34 | 83,33 | 85,5 |
| | Jumlah | 54,34 | 83,33 | |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

Grafik 6.3.4 Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kab. Banggai



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

KESIMPULAN

Laporan Statistik Sektoral yang disusun oleh setiap dinas memberikan gambaran menyeluruh tentang capaian kinerja, tantangan, serta potensi pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Banggai. Berikut adalah kesimpulan umum yang dapat diambil dari laporan tersebut:

1. Kinerja dan Capaian Program

- Peningkatan Indikator Pembangunan

Sebagian besar dinas menunjukkan tren positif dalam pencapaian indikator pembangunan, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.

- Realisasi Program Prioritas

Program-program unggulan di berbagai sektor berhasil direalisasikan meskipun terdapat beberapa hambatan seperti alokasi anggaran yang terbatas.

2. Pengelolaan Sumber Daya

- Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran

Beberapa dinas berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dengan memprioritaskan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

- Pengembangan SDM

Dinas-dinas terkait menunjukkan komitmen terhadap pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama untuk mendukung transformasi digital dan pelayanan publik.

3. Tantangan dan Hambatan

- Keterbatasan Infrastruktur
Beberapa sektor menghadapi tantangan terkait kurangnya infrastruktur yang memadai, terutama di wilayah terpencil.
- Pengaruh Eksternal
Faktor eksternal seperti dinamika ekonomi global dan dampak perubahan iklim memengaruhi pelaksanaan program di sektor tertentu.
- Integrasi Data Antar Dinas
Masih terdapat kendala dalam penyatuan data lintas sektor, yang menghambat perencanaan terpadu berbasis bukti.

4. Digitalisasi dan Inovasi

- Implementasi Sistem Digital
Sebagian besar dinas telah mulai mengadopsi sistem digital untuk pengelolaan data dan pelayanan publik, meskipun tingkat implementasi masih beragam.
- Inovasi Pelayanan
Beberapa dinas menciptakan inovasi layanan berbasis teknologi yang berhasil meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan masyarakat.

5. Rekomendasi untuk Perbaikan

- Penguatan Kolaborasi Antar Dinas
Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan.
- Pemanfaatan Data yang Terintegrasi

Membangun sistem statistik sektoral yang terintegrasi guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

- Investasi pada Infrastruktur

Memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang masih tertinggal untuk memastikan pemerataan pembangunan.

- Transformasi Digital yang Konsisten

Mempercepat transformasi digital di semua dinas agar pelayanan publik lebih efektif dan efisien.

Kesimpulan ini menegaskan pentingnya komitmen bersama dari seluruh dinas untuk meningkatkan sinergi, mengoptimalkan sumber daya, dan mempercepat transformasi dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Banggai.